



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023

**DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KARAWANG**



www.karawangkab.go.id



*dinas kesehatan kab.
karawang*



@dinkeskrwkab

Jl. Parahiyanan No. 39 Karawang Telp. (0267) 402276 Fax. 40455



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI KARAWANG
NOMOR : 050/Kep. 165 –Huk/2022

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA TAHUN 2023 DAN
PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2022 PADA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KARAWANG

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 125 huruf (a) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Tahun 2023 dan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2013 Nomor : 2 Seri : E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karawang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2013 Nomor : 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 5 Tahun 2021, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021 Nomor 11);
15. Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang.

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang Nomor 441/610/Dinkes tanggal 08 Februari 2022 Perihal Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Bupati Karawang.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Penyusun Rencana Kerja Tahun 2023 dan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022 Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang, dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana diktum KESATU, bertugas untuk mengumpulkan data dan informasi, menyusun dokumen perencanaan sesuai tahapan dan tata cara termasuk melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen rencana Perangkat Daerah.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal 25 Februari 2022



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KARAWANG
NOMOR : 050/Kep. 165 -Huk/2022
TANGGAL : 25 Pebruari 2022

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA TAHUN 2023 DAN
PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2022 PADA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KARAWANG

- I. Ketua : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang
- II. Sekretaris : Kasubag Program dan Pelaporan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang.
- III. Kelompok Kerja I : 1. Sekretaris pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang;
2. Sub Koordinator Kelompok Sub-Substansi Program dan Pelaporan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang;
3. Kasubag Umum dan Kepegawaian pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang;
4. Kasubag Keuangan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang;
5. Perencana.
- IV. Kelompok Kerja II : 1. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang;
2. Sub Koordinator Kelompok Sub-Substansi Pelayanan Kesehatan Primer;
3. Sub Koordinator Kelompok Sub-Substansi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Jaminan Kesehatan;
4. Sub Koordinator Kelompok Sub-Substansi Legislasi dan Akreditasi;
5. Kepala UPTD PKK pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang;
6. Kepala UPTD Labkesda pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang;
7. Perencana.
- V. Kelompok Kerja III : 1. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat;
2. Sub Koordinator Kelompok Sub-Substansi Kesehatan Keluarga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang;
3. Sub Koordinator Kelompok Sub-Substansi Gizi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang;
4. Sub Koordinator Kelompok Sub-Substansi Promosi Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang;
5. Perencana
- VI. Kelompok Kerja IV : 1. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang;

2. Sub Koordinator Kelompok Sub-Substansi Surveilans dan Imunisasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang;
3. Sub Koordinator Kelompok Sub-Substansi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang;
4. Sub Koordinator Kelompok Sub-Substansi Kesehatan Lingkungan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang;
5. Perencana.

VII. Kelompok Kerja V

- :
1. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang;
 2. Sub Koordinator Kelompok Sub-Substansi Kefarmasian pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang;
 3. Sub Koordinator Kelompok Sub-Substansi Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang;
 4. Sub Koordinator Kelompok Sub-Substansi Sumber Daya Manusia Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang;
 5. Perencana.

VIII. Kelompok Kerja VI

- :
1. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang;
 2. Direktur Rumah Sakit Khusus Paru pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang;
 3. Kepala UPTD Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang;
 4. Perencana.



BUPATI KARAWANG,

CELLICA NURRACHADIANA



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG

DINAS KESEHATAN

Jalan Parahyangan No.39 Telp. (0267) 402276 Karawang Fax.404556

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KARAWANG
NOMOR : 440 /4077/2022

TENTANG

RENCANA KERJA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KARAWANG
TAHUN 2023

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KARAWANG,

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dipandang perlu menetapkan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang Tahun 2023 dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kabupaten Karawang.
 - b. Bahwa rencana kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang sebagaimana dimaksud pada huruf a telah disusun sebagai satu dokumen perencanaan indikatif yang memuat program-program pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023.
 - c. Bahwa sebagai dasar penyusunan rencana kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang mengacu pada RPJMD, RKPD, rencana strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang; serta peraturan lain yang berlaku.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan;
 - 4. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 - 7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.03/MENKES/52/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019;
 - 8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor : 9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025
 - 9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang No.8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Karawang Tahun 2021 – 2026
 - 10. Peraturan Bupati Karawang No : 41 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2023
 - 11. Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang Tahun 2021-2026

MEMUTUSKAN

- Menetapkan,
PERTAMA : 1. Surat keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang tentang Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang 2023, yang selanjutnya disebut Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang adalah dokumen perencanaan resmi SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang yang dipersyaratkan dalam memberikan pelayanan SKPD khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun;
2. Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang merupakan penjabaran per tahun dari Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang Tahun 2021-2026;
3. Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang Tahun 2023 disusun sebagai acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang Tahun 2023.
- KEDUA : Rencana kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang Tahun 2023 sebagaimana terlampir dalam keputusan ini, dengan sistematika sebagai berikut:
- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
- BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
- BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
- BAB V : PENUTUP
- KETIGA : Rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua digunakan sebagai acuan bagi Dinas Kesehatan dalam penyelenggaraan program pembangunan kesehatan di Kabupaten Karawang tahun 2023
- KEEMPAT : Segala biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2023;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Karawang
Tanggal : 1 Agustus 2022

**KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KARAWANG**



dr. ENDANG SURYADI MARS
Pembina Tingkat I
NIP. 19660108 200212 1 002

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang tahun 2023 ini dapat diselesaikan tepat waktu.

Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang Tahun 2023 adalah dokumen rencana pembangunan tahunan Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang untuk periode 1 (satu) tahun. Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang Tahun 2023 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Kesehatan (Renstra Dinkes) Kabupaten Karawang 2021-2026 dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karawang Tahun 2023. Tujuan penyusunan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang Tahun 2023 adalah sebagai acuan Dinas Kesehatan dalam mengimplementasikan RKPD Kabupaten Karawang Tahun 2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi jangka menengah daerah.

Pada akhirnya kami sangat menyadari bahwa Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang ini masih jauh dari sempurna, oleh sebab itu koreksi dan saran sangat kami harapkan dari seluruh komponen kesehatan maupun pihak-pihak yang terkait lainnya untuk perbaikan di tahun yang akan datang, semoga Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang ini dapat berguna bagi kita semua.

Karawang, 1 Agustus 2022

**KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KARAWANG**



dr. ENDANG SURYADI, MARS

NIP. 19660108 200212 1002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR GRAFIK.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	4
1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja	6
1.3.1 Maksud.....	6
1.3.2 Tujuan	7
1.4 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2021	9
2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021	9
2.1.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2021 dan Perkiraan Capaian Tahun 2022	9
2.1.2 Capaian Renstra SKPD Tahun 2021.....	71
2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2021.....	78
2.2.1 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)	78
2.2.2 Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK).....	79
2.2.3 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2021	126
2.2.4 Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) ..	129
2.2.5 Capaian Kinerja Keuangan.....	164
2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KESEHATAN	182
2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD.....	200

2.5	PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT	243
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN	245
3.1	TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL	245
3.2	TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH	250
3.2.1	Tujuan	250
3.1	PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS	253
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	275
BAB V	PENUTUP.....	310

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Dinas Kesehatan sampai dengan Tahun 2022.....	10
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Tahun 2021	72
Tabel 2.3 Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kab. Karawang	79
Tabel 2.4 Persentase Masyarakat Karawang yang Mempunyai Asuransi Kesehatan	81
Tabel 2.5 Capaian Peserta Kabupaten Karawang Tahun 2020	81
Tabel 2.6 Capaian Indikator Kinerja Presentase Puskesmas Terakreditasi	85
Tabel 2.7 Capaian Indikator Kinerja Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	91
Tabel 2.8 Capaian Indikator Kinerja Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar	100
Tabel 2.9 Capaian Indikator Kinerja Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	102
Tabel 2.10 Capaian Indikator Kinerja Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar	105
Tabel 2.11 Capaian Indikator Kinerja Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	107
Tabel 2.12 Capaian Indikator Kinerja Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	109
Tabel 2.13 Capaian Indikator Kinerja Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization	112
Tabel 2.14 Capaian Indikator Kinerja Pelayanan Kesehatan dengan TB	115
Tabel 2.15 Capaian Indikator Kinerja Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	119

Tabel 2.16	Capaian Indikator Kinerja Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hipertensi.....	121
Tabel 2.17	Capaian Indikator Kinerja Pelayanan Kesehatan pada Penderita Diabetes Melitus	123
Tabel 2.18	Capaian Indikator Kinerja Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat.....	124
Tabel 2.19	Capaian Indikator Kinerja Persentase Puskesmas Rawat Inap tiap Kecamatan	126
Tabel 2.20	Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2021	126
Tabel 2.21	Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal Dinas Kesehatan Kab. Karawang.....	129
Tabel 2.22	Capaian Indikator Kinerja Pelayanan Kesehatan Usia Produktif.....	150
Tabel 2.23	Capaian Indikator Kinerja Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hipertensi.....	154
Tabel 2.24	Capaian Indikator Kinerja Pelayanan Kesehatan pada Penderita Diabetes Melitus	156
Tabel 2.25	Capaian Indikator Kinerja Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat.....	157
Tabel 2.26	Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Tahun 2021	158
Tabel 2.27	Realisasi Capaian Kasus Tuberkulosis Kabupaten Karawang Tahun 2021	160
Tabel 2.28	Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi Virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) Tahun 2017 s.d 2021	163
Tabel 2.29	Realisasi Program Kegiatan dan Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang Tahun 2021	165
Tabel 2.30	Analisis Efisiensi dan Efektivitas Kegiatan	173
Tabel 2.31	Pemetaan Permasalahan Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	182
Tabel 2.32	Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2023 ...	200
Tabel 2.33	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan.....	243

Tabel 3.1 Permasalahan Pelayanan Dinas Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya..	247
Tabel 3.2 Rencana Program dan Kegiatan Prioritas.....	253
Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Tahun 2023.	276

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Keterkaitan Dokumen Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan	3
Gambar 1.2 Tindak Lanjut Renja dalam Penyusunan APBD	3
Gambar 2.1 Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi Virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV).....	120

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1 Capaian Akreditasi Puskesmas Di Indonesia Tahun 2021.....	84
Grafik 2.2 Status Kelulusan Akreditasi Puskesmas Di Indonesia Tahun 2021	84
Grafik 2.3 Status Kelulusan Survey Perdana Akreditasi Puskesmas	86
Grafik 2.4 Jumlah Puskesmas Yang Telah Melaksanakan Survey Reakreditasi Puskesmas Di Kabupaten Karawang s.d. Tahun 2021.....	86
Grafik 2.5 Status Kelulusan Survey Reakreditasi Puskesmas	87
Grafik 2.6 Capaian Indikator Kinerja Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar.....	91
Grafik 2.7 Capaian Indikator Kinerja Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	96
Grafik 2.8 Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar Tahun 2019 s.d 2021	97
Grafik 2.9 Hasil Universal Child Immunization tahun 2021.....	112
Grafik 2.10 Trend capaian pelayanan kesehatan dengan TB di Kab. Karawang.....	116
Grafik 2.11 Capaian Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil.....	135
Grafik 2.12 Capaian Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	140
Grafik 2.13 Capaian Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	143
Grafik 2.14 Capaian Balita Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar.....	145
Grafik 2.15 Capaian Anak Usia Pendidikan Dasar Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	148
Grafik 2.16 Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Tahun 2017 s.d 2021	153

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan kesehatan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Pembangunan kesehatan pada hakikatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa Indonesia untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang. Pembangunan kesehatan bertujuan untuk terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.

Untuk mencapai tujuan tersebut dilaksanakan program pembangunan kesehatan yang berkesinambungan; Agar pelaksanaan pembangunan kesehatan dapat terlaksana secara berkesinambungan, perlu dilakukan perencanaan dan penganggaran yang terpadu dan terarah.

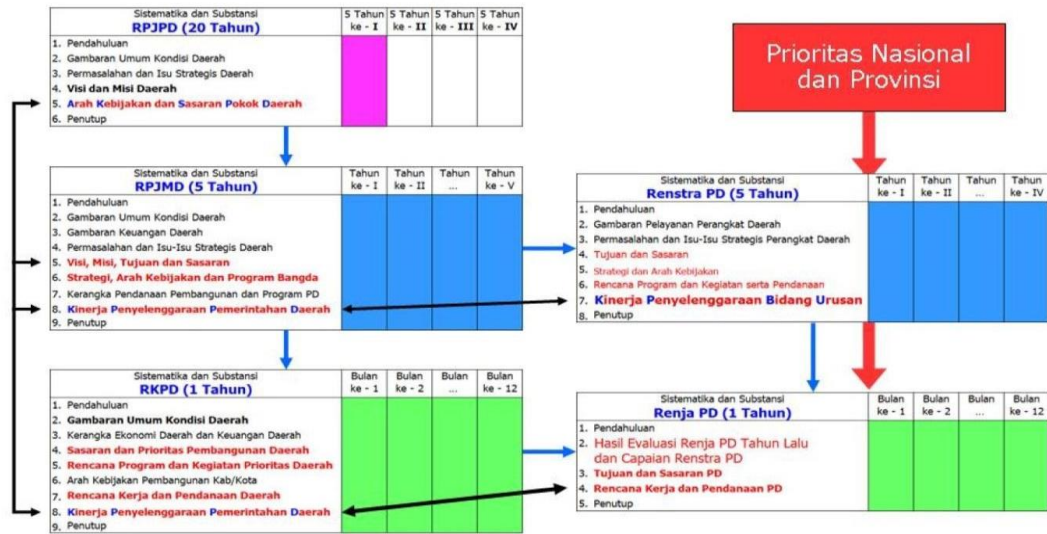
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), menyatakan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah dan perencanaan tahunan. Dokumen perencanaan jangka panjang daerah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, perencanaan jangka menengah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dan perencanaan pembangunan tahunan dituangkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Berdasarkan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana pembangunan Jangka Menengah

Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah terdiri atas 6 (enam) tahapan yaitu :

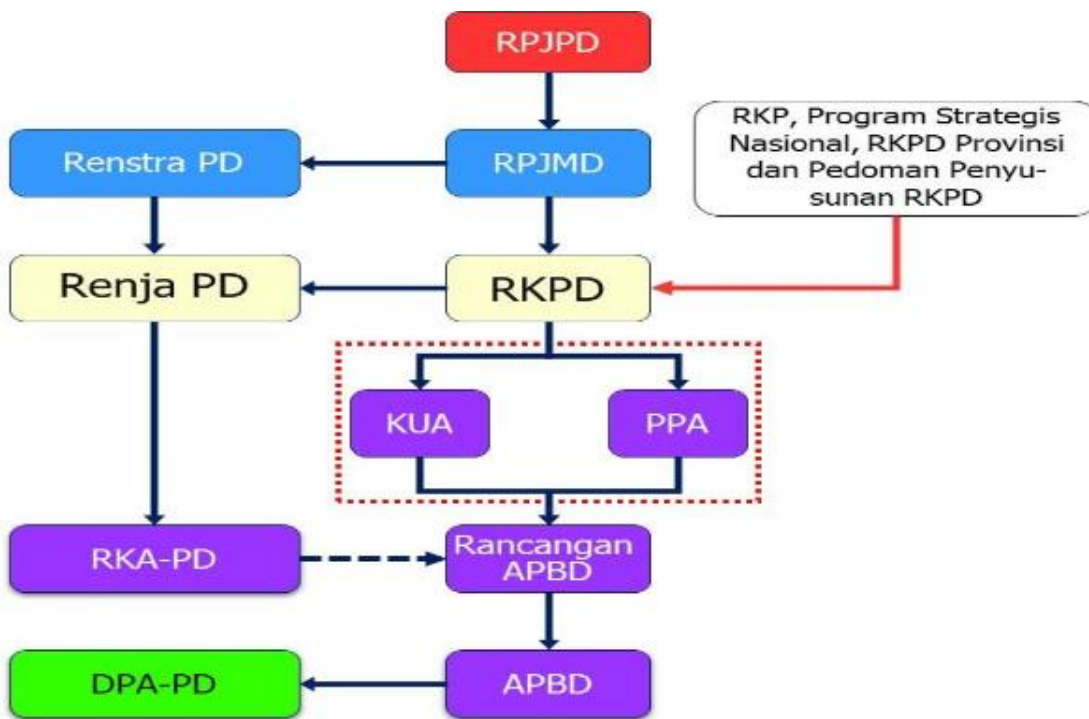
1. Persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah
2. Penyusunan Rencana Awal Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, evaluasi hasil renja tahun lalu dan evaluasi hasil Renja perangkat daerah tahun berjalan,
3. Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah berdasarkan surat edaran Kepala Daerah, tentang penyusunan rancangan renja Perangkat dan rencana awal RKPD.
4. Pembahasan Rancangan Renja Perangkat Daerah dalam forum Perangkat Daerah atau lintas Perangkat Daerah untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kineja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran.
5. Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Perkada tentang RKPD
6. Verifikasi Rancangan akhir Renja perangkat daerah untuk ditetapkan oleh Kepala daerah.

Proses penyusunan Renja Dinas Kesehatan tahun 2023 didasarkan pada Renstra Dinas Kesehatan tahun 2021-2026 dengan memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan dalam RKPD tahun 2023. Tahun 2023 merupakan tahun ke-3 perencanaan pembangunan Kabupaten Karawang yang berpedoman pada RPJMD 2021-2026. Selanjutnya Renja Perangkat Daerah dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan kemudian berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Keterkaitan dokumen Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan adalah seperti ditunjukkan pada gambar 1.1.



Gambar 1.1
Keterkaitan Dokumen Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan

Tindak lanjut dokumen Renja PD hingga menjadi APBD adalah seperti yang ditunjukkan pada gambar 1.2.



Gambar 1.2
Tindak Lanjut Renja dalam Penyusunan APBD

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) Nasional tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman, Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2012 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2013;
14. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 45);

22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023.
23. Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2015 tentang Kepesertaan dan Pembiayaan Penerima Bantuan Iuran Daerah Provinsi Jawa Barat;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2005-2025;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karawang Tahun 2011-2031;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karawang tahun 2021-2026 Tanggal 25 Agustus 2021.
27. Peraturan Bupati Karawang Nomor 55 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang.
28. Peraturan Bupati Karawang Nomor 35 tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021-2026 Tanggal 24 September 2021.
29. Rencana Strategis SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang Tahun 2021 – 2026
30. RKPD Kabupaten Karawang Tahun 2023.

1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja

1.3.1 Maksud

Rencana Kerja Dinas Kesehatan kabupaten Karawang disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam Perangkat Daerah serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang:

- a. Sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang untuk memastikan pencapaian target tahunan renstra Dinas kesehatan Kabupaten Karawang dan RPJMD Kabupaten Karawang di tahun 2023.
- b. Sebagai instrument akuntabilitas kinerja di tahun 2023 yang hasilnya akan dituangkan dalam laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesehatan dan laporan kinerja.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan rencana Kerja dinas Kesehatan Kabupaten Karawang tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II. HASIL VALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini berisi penjelasan hasil evaluasi pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Dinas Kesehatan tahun lalu, analisa kinerja pelayanan Perangkat Daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, hasil review terhadap Rancangan awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III. TUJUAN , SASARAN, PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi telaahan terhadap kebijakan nasional, uraian tujuan dan sasaran Renja serta program dan kegiatan prioritas yaitu program pembangunan daerah sesuai dengan bidang urusan Perangkat Daerah.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi Rumusan Kerja dan rencana Pendanaan, yaitu program pembangunan daerah dan program perangkat daerah untuk mewujudkan target tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah dan RPJMD.

BAB V. PENUTUP

Bab ini berisi uraian catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2021

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

Dalam rangka penyusunan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2023, diperlukan hasil evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya yaitu tahun 2021. Evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2021 dapat dilihat pada capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Kepala Dinas Kesehatan yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja, dan Realisasi Kinerja dan Anggaran Program Kegiatan Tahun 2021.

2.1.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2021 dan Perkiraan Capaian Tahun 2022

Sesuai dengan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Tahun 2021 dan Perkiraan Capaiannya di Tahun 2022, adalah seperti yang ditunjukkan pada Tabel 2.1 di bawah ini :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Dinas Kesehatan sampai dengan Tahun 2022

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (input)	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2020 (tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu 2021			Target program/kegiatan RKPD tahun 2022 (tahun n-1)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan 2022		Peran gkat Daerah Penanggung Jawab
					Target RKPD tahun 2021 (tahun n-2)	Realisasi RKPD tahun 2021 (tahun n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2022 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2022 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
	WAJIB										
	Kesehatan										
1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase RS Rujukan dan Faskes Dasar yang terakreditasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Persentase Rata-rata Capaian SPM	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Persentase Balita Gizi Kurang	10	16	15	15	100%	14	14	100%	
		Persentase Desa/Kelurahan STBM	1	90,61%	92,88%	92,88%	100%	95,47%	95,47%	100%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (input)	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2020 (tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu 2021			Target program/kegiatan RKPd tahun 2022 (tahun n-1)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target RKPd tahun 2021 (tahun n-2)	Realisasi RKPd tahun 2021 (tahun n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2022 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2022 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan Dasar dan Rujukan yang difasilitasi	55 Faskes	54 Faskes	54 Faskes	54 Faskes	100%	55 Faskes	55 Faskes	100%	
1.02.02.2.01.01	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Pembangunan RSUD yang dilaksanakan	1 unit RSUD	1 unit RSUD	1 unit RSUD	1 unit RSUD	100%	1 unit RSUD	1 unit RSUD	100%	
1.02.02.2.01.02	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pembangunan Puskesmas dengan Tempat Perawatan	5 Puskesmas	26 Puskesmas	4 Puskesmas	4 Puskesmas	100%	5 Puskesmas	5 Puskesmas	100%	
		Rasio Puskesmas/Satuan Penduduk	1:30.000	1:47.000	1:30.000	1:30.000	100%	1:30.000	1:30.000	100%	
1.02.02.2.01.03	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Pembangunan Fasilitas Kesehatan yang dilaksanakan	1 Gedung	1 Gedung	1 Gedung	1 Gedung	100%	1 Gedung	1 Gedung	100%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (input)	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2020 (tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu 2021			Target program/kegiatan RKPd tahun 2022 (tahun n-1)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target RKPd tahun 2021 (tahun n-2)	Realisasi RKPd tahun 2021 (tahun n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2022 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2022 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
1.02.02.2.01.05	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Pembangunan Fasilitas RS yang dikembangkan	1 Gedung	1 Gedung	1 Gedung	1 Gedung	100%	1 Gedung	1 Gedung	100%	
1.02.02.2.01.06	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang dikembangkan menjadi DTP	5	8	8	8	100%	8	8	100%	
1.02.02.2.01.07	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Bangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya yang dilakukan pengembangan	1 Gedung	1 Gedung	1 Gedung	1 Gedung	100%	0	0	100%	
1.02.02.2.01.08	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Bangunan Fasilitas RS yang dilakukan pemeliharaan	1 Gedung	1 Gedung	1 Gedung	1 Gedung	100%	1 Gedung	1 Gedung	100%	
1.02.02.2.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Bangunan Puskesmas yang dilakukan pemeliharaan	10 Puskesmas	10 Puskesmas	10 Puskesmas	10 Puskesmas	100%	10 Puskesmas	10 Puskesmas	100%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (input)	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2020 (tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu 2021			Target program/kegiatan RKPd tahun 2022 (tahun n-1)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target RKPd tahun 2021 (tahun n-2)	Realisasi RKPd tahun 2021 (tahun n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2022 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2022 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
1.02.02.2.01.10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Bangunan Puskesmas yang dilakukan pemeliharaan	10 Puskesmas	10 Puskesmas	10 Puskesmas	10 Puskesmas	100%	10 Puskesmas	10 Puskesmas	100%	
1.02.02.2.01.12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah rumah tunggu pasien rujukan	3 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100%	3 unit	3 unit	100%	
1.02.02.2.01.13	Pengadaan PraSarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah pengadaan prasarana dan pendukung pelayanan kesehatan	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	1 paket	100%	
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Paket pengadaan Alat Kesehatan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	100%	
1.02.02.2.01.15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Paket pengadaan Alat Kesehatan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	100%	
1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	Persentase Ketersediaan Obat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (input)	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2020 (tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu 2021			Target program/kegiatan RKPD tahun 2022 (tahun n-1)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target RKPD tahun 2021 (tahun n-2)	Realisasi RKPD tahun 2021 (tahun n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2022 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2022 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
		Essensial di Puskesmas									
		Persentase Ketersediaan Obat Covid.19	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1.02.02.2.01.17		Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Paket pengadaan bahan habis pakai	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	100%
1.02.02.2.01.18		Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah sarana fasilitas pelayanan kesehatan yang dilakukan pemeliharaan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	100%
1.02.02.2.01.19		Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan yang dilakukan pemeliharaan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	100%
1.02.02.2.01.20		Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (input)	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2020 (tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu 2021			Target program/kegiatan RKPd tahun 2022 (tahun n-1)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target RKPd tahun 2021 (tahun n-2)	Realisasi RKPd tahun 2021 (tahun n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2022 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2022 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
	Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang dilakukan pemeliharaan									
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rata-rata capaian Standar Pelayanan Minimal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil	100%	95,94%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100%	99,94%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100%	105,40%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (input)	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2020 (tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu 2021			Target program/kegiatan RKPd tahun 2022 (tahun n-1)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target RKPd tahun 2021 (tahun n-2)	Realisasi RKPd tahun 2021 (tahun n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2022 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2022 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar	100%	77,9%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	98,43%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	12,26%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Persentase warga negara usia 60 tahun Keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	53,44%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan	Persentase penderita hipertensi mendapat	100%	24,94%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (input)	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2020 (tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu 2021			Target program/kegiatan RKPd tahun 2022 (tahun n-1)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target RKPd tahun 2021 (tahun n-2)	Realisasi RKPd tahun 2021 (tahun n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2022 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2022 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
		Kesehatan Penderita Hipertensi	elayanan kesehatan sesuai standar								
1.02.02.2.02.09		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	37,86%	100%	100%	100%	100%	100%	
1.02.02.2.02.10		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100%	69,54%	100%	100%	100%	100%	100%	
1.02.02.2.02.11		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100%	46,51%	100%	100%	100%	100%	100%	
			Capaian Penemuan Kasus TB Semua Tipe (CDR=Case Detection Rate)	90%	87%	90%	90%	100%	90%	90%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (input)	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2020 (tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu 2021			Target program/kegiatan RKPD tahun 2022 (tahun n-1)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target RKPD tahun 2021 (tahun n-2)	Realisasi RKPD tahun 2021 (tahun n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2022 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2022 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
		Kasus Ternotifikasi (CNR=Case Notification Rate)	241/100.000 Pddk	209,2/100.000	241/100.000 Pddk	241/100.000 Pddk	100%	241/100.000 Pddk	241/100.000 Pddk	100%	
		Angka Keberhasilan Pengobatan TBSO (TSR TBSO)	90%	59,30%	90%	90%	100%	90%	90%	100%	
		Capaian Penemuan Kasus TBRO (CDR TBRO)	3% kasus TBSO	2%	3% kasus TBSO	3% kasus TBSO	100%	3% kasus TBSO	3% kasus TBSO	100%	
		Angka Keberhasilan Pengobatan TBRO (TSR TBRO)	60%	50,32%	60%	60%	100%	60%	60%	100%	
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100%	48,20%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi	Persentase Masyarakat yang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (input)	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2020 (tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu 2021			Target program/kegiatan RKPD tahun 2022 (tahun n-1)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target RKPD tahun 2021 (tahun n-2)	Realisasi RKPD tahun 2021 (tahun n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2022 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2022 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
		Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	dilayani pada kondisi KLB								
1.02.02.2.02.14		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Persentase Masyarakat yang dilayani di lokasi Bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1.02.02.2.02.15		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Prevalensi Stunting(pendek dan sangat pendek) pada balita	10,5	12,5	12	12	100%	11,5	11,5	100%
			Presentasi balita underweight	12	16	15	15	100%	14	14	100%
			Presentase Ibu hamil anemia	33	45	42	42	100%	39	39	100%
			Presentase bayi dengan berat badan	2,5	5,4	4,6	4,6	100%	3,8	3,8	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (input)	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2020 (tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu 2021			Target program/kegiatan RKPd tahun 2022 (tahun n-1)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target RKPd tahun 2021 (tahun n-2)	Realisasi RKPd tahun 2021 (tahun n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2022 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2022 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
		lahie rendah (berat badan < 2500 gram)									
		Presentase bayi usia 6 bulan mendapat ASI Eksklusif	55	35	40	40	100%	45	45	100%	
		Presentase ibu hamil yang mendapatkan Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 tablet selama masa kehamilan	100	99	100	100	100%	100	100	100%	
		Presentase ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK) yang mendapatkan makanan tambahan	98	92	95	95	100%	96	96	100%	
		Presentase gizi kurang yang mendapat makanan tambahan	98	92	95	95	100%	96	96	100%	
		Presentase remaja putri mendapat TTD	100	80	100	100	100%	100	100	100%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (input)	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2020 (tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu 2021			Target program/kegiatan RKPd tahun 2022 (tahun n-1)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target RKPd tahun 2021 (tahun n-2)	Realisasi RKPd tahun 2021 (tahun n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2022 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2022 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
		Presentase bayi baru lahir mendapat IMD	100	75	100	100	100%	100	100	100%	
		Presentase balita yang ditimbang berat badannya	85	60	70	70	100%	75	75	100%	
		Presentase balita mempunyai buku KIA/KMS	85	66	70	70	100%	75	75	100%	
		Presentase balita ditimbang naik berat badannya	95	95	95	95	100%	95	95	100%	
		Presentase balita 6-59 balita mendapat vitamin A	90	86	87	87	100%	88	88	100%	
		Presentase ibu nifas mendapat kapsul vitamin A	82	70	73	73	100%	78	78	100%	
		Presentase Rumah Tangga mengkonsumsi garam beryodium	90	90	90	90	100%	90	90	100%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (input)	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2020 (tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu 2021			Target program/kegiatan RKPd tahun 2022 (tahun n-1)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target RKPd tahun 2021 (tahun n-2)	Realisasi RKPd tahun 2021 (tahun n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2022 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2022 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
		Presentase kasus balita gizi buruk yang mendapat perawatan	90	90	90	90	100%	90	90	100%	
		Presentase anak dibawah 5 tahun (balita) gizi buruk yang mendapatkan pelayanan tatalaksana gizi buruk	60	100	20	20	100%	30	30	100%	
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Persentase Puskesmas Menyelenggarakan Kesehatan Kerja Dasar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Persentase rumah sakit yang melaksanakan K3RS	100%	100%	100%	100%	100%				
		Persentase Puskesmas yang Menyelenggarakan Olah Raga pada	100%	100%	100%	100%	100%				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (input)	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2020 (tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu 2021			Target program/kegiatan RKPd tahun 2022 (tahun n-1)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target RKPd tahun 2021 (tahun n-2)	Realisasi RKPd tahun 2021 (tahun n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2022 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2022 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
				Kelompok Masyarakat di Wilayah Kerjanya							
1.02.02.2.02.17		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Persentase penduduk yang memiliki akses berkelanjutan terhadap sumber air minum berkualitas (layak)	100%	85%	90%	90%	100%	95%	95%	100%
			Persentase penduduk dengan akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak (jamban sehat)	100%	80%	86%	86%	100%	91%	91%	100%
			Persentase desa / Kelurahan yg telah melaksanakan STBM	309	280	287	287	100%	295	295	100%
			Persentase Sarana Air Minum yang	85%	55%	62%	62%	100%	67%	67%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (input)	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2020 (tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu 2021			Target program/kegiatan RKPd tahun 2022 (tahun n-1)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target RKPd tahun 2021 (tahun n-2)	Realisasi RKPd tahun 2021 (tahun n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2022 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2022 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
		dilakukan pengawasan									
		Persentase Tempat-Tempat Umum (TTU) Yang Memenuhi Syarat Kesehatan	85%	60%	66%	66%	100%	68%	68%	100%	
		Persentase RS Yang Melakukan Pengelolaan Limbah Medis Sesuai Standar	75%	40%	50%	50%	100%	55%	55%	100%	
		Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Yang Memenuhi Syarat Kesehatan	60%	25%	35%	35%	100%	40%	40%	100%	
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Persentase Pengelolaan Pelayanan Promosi kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1.02.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan	Persentase puskesmas	85%	50%	60%	60%	100%	65%	65%	100%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (input)	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2020 (tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu 2021			Target program/kegiatan RKPd tahun 2022 (tahun n-1)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan 2022		Peran gkat Daerah Penanggung Jawab
					Target RKPd tahun 2021 (tahun n-2)	Realisasi RKPd tahun 2021 (tahun n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2022 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2022 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
		Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	menyelenggarakan kesehatan tradisional								
1.02.02.2.02.20		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Persentase kasus KLB penyakit/keracunan pangan terlacak/investigasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
			Persentase kasus KLB penyakit yang ditangani < 24 jam	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
			Penemuan kasus AFP non polio pada penduduk usia < 15 tahun sebesar > 2 per 100.000 penduduk	2,7	2,2 per 100.000	2,2	2,2	100%	2,3	2,3	100%
			Insidens Rate Kasus Campak < 5 per 1.000.000 penduduk	< 5 per 1 jt	< 5 per 1 jt	< 5 per 1 jt	< 5 per 1 jt	100%	< 5 per 1 jt	< 5 per 1 jt	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (input)	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2020 (tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu 2021			Target program/kegiatan RKPD tahun 2022 (tahun n-1)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target RKPD tahun 2021 (tahun n-2)	Realisasi RKPD tahun 2021 (tahun n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2022 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2022 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
		Persentase rumor/ dugaan/ sinyal KLB yang dilakukan verifikasi/ respon	98%	80%	85%	85%	100%	85%	85%	100%	
		Persentase jemaah haji melakukan pemeriksaan kesehatan masa keberangkatan & terinput ke siskohatkes	100%	100%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	
		Persentase jemaah haji mendapatkan vaksinasi meningitis sebelum keberangkatan	100%	100%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	
		Persentase jemaah haji dilakukan pemantauan keberangkatan dan kepulangan	100%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (input)	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2020 (tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu 2021			Target program/kegiatan RKPD tahun 2022 (tahun n-1)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target RKPD tahun 2021 (tahun n-2)	Realisasi RKPD tahun 2021 (tahun n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2022 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2022 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
1.02.02.2.02.21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Persentase ODMK yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100%	69,54%	100%	100%	100%				
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Persentase pasien gangguan jiwa dan NAPZA yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	69,54%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1.02.02.2.02.23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah pelayanan kesehatan khusus yang dilaksanakan	5 jenis	5 jenis	5 jenis	5 jenis	100%	5 jenis	5 jenis	100%	
1.02.02.2.02.24	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Persentase berkurangnya resiko krisis kesehatan	50%	50%	-	-	100%	50%	50%	100%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (input)	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2020 (tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu 2021			Target program/kegiatan RKPd tahun 2022 (tahun n-1)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target RKPd tahun 2021 (tahun n-2)	Realisasi RKPd tahun 2021 (tahun n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2022 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2022 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Angka Kesakitan / Incident Rate (IR) Malaria	-	0	-	-	100%	-	-		
		Persentase Cakupan Penemuan Kasus Baru Kusta Tanpa Cacat II dan Frambusia	95%		95%	95%	100%	95%	95%	100%	
		Cakupan Pelayanan Diare Sesuai Standar	100 %	23%	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100%	
		Persentase Deteksi Dini Hepatitis B pada Ibu Hamil	100 %	44,99%	60 %	60 %	100%	70 %	70 %	100%	
		Persentase Penderita Filariasis Mendapat Perawatan Sesuai Standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Angka Kesakitan / Incident Rate (IR) DBD	< 49 per 100.000 Penduduk	< 49 per 100.000 Penduduk	< 49 per 100.000 Penduduk	< 49 per 100.000 Penduduk	100%	< 49 per 100.000 Penduduk	< 49 per 100.000 Penduduk	100%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (input)	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2020 (tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu 2021			Target program/kegiatan RKPDP tahun 2022 (tahun n-1)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target RKPDP tahun 2021 (tahun n-2)	Realisasi RKPDP tahun 2021 (tahun n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2022 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2022 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
		Case Fatality Rate (CFR) DBD	< 1	0.9	< 1	< 1	100%	< 1	< 1	100%	
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Persentase Penduduk yang mendapatkan jaminan kesehatan menuju Universal Health Coverage (UHC)	95%	85%	89%	89%	100%	95%	95%	100%	
1.02.02.2.02.27	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah kasus penyalahgunaan NAPZA yang terdeteksi	100	0	0	0	100%	-	-		
1.02.02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah spesimen Spesimen Penyakit Potensial KLB yang diperiksa	10	0	0	0	100%	-	-		
1.02.02.2.02.29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Strata kabupaten Sehat		0	0	0	100%	-	-		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (input)	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2020 (tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu 2021			Target program/kegiatan RKPDP tahun 2022 (tahun n-1)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target RKPDP tahun 2021 (tahun n-2)	Realisasi RKPDP tahun 2021 (tahun n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2022 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2022 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
1.02.02.2.02.30	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah faskes yang menyediakan pelayanan telemedicine berkualitas	53	-	-	-	100%	53	53	100%	
1.02.02.2.02.31	Pengelolaan Penelitian Kesehatan	Jumlah penelitian kesehatan yang dilaksanakan	1	0	0	0	100%	-	-		
1.02.02.2.02.32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan RS	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase Pemanfaatan Dana Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1.02.02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Persentase pelayanan kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (input)	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2020 (tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu 2021			Target program/kegiatan RKPd tahun 2022 (tahun n-1)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target RKPd tahun 2021 (tahun n-2)	Realisasi RKPd tahun 2021 (tahun n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2022 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2022 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
			laboratorium kesehatan daerah								
1.02.02.2.02.35		Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas Terakreditasi Utama	7 Puskesmas	0	0	100%	6 Puskesmas	6 Puskesmas	100%	
			Jumlah Klinik Terakreditasi	34 klinik	0	0	100%	20 klinik	20 klinik	100%	
			Jumlah RS Terakreditasi	0	21 RS	0	0	3 RS	3 RS	100%	
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya terakreditasi	0	1 Fasilitas	0	0	0	0	100%	
1.02.02.2.02.36		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Persentase Kejadian kasus ikutan pasca imunisasi yang tertangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (input)	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2020 (tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu 2021			Target program/kegiatan RKPd tahun 2022 (tahun n-1)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target RKPd tahun 2021 (tahun n-2)	Realisasi RKPd tahun 2021 (tahun n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2022 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2022 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
1.02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Persentase Kejadian kasus ikutan pasca imunisasi yang tertangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Persentase Desa/Kelurahan yang mencapai UCI	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		AFP rate non polio minimal 2/100.000 penduduk usia <15 tahun	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Persentase masyarakat yang telah mendapat vaksinasi Covid 19	80%	70%	80%	80%	100%	80%	80%	100%	
1.02.02.2.02.38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Persentase kasus gawat darurat yang tertangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (input)	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2020 (tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu 2021			Target program/kegiatan RKPDP tahun 2022 (tahun n-1)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target RKPDP tahun 2021 (tahun n-2)	Realisasi RKPDP tahun 2021 (tahun n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2022 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2022 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Persentase Puskesmas menggunakan Sistem Informasi Kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1.02.02.2.03.01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Puskesmas menggunakan SIKDA Generik	50 Puskesmas	50 Puskesmas	50 Puskesmas	50 Puskesmas	100%	50 Puskesmas	50 Puskesmas	100%	
1.02.02.2.03.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Persentase Puskesmas memanfaatkan SIKDA Generik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1.02.02.2.03.03	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	1 paket	0	0	0	100%	0	0	100%	
1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitas Kesehatan melaksanakan Pelayanan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (input)	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2020 (tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu 2021			Target program/kegiatan RKPD tahun 2022 (tahun n-1)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target RKPD tahun 2021 (tahun n-2)	Realisasi RKPD tahun 2021 (tahun n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2022 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2022 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
		Kesehatan Sesuai Standar									
1.02.02.2.04.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Persentase RS dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memiliki surat ijin operasional (SIO)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1.02.02.2.04.02	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase RS dan Fasilitas Kesehatan yang melaksanakan tata kelola sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1.02.02.2.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap	100%	91,28	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (input)	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2020 (tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu 2021			Target program/kegiatan RKPDP tahun 2022 (tahun n-1)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target RKPDP tahun 2021 (tahun n-2)	Realisasi RKPDP tahun 2021 (tahun n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2022 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2022 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
		Pelayanan Puskesmas									
1.02.02.2.04.04	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Puskesmas dan RS melaksanakan pelayanan rujukan sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Memiliki Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	100%	60%	60%	60%	100%	70%	70%	100%	
1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Tenaga Kesehatan yang memiliki ijin praktik	100%	60%	60%	60%	100%	70%	70%	100%	
1.02.03.2.01.01	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Persentase tenaga kesehatan yang memiliki ijin praktik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (input)	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2020 (tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu 2021			Target program/kegiatan RKPd tahun 2022 (tahun n-1)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target RKPd tahun 2021 (tahun n-2)	Realisasi RKPd tahun 2021 (tahun n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2022 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2022 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
1.02.03.2.01.02	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Persentase tenaga kesehatan yang mendapat pembinaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1.02.02.2.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Puskesmas	100%	91,28	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1.02.02.2.04.04	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Puskesmas dan RS melaksanakan pelayanan rujukan sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (input)	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2020 (tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu 2021			Target program/kegiatan RKPd tahun 2022 (tahun n-1)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target RKPd tahun 2021 (tahun n-2)	Realisasi RKPd tahun 2021 (tahun n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2022 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2022 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Memiliki Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	100%	60%	60%	60%	100%	70%	70%	100%	
1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Tenaga Kesehatan yang memiliki ijin praktik	100%	60%	60%	60%	100%	70%	70%	100%	
1.02.03.2.01.01	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Persentase tenaga kesehatan yang memiliki ijin praktik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1.02.03.2.01.02	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Persentase tenaga kesehatan yang mendapat pembinaan	100%	60%	60%	60%	100%	60%	60%	100%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (input)	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2020 (tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu 2021			Target program/kegiatan RKPd tahun 2022 (tahun n-1)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target RKPd tahun 2021 (tahun n-2)	Realisasi RKPd tahun 2021 (tahun n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2022 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2022 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Melaksanakan Perencanaan dan Pengelolaan Mutu Tenaga Kesehatan	100%	60%	60%	60%	100%	70%	70%	100%	
1.02.03.2.02.01	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	100%	60%	60%	60%	100%	60%	60%	100%	
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Persentase Fasilitas Kesehatan dengan tenaga kesehatan sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1.02.03.2.02.03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang mendapat pembinaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (input)	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2020 (tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu 2021			Target program/kegiatan RKPd tahun 2022 (tahun n-1)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target RKPd tahun 2021 (tahun n-2)	Realisasi RKPd tahun 2021 (tahun n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2022 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2022 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SDM Kesehatan yang mendapat Pendidikan dan Pelatihan sesuai Kompetensi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1.02.03.2.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang ditingkatkan kualifikasinya melalui pendidikan dan pelatihan	50 Orang	50 Orang	50 Orang	50 Orang	100%	50 Orang	50 Orang	100%	
		Jumlah Jenis Tenaga Kesehatan Mengikuti Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan	7 Jenis Nakes	7 Jenis Nakes	7 Jenis Nakes	7 Jenis Nakes	100%	7 Jenis Nakes	7 Jenis Nakes	100%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (input)	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2020 (tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu 2021			Target program/kegiatan RKPDP tahun 2022 (tahun n-1)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target RKPDP tahun 2021 (tahun n-2)	Realisasi RKPDP tahun 2021 (tahun n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2022 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2022 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Sarana Penyedia Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, Makanan dan Minuman yang memenuhi standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1.02.04.2.01.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat	1 dokumen	1 dokumen	60 Sarana	60 Sarana	100%	60 Sarana	60 Sarana	100%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (input)	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2020 (tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu 2021			Target program/kegiatan RKPD tahun 2022 (tahun n-1)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target RKPD tahun 2021 (tahun n-2)	Realisasi RKPD tahun 2021 (tahun n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2022 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2022 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
		Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)								
1.02.04.2.01.02		Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindak Lanjut Penerbitan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	60 Sarana	60 Sarana	60 Sarana	60 Sarana	100%	60 Sarana	60 Sarana	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (input)	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2020 (tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu 2021			Target program/kegiatan RKPd tahun 2022 (tahun n-1)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target RKPd tahun 2021 (tahun n-2)	Realisasi RKPd tahun 2021 (tahun n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2022 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2022 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
1.02.04.2.01.03	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Memenuhi Komitmen Izin	60 Sarana	60 Sarana	60 Sarana	60 Sarana	100%	60 Sarana	60 Sarana	100%	
1.02.04.2.02	Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (input)	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2020 (tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu 2021			Target program/kegiatan RKPd tahun 2022 (tahun n-1)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan 2022		Peran gkat Daerah Penanggung Jawab
					Target RKPd tahun 2021 (tahun n-2)	Realisasi RKPd tahun 2021 (tahun n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2022 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2022 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
1.02.04.2.02.01	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%	
1.02.04.2.02.02	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (input)	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2020 (tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu 2021			Target program/kegiatan RKPd tahun 2022 (tahun n-1)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target RKPd tahun 2021 (tahun n-2)	Realisasi RKPd tahun 2021 (tahun n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2022 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2022 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	100%	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%	
1.02.04.2.03.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (input)	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2020 (tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu 2021			Target program/kegiatan RKPd tahun 2022 (tahun n-1)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target RKPd tahun 2021 (tahun n-2)	Realisasi RKPd tahun 2021 (tahun n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2022 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2022 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
		Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga								
1.02.04.2.05	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	100%	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%	100%	100%	100%	
1.02.04.2.05.01	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (input)	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2020 (tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu 2021			Target program/kegiatan RKPd tahun 2022 (tahun n-1)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target RKPd tahun 2021 (tahun n-2)	Realisasi RKPd tahun 2021 (tahun n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2022 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2022 (%)	
1	2		3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
		dan Sentra Makanan Jajanan	dan Sentra Makanan Jajanan									
1.02.04.2.06		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Terlaksananya Pemeriksaan Post Market pada Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	100%	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%	100%	100%	100%	
1.02.04.2.06.01		Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (input)	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2020 (tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu 2021			Target program/kegiatan RKPD tahun 2022 (tahun n-1)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target RKPD tahun 2021 (tahun n-2)	Realisasi RKPD tahun 2021 (tahun n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2022 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2022 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
1.02.04.2.06.02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga	Jumlah Data Perizinan Industri Rumah Tangga yang Dikelola dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (input)	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2020 (tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu 2021			Target program/kegiatan RKPd tahun 2022 (tahun n-1)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target RKPd tahun 2021 (tahun n-2)	Realisasi RKPd tahun 2021 (tahun n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2022 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2022 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
1.02.05.2 .01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Desa siaga aktif berstrata PURI (Purnama Mandiri)	139	48	62	62	100%	77	77	100%	
		Persentase Desa dan Kelurahan siaga aktif	100	100	100	100	100%	100	100	100%	
		Persentase Rumah Tangga ber Prilaku Hidup Bersih Sehat	70	56,13	57	57	100%	60	60	100%	
		Jumlah Kebijakan Publik yang Berwawasan Kesehatan	1	0	0	0	100%	0	0	100%	
		Jumlah Forum/Jejaring Kemitraan promosi kesehatan yang aktif	6	1	1	1	100%	2	2	100%	
		Jumlah Jenis Media yang digunakan dalam KIE	6	5	5	5	100%	6	6	100%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (input)	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2020 (tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu 2021			Target program/kegiatan RKPD tahun 2022 (tahun n-1)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target RKPD tahun 2021 (tahun n-2)	Realisasi RKPD tahun 2021 (tahun n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2022 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2022 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
		Jumlah Kegiatan Pelatihan / Orientasi Promkes	2	1	2	2	100%	2	2	100%	
		Jumlah Duta Germas	6	0	0	0	100%	6	6	100%	
		Jumlah kampung Germas	20	0	0	0	100%	1	1	100%	
		Persentase posyandu aktif	80%	61,58%	0,62	0,62	100%	64%	64%	100%	
		Jumlah Sekolah Ber PHBS	1270	1078	1083	1083	100%	1118	1118	100%	
1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1.02.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (input)	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2020 (tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu 2021			Target program/kegiatan RKPD tahun 2022 (tahun n-1)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target RKPD tahun 2021 (tahun n-2)	Realisasi RKPD tahun 2021 (tahun n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2022 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2022 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
1.02.05.2.02.02	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (input)	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2020 (tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu 2021			Target program/kegiatan RKPd tahun 2022 (tahun n-1)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target RKPd tahun 2021 (tahun n-2)	Realisasi RKPd tahun 2021 (tahun n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2022 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2022 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renstra, Renja, RKA, DPA)	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	
1.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (LAKIP, LPPD, LKPJ, SPM, IKU, IKK, IKI, TAPKIN)	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	100%	8 Dokumen	8 Dokumen	100%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (input)	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2020 (tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu 2021			Target program/kegiatan RKPd tahun 2022 (tahun n-1)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target RKPd tahun 2021 (tahun n-2)	Realisasi RKPd tahun 2021 (tahun n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2022 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2022 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan yang terlaksana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran/Tahunan SKPD	4 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	4 dokumen	4 dokumen	100%	
1.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Tahunan SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%	
1.02.01.2.02.076	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (input)	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2020 (tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu 2021			Target program/kegiatan RKPDP tahun 2022 (tahun n-1)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target RKPDP tahun 2021 (tahun n-2)	Realisasi RKPDP tahun 2021 (tahun n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2022 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2022 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
1.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	100%	12 dokumen	12 dokumen	100%	
1.02.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Laporan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%	
1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Puskesmas Menyampaikan Laporan Pengelolaan aset Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1.02.01.2.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan pengelolaan aset	0	1 Laporan Aset	1 Laporan Aset	1 Laporan Aset	100%	0	0	100%	
1.02.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang	Jumlah laporan pengelolaan aset	1 Laporan Aset	1 Laporan Aset	1 Laporan Aset	1 Laporan Aset	100%	1 Laporan Aset	1 Laporan Aset	100%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (input)	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2020 (tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu 2021			Target program/kegiatan RKPd tahun 2022 (tahun n-1)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target RKPd tahun 2021 (tahun n-2)	Realisasi RKPd tahun 2021 (tahun n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2022 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2022 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
	Milik Daerah pada SKPD										
1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai di Lingkungan Dinas Kesehatan dengan Nilai Kinerja Minimal Baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1.02.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	152 stel	0	-	-		152 stel	152 stel	100%	
1.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas dan Perlengkapannya	152 stel	0	-	-		152 stel	152 stel	100%	
1.02.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 dokumen	1 dokumen				1 dokumen	1 dokumen	100%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (input)	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2020 (tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu 2021			Target program/kegiatan RKPd tahun 2022 (tahun n-1)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target RKPd tahun 2021 (tahun n-2)	Realisasi RKPd tahun 2021 (tahun n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2022 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2022 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
1.02.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%	
1.02.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%	
1.02.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%	
1.02.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah peraturan perundangan yg disosialisasikan	10 Paket	10 Paket	10 Paket	10 Paket	100%	10 Paket	10 Paket	100%	
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Umum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (input)	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2020 (tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu 2021			Target program/kegiatan RKPD tahun 2022 (tahun n-1)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target RKPD tahun 2021 (tahun n-2)	Realisasi RKPD tahun 2021 (tahun n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2022 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2022 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
		Perangkat Daerah yang terlaksana									
1.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Item Pengadaan Komponen Instalasi dan Alat-alat Listrik	1 Paket	item	10	10	100%	1 Paket	1 Paket	100%	
1.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Item Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Paket	item	26	26	100%	1 Paket	1 Paket	100%	
1.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Item Pengadaan Peralatan Rumah Tangga	1 Paket	item	28	28	100%	1 Paket	1 Paket	100%	
1.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Item Pengadaan Barang Logistik kantor	1 Paket	item	47	47	100%	1 Paket	1 Paket	100%	
1.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Item Barang Cetak	7 Jenis	item	7	7	100%	7 Jenis	7 Jenis	100%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (input)	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2020 (tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu 2021			Target program/kegiatan RKPD tahun 2022 (tahun n-1)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target RKPD tahun 2021 (tahun n-2)	Realisasi RKPD tahun 2021 (tahun n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2022 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2022 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
1.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Item Bahan bacaan yang Disediakan	1 Paket	exemplar	500	500	100%	1 Paket	1 Paket	100%	
1.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Penyediaan Porsi Makan dan Snack	3 Jenis	porsi	3500	3500	100%	3 Jenis	3 Jenis	100%	
1.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Orang yg Melakukan Perjalanan Dinas	2 Jenis	orang hari	713	713	100%	2 Jenis	2 Jenis	100%	
1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1.02.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang diadakan	2 unit	1 unit	0	0	100%	1 unit	1 unit	100%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (input)	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2020 (tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu 2021			Target program/kegiatan RKPd tahun 2022 (tahun n-1)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target RKPd tahun 2021 (tahun n-2)	Realisasi RKPd tahun 2021 (tahun n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2022 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2022 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
1.02.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan yang diadakan	4 unit	4 unit	0	0	100%	4 unit	4 unit	100%	
1.02.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Luas gedung kantor yang dibangun	1 Gedung	1 Gedung	1 Gedung	1 Gedung	100%	1 Gedung	1 Gedung	100%	
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Tersedia	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai dan Perangko	1800 buah	1772 buah	1772 buah	1772 buah	100%	1772 buah	1772 buah	100%	
1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Nomor Rekening Penyediaan Tenaga Perbaikan Listrik, Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih,	5	5	5	5	100%	5	5	100%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (input)	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2020 (tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu 2021			Target program/kegiatan RKPd tahun 2022 (tahun n-1)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target RKPd tahun 2021 (tahun n-2)	Realisasi RKPd tahun 2021 (tahun n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2022 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2022 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
		Telekomunikasi dan Internet									
1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Kontrak Kerja yang Menerima Gaji	46 orang	46 orang	46 orang	46 orang	100%	46 orang	46 orang	100%	
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dilakukan Pemeliharaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan yang dilakukan pemeliharaan	49 mobil dan 46 motor	49 mobil dan 46 motor	49 mobil dan 46 motor	49 mobil dan 46 motor	100%	49 mobil dan 46 motor	49 mobil dan 46 motor	100%	
1.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Jenis peralatan dan Mesin Lainnya yang dilakukan Pemeliharaan	5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	100%	5 Jenis	5 Jenis	100%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (input)	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2020 (tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu 2021			Target program/kegiatan RKPd tahun 2022 (tahun n-1)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target RKPd tahun 2021 (tahun n-2)	Realisasi RKPd tahun 2021 (tahun n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2022 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2022 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
1.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	12 Gedung	12 Gedung	12 Gedung	12 Gedung	100%	12 Gedung	12 Gedung	100%	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Tingkat Kemandirian BLUD UPTD pada Dinas Kesehatan	85%	85%	85%	85%	100%	85%	85%	100%	
1.02.02.2.10.01	1.02.02.2.10.01 Peningkatan Pelayanan BLUD RSUD	Persentase Tingkat Kemandirian Keuangan BLUD RSUD	85%	85%	85%	85%	100%	85%	85%	100%	
1.02.02.2.10.01	1.02.53.2.10.01 Peningkatan Pelayanan BLUD RSKP	Persentase Tingkat Kemandirian Keuangan BLUD RSKP	85%	85%	85%	85%	100%	85%	85%	100%	
1.02.02.2.10.01	Peningkatan BLUD Puskesmas Pada Puskesmas Adiarsa	Persentase Tingkat Kemandirian Keuangan BLUD Puskesmas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (input)	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2020 (tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu 2021			Target program/kegiatan RKPD tahun 2022 (tahun n-1)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target RKPD tahun 2021 (tahun n-2)	Realisasi RKPD tahun 2021 (tahun n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2022 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2022 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
1.02.02.2.10.01	Peningkatan BLUD Puskesmas Pada Puskesmas Anggadita	Persentase Tingkat Kemandirian Keuangan BLUD Puskesmas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1.02.02.2.10.01	Peningkatan BLUD Puskesmas Pada Puskesmas Balongsari	Persentase Tingkat Kemandirian Keuangan BLUD Puskesmas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1.02.02.2.10.01	Peningkatan BLUD Puskesmas Pada Puskesmas Batujaya	Persentase Tingkat Kemandirian Keuangan BLUD Puskesmas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1.02.02.2.10.01	Peningkatan BLUD Puskesmas Pada Puskesmas Bayurlor	Persentase Tingkat Kemandirian Keuangan BLUD Puskesmas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1.02.02.2.10.01	Peningkatan BLUD Puskesmas Pada Puskesmas Ciampel	Persentase Tingkat Kemandirian Keuangan BLUD Puskesmas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (input)	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2020 (tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu 2021			Target program/kegiatan RKPD tahun 2022 (tahun n-1)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan 2022		Peran gkat Daerah Penanggung Jawab
					Target RKPD tahun 2021 (tahun n-2)	Realisasi RKPD tahun 2021 (tahun n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2022 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2022 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
1.02.02.2.10.01	Peningkatan BLUD Puskesmas Pada Puskesmas Cibuyaya	Persentase Tingkat Kemandirian Keuangan BLUD Puskesmas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1.02.02.2.10.01	Peningkatan BLUD Puskesmas Pada Puskesmas Cicinde	Persentase Tingkat Kemandirian Keuangan BLUD Puskesmas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1.02.02.2.10.01	Peningkatan BLUD Puskesmas Pada Puskesmas Cikampek	Persentase Tingkat Kemandirian Keuangan BLUD Puskesmas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1.02.02.2.10.01	Peningkatan BLUD Puskesmas Pada Puskesmas Cikampek Utara	Persentase Tingkat Kemandirian Keuangan BLUD Puskesmas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1.02.02.2.10.01	Peningkatan BLUD Puskesmas Pada Puskesmas Cilamaya	Persentase Tingkat Kemandirian Keuangan BLUD Puskesmas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (input)	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2020 (tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu 2021			Target program/kegiatan RKPDP tahun 2022 (tahun n-1)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target RKPDP tahun 2021 (tahun n-2)	Realisasi RKPDP tahun 2021 (tahun n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2022 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2022 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
1.02.02.2.10.01	Peningkatan BLUD Puskesmas Pada Puskesmas Curug	Persentase Tingkat Kemandirian Keuangan BLUD Puskesmas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1.02.02.2.10.01	Peningkatan BLUD Puskesmas Pada Puskesmas Gempol	Persentase Tingkat Kemandirian Keuangan BLUD Puskesmas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1.02.02.2.10.01	Peningkatan BLUD Puskesmas Pada Puskesmas Jatisari	Persentase Tingkat Kemandirian Keuangan BLUD Puskesmas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1.02.02.2.10.01	Peningkatan BLUD Puskesmas Pada Puskesmas Jayakarta	Persentase Tingkat Kemandirian Keuangan BLUD Puskesmas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1.02.02.2.10.01	Peningkatan BLUD Puskesmas Pada Puskesmas Jomin	Persentase Tingkat Kemandirian Keuangan BLUD Puskesmas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1.02.02.2.10.01	Peningkatan BLUD Puskesmas Pada	Persentase Tingkat Kemandirian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (input)	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2020 (tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu 2021			Target program/kegiatan RKPd tahun 2022 (tahun n-1)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target RKPd tahun 2021 (tahun n-2)	Realisasi RKPd tahun 2021 (tahun n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2022 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2022 (%)	
1	2		3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
		Puskesmas Kalangsari	Keuangan BLUD Puskesmas									
1.02.02.2.10.01		Peningkatan BLUD Puskesmas Pada Puskesmas Karawang	Persentase Tingkat Kemandirian Keuangan BLUD Puskesmas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1.02.02.2.10.01		Peningkatan BLUD Puskesmas Pada Puskesmas Karawang Kulon	Persentase Tingkat Kemandirian Keuangan BLUD Puskesmas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1.02.02.2.10.01		Peningkatan BLUD Puskesmas Pada Puskesmas Kertamukti	Persentase Tingkat Kemandirian Keuangan BLUD Puskesmas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1.02.02.2.10.01		Peningkatan BLUD Puskesmas Pada Puskesmas Klari	Persentase Tingkat Kemandirian Keuangan BLUD Puskesmas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1.02.02.2.10.01		Peningkatan BLUD Puskesmas Pada Puskesmas Kotabaru	Persentase Tingkat Kemandirian Keuangan BLUD Puskesmas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (input)	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2020 (tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu 2021			Target program/kegiatan RKPd tahun 2022 (tahun n-1)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan 2022		Peran gkat Daerah Penanggung Jawab
					Target RKPd tahun 2021 (tahun n-2)	Realisasi RKPd tahun 2021 (tahun n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2022 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2022 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
1.02.02.2.10.01	Peningkatan BLUD Puskesmas Pada Puskesmas Kutamukti	Persentase Tingkat Kemandirian Keuangan BLUD Puskesmas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1.02.02.2.10.01	Peningkatan BLUD Puskesmas Pada Puskesmas Kutawaluya	Persentase Tingkat Kemandirian Keuangan BLUD Puskesmas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1.02.02.2.10.01	Peningkatan BLUD Puskesmasl Pada Puskesmas Lemah Duhur	Persentase Tingkat Kemandirian Keuangan BLUD Puskesmas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1.02.02.2.10.01	Peningkatan BLUD Puskesmas Pada Puskesmas Lemahabang	Persentase Tingkat Kemandirian Keuangan BLUD Puskesmas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1.02.02.2.10.01	Peningkatan BLUD Puskesmas Pada Puskesmas Loji	Persentase Tingkat Kemandirian Keuangan BLUD Puskesmas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (input)	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2020 (tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu 2021			Target program/kegiatan RKPDP tahun 2022 (tahun n-1)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target RKPDP tahun 2021 (tahun n-2)	Realisasi RKPDP tahun 2021 (tahun n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2022 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2022 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
1.02.02.2.10.01	Peningkatan BLUD Puskesmas Pada Puskesmas Majalaya	Persentase Tingkat Kemandirian Keuangan BLUD Puskesmas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1.02.02.2.10.01	Peningkatan BLUD Puskesmas Pada Puskesmas Medang Asem	Persentase Tingkat Kemandirian Keuangan BLUD Puskesmas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1.02.02.2.10.01	Peningkatan BLUD Puskesmas Pada Puskesmas Nagasari	Persentase Tingkat Kemandirian Keuangan BLUD Puskesmas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1.02.02.2.10.01	Peningkatan BLUD Puskesmas Pada Puskesmas Pacing	Persentase Tingkat Kemandirian Keuangan BLUD Puskesmas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1.02.02.2.10.01	Peningkatan BLUD Puskesmas Pada Puskesmas Pakisjaya	Persentase Tingkat Kemandirian Keuangan BLUD Puskesmas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1.02.02.2.10.01	Peningkatan BLUD Puskesmas Pada	Persentase Tingkat Kemandirian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (input)	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2020 (tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu 2021			Target program/kegiatan RKPd tahun 2022 (tahun n-1)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target RKPd tahun 2021 (tahun n-2)	Realisasi RKPd tahun 2021 (tahun n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2022 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2022 (%)	
1	2		3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
		Puskesmas Pangkalan	Keuangan BLUD Puskesmas									
1.02.02.2.10.01		Peningkatan BLUD Puskesmas Pada Puskesmas Pasirukem	Persentase Tingkat Kemandirian Keuangan BLUD Puskesmas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1.02.02.2.10.01		Peningkatan BLUD Puskesmas Pada Puskesmas Pedes	Persentase Tingkat Kemandirian Keuangan BLUD Puskesmas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1.02.02.2.10.01		Peningkatan BLUD Puskesmas Pada Puskesmas Plawad	Persentase Tingkat Kemandirian Keuangan BLUD Puskesmas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1.02.02.2.10.01		Peningkatan BLUD Puskesmas Pada Puskesmas Purwasari	Persentase Tingkat Kemandirian Keuangan BLUD Puskesmas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1.02.02.2.10.01		Peningkatan BLUD Puskesmas Pada Puskesmas Rawamerta	Persentase Tingkat Kemandirian Keuangan BLUD Puskesmas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (input)	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2020 (tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu 2021			Target program/kegiatan RKPd tahun 2022 (tahun n-1)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target RKPd tahun 2021 (tahun n-2)	Realisasi RKPd tahun 2021 (tahun n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2022 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2022 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
1.02.02.2.10.01	Peningkatan BLUD Puskesmas Pada Puskesmas Rengasdengklok	Persentase Tingkat Kemandirian Keuangan BLUD Puskesmas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1.02.02.2.10.01	Peningkatan BLUD Puskesmas Pada Puskesmas Sukatani	Persentase Tingkat Kemandirian Keuangan BLUD Puskesmas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1.02.02.2.10.01	Peningkatan BLUD Puskesmas Pada Puskesmas Sungaibuntu	Persentase Tingkat Kemandirian Keuangan BLUD Puskesmas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1.02.02.2.10.01	Peningkatan BLUD Puskesmas Pada Puskesmas Telagasari	Persentase Tingkat Kemandirian Keuangan BLUD Puskesmas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1.02.02.2.10.01	Peningkatan BLUD Puskesmas Pada Puskesmas Tanjungpura	Persentase Tingkat Kemandirian Keuangan BLUD Puskesmas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1.02.02.2.10.01	Peningkatan BLUD Puskesmas Pada	Persentase Tingkat Kemandirian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (input)	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2020 (tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu 2021			Target program/kegiatan RKPd tahun 2022 (tahun n-1)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target RKPd tahun 2021 (tahun n-2)	Realisasi RKPd tahun 2021 (tahun n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2022 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2022 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
		Puskesmas Telukjambe	Keuangan BLUD Puskesmas								
1.02.02.2.10.01		Peningkatan BLUD Puskesmas Pada Puskesmas Tempuran	Persentase Tingkat Kemandirian Keuangan BLUD Puskesmas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1.02.02.2.10.01		Peningkatan BLUD Puskesmas Pada Puskesmas Tirtajaya	Persentase Tingkat Kemandirian Keuangan BLUD Puskesmas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1.02.02.2.10.01		Peningkatan BLUD Puskesmas Pada Puskesmas Tirtamulya	Persentase Tingkat Kemandirian Keuangan BLUD Puskesmas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1.02.02.2.10.01		Peningkatan BLUD Puskesmas Pada Puskesmas Tunggakjati	Persentase Tingkat Kemandirian Keuangan BLUD Puskesmas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1.02.02.2.10.01		Peningkatan BLUD Puskesmas Pada Puskesmas Wadas	Persentase Tingkat Kemandirian Keuangan BLUD Puskesmas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (input)	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2020 (tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu 2021			Target program/kegiatan RKPD tahun 2022 (tahun n-1)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target RKPD tahun 2021 (tahun n-2)	Realisasi RKPD tahun 2021 (tahun n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2022 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2022 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
1.02.02.2.10.01	Peningkatan BLUD Puskesmas Pada Puskesmas Wanakerta	Persentase Tingkat Kemandirian Keuangan BLUD Puskesmas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

2.1.2 Capaian Renstra SKPD Tahun 2021

Sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) 2016 - 2021 yang telah di susun target capaian kinerja yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan tahun 2021 dituangkan dalam sasaran strategisnya. Dalam dokumen renstra terdapat tujuan dan sasaran yang masing – masing memiliki indikator kinerja utama, yang mendukung visi dan misi Bupati dalam bidang pembangunan kesehatan.

Capaian hasil pelaksanaan Renstra Dinas Kesehatan hingga tahun 2021 adalah seperti yang ditunjukkan pada Tabel 2.2 di bawah ini.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Tahun 2021

NO	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021 (tahun n-2)	Tahun 2022 (tahun n- 1)	Tahun 2023 (tahun n)	Tahun 2024 (tahun n+1)	Tahun 2021 (tahun n-2)	Tahun 2022 (tahun n-1)	Tahun 2023 (tahun n)	Tahun 2024 (tahun n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	v	v	100	100	100	100	1: 1.000	1: 1.000	1: 1.000	1: 1.000	
2	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	v	v	100	100	100	100	95,94	100	100	100	

NO	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021 (tahun n-2)	Tahun 2022 (tahun n- 1)	Tahun 2023 (tahun n)	Tahun 2024 (tahun n+1)	Tahun 2021 (tahun n-2)	Tahun 2022 (tahun n-1)	Tahun 2023 (tahun n)	Tahun 2024 (tahun n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	Presentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	v	v	100	100	100	100	105,4	100	100	100	
4	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar	v	v	100	100	100	100	77,9	100	100	100	
5	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	v	v	100	100	100	100	98,43	100	100	100	

NO	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021 (tahun n-2)	Tahun 2022 (tahun n-1)	Tahun 2023 (tahun n)	Tahun 2024 (tahun n+1)	Tahun 2021 (tahun n-2)	Tahun 2022 (tahun n-1)	Tahun 2023 (tahun n)	Tahun 2024 (tahun n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	v	v	100	100	100	100	12,26	100	100	100	
7	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standard	v	v	100	100	100	100	53,44	100	100	100	
8	Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan	v	v	100	100	100	100	24,94	100	100	100	

NO	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021 (tahun n-2)	Tahun 2022 (tahun n- 1)	Tahun 2023 (tahun n)	Tahun 2024 (tahun n+1)	Tahun 2021 (tahun n-2)	Tahun 2022 (tahun n-1)	Tahun 2023 (tahun n)	Tahun 2024 (tahun n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	kesehatan sesuai standar											
9	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	v	v	100	100	100	100	37,86	100	100	100	
10	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	v	v	100	100	100	100	69,54	100	100	100	

NO	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021 (tahun n-2)	Tahun 2022 (tahun n- 1)	Tahun 2023 (tahun n)	Tahun 2024 (tahun n+1)	Tahun 2021 (tahun n-2)	Tahun 2022 (tahun n-1)	Tahun 2023 (tahun n)	Tahun 2024 (tahun n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	v	v	100	100	100	100	37,86	100	100	100	
12	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	v	v	100	100	100	100	69,54	100	100	100	
13	Rasio daya tampung RS terhadap jumlah Penduduk		v	1: 1.000	1: 1.000	1: 1.000	1: 1.000	1: 1.000	1: 1.000	1: 1.000	1: 1.000	

NO	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021 (tahun n-2)	Tahun 2022 (tahun n- 1)	Tahun 2023 (tahun n)	Tahun 2024 (tahun n+1)	Tahun 2021 (tahun n-2)	Tahun 2022 (tahun n-1)	Tahun 2023 (tahun n)	Tahun 2024 (tahun n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi		v	87,5	100	100	100	87,5	100	100	100	

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2021

2.2.1 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Pemerintah Kabupaten Karawang menyusun rencana pencapaian SPM yang memuat target tahunan pencapaian SPM dengan mengacu pada batas waktu pencapaian SPM sesuai dengan Peraturan/Keputusan Menteri. Rencana pencapaian SPM dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD).

Indikator kinerja utama atau IKU adalah ukuran atau indikator kinerja suatu instansi, utamanya dalam mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Setiap lembaga atau instansi pemerintah wajib merumuskan indikator kinerja utama, dan menjadikan hal itu sebagai prioritas utama. Adapun beberapa tujuan dibalik pembuatan indikator tersebut yaitu untuk mendapatkan ukuran sejauh mana keberhasilan dan pencapaian yang telah diraih organisasi tersebut selama beberapa waktu terakhir. Ukuran tersebut nantinya akan dijadikan patokan untuk meningkatkan kualitas kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja instansi tersebut. Selain itu IKU juga bertujuan untuk mendapatkan informasi penting soal kinerja pegawai selama ini. Nantinya, informasi tersebut akan dijadikan salah satu pedoman dalam menyusun manajemen kerja yang baik.

Pencapaian kinerja sasaran berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang Tahun 2021 sebagai bahan evaluasi kinerja dan membandingkan antara target dan realisasi serta capaian kinerja. Hasil pengukuran atas 5 (lima) indikator kinerja utama Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang tahun 2021 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 2.3**Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kab. Karawang**

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	Target Akhir Renstra
1	Persentase Angka Kesakitan	14,7	45	-206,12	Kurang	14,1
2	Rasio Kematian Ibu	130,95	294,86	-225,17	Kurang	71,43
3	Rasio Kematian Bayi	3,10	4,03	-130,32	Kurang	2,50
4	Persentase Angka Stunting	12,4	2,66	21,45	Sangat Baik	11,9
5	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan UP	80%	81,26%	101,58%	Sangat Baik	100%

2.2.2 Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci yang selanjutnya disingkat IKK adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah dilakukan dengan menggunakan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang disusun berdasarkan pembagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi, Kabupaten dan Kota yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pencapaian kinerja sasaran berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang Tahun 2021 sebagai bahan evaluasi kinerja dan membandingkan antara target dan realisasi serta capaian kinerja. Hasil pengukuran atas 16 (enam belas) indikator kinerja Kunci Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang tahun 2021 menunjukkan hasil sebagai berikut:

TUJUAN : MEWUJUDKAN PENINGKATAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT

SASARAN STRATEGIS : MENINGKATNYA DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT

Indikator Kinerja 1. Persentase Masyarakat Karawang yang Mempunyai Asuransi Kesehatan

Program Jaminan Kesehatan Nasional, disingkat Program JKN, adalah suatu program pemerintah dan masyarakat dengan tujuan

memberikan kepastian jaminan kesehatan yang menyeluruh bagi setiap rakyat Indonesia agar penduduk Indonesia dapat hidup sehat, produktif, dan sejahtera. UU No. 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN) tidak menetapkan definisi atau pengertian JKN dalam salah satu ayat atau pasalnya. Dengan merangkai beberapa pasal dan ayat yang mengatur tentang program jaminan sosial, manfaat, tujuan dan tatalaksananya, dapat dirumuskan pengertian Program Jaminan Kesehatan Nasional sebagai berikut: “Program jaminan social yang menjamin biaya pemeliharaan kesehatan serta pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan yang diselenggarakan nasional secara bergotong-royong wajib oleh seluruh penduduk Indonesia dengan membayar iuran berkala atau iurannya dibayari oleh Pemerintah kepada badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan nirlaba - BPJS Kesehatan.” Dua Peraturan Pelaksanaan UU SJSN, yaitu Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2012 Tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dan Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan menetapkan bahwa yang dimaksud dengan: “Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar Peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah”.

Dengan adanya amanat undang – undang tersebut maka sebagai indikator kinerja Dinas Kesehatan yaitu Persentase Masyarakat Karawang yang Mempunyai Asuransi Kesehatan. Adapun capaian indikator Persentase Masyarakat Karawang yang Mempunyai Asuransi Kesehatan dapat dilihat pada tabel 3.2.

Tabel 2.4
Persentase Masyarakat Karawang yang Mempunyai Asuransi Kesehatan

Indikator Kinerja sasaran	2020			2021			Kategori	Target Akhir Renstra
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian		
Persentase Masyarakat Karawang yang Mempunyai Asuransi Kesehatan	90%	81,97%	91,07%	95%	88,54%	93,20%	Sangat Baik	95%

Persentase masyarakat Karawang yang mempunyai asuransi kesehatan pada tahun 2021 yaitu 88,54% dari target yang 95%, yang berarti bahwa jumlah masyarakat yang mempunyai asuransi kesehatan pada tahun 2021 adalah 2.088.667 penduduk dari total 2..359.078 penduduk. Capaian ini mengalami peningkatan dari tahun 2020 walaupun tidak signifikan, hal ini dikarenakan masih ada beberapa kepesertaan PBI APBN yang dinonaktifkan oleh pusat, peserta PBI tidak masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dan beberapa data NIK peserta tidak online dengan Kemendagri. Ini menunjukkan bahwa Kabupaten Karawang belum mencapai target *Universal Health Coverage* (UHC) sesuai dengan kebijakan Pemerintah Pusat melalui Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) yang menyatakan bahwa daerah mencapai UHC minimal sebesar 95% penduduknya mempunyai jaminan kesehatan. *Universal Health Coverage* adalah program yang memastikan masyarakat memiliki akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan tanpa harus menghadapi kesulitan finansial. Hal ini ditunjang dengan pelayanan fasilitas kesehatan yang berkualitas.

Tabel 2.5
Capaian Peserta Kabupaten Karawang Tahun 2020

No	Segmen	Total Peserta
1	PBI APBN	942.972
2	PNS	41.216
3	TNI / POLRI	9.788
4	PEJABAT NEGARA	161
5	PPNPN	4.652
6	BUMN	9.828
7	SWASTA / LAINNYA	594.911

No	Segmen	Total Peserta
8	PERANGKAT DESA	2.634
9	SEKRETARIS DESA	276
10	BUKAN PEKERJA	21.514
11	PBPU	367.213
12	PBI APBD	93.502

Komitmen pemerintah dalam pelaksanaan program asuransi sosial kesehatan untuk keluarga miskin yang dikemas dalam program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) yang dilaksanakan sejak tahun 2005 mulai memasuki babak baru. Sejak 1 Januari 2014 Pemerintah Indonesia meluncurkan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia dari guncangan kesehatan. JKN secara bertahap direncanakan sebagai jaminan kesehatan semesta (universal health coverage) bagi seluruh penduduk Indonesia.

Program Jaminan Kesehatan Karawang Sehat diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Karawang untuk memberikan jaminan pelayanan kesehatan berikut pembiayaannya kepada penduduk Kabupaten Karawang yang tergolong miskin atau tidak mampu yang belum menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 34 Ayat (1), bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara, maka dalam konteks pelayanan kesehatan dan pembiayaannya, segmen masyarakat miskin atau tidak mampu, diakomodir oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah, sebagai representasi kehadiran negara.

Indikator Kinerja 2. Persentase Puskesmas Terakreditasi

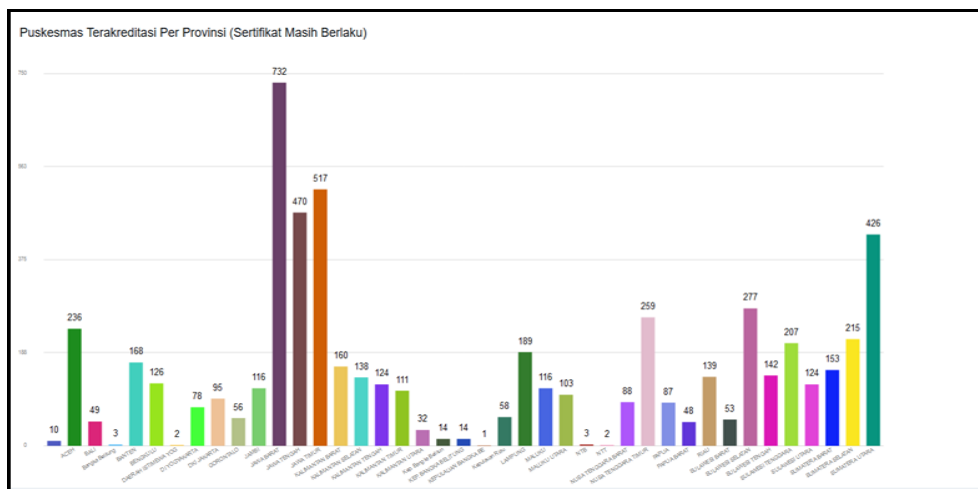
Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No 46 tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktek Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi, bahwa pembangunan kesehatan merupakan bagian integral dan terpenting dari pembangunan nasional. Tujuan diselenggarakannya pembangunan kesehatan adalah meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan nasional diselenggarakan berbagai upaya kesehatan secara menyeluruh, berjenjang dan terpadu. Puskesmas

adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.

Puskesmas sebagai salah satu FKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama) yang difungsikan sebagai gate-keeper dalam pelayanan kesehatan. Puskesmas dituntut untuk memberikan penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat dan perorangan yang paripurna, adil, merata, berkualitas, dan memuaskan masyarakat. Untuk dapat menghasilkan kinerja yang optimal dan berkualitas, serta dapat memuaskan masyarakat, maka seluruh sumber daya yang ada sebagai input dalam pelayanan harus dikelola secara baik menggunakan prinsip-prinsip manajemen, yang dimulai sejak saat perencanaan, penggerakan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan penilaian untuk menghasilkan output yang efektif dan efisien pada semua kegiatan di puskesmas.

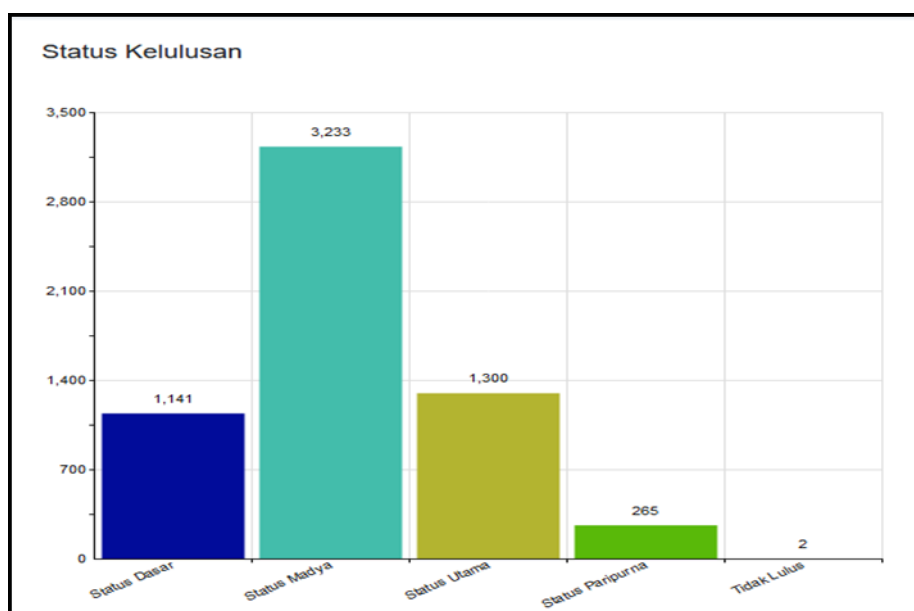
Mutu pelayanan kesehatan yang diberikan oleh puskesmas menunjuk pada tingkat kesempurnaan pelayanan kesehatan dalam memenuhi kebutuhan dan tuntutan setiap pasien, makin sempurna kebutuhan dan tuntutan setiap pasien, makin baik pula mutu pelayanan kesehatan. Mutu pelayanan kesehatan bukan sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan pasien/konsumen dengan biaya berapa saja, harus selalu dihubungkan dengan penggunaan sumber daya yang paling efisien. Kesimpulannya, mutu pelayanan kesehatan itu harus dapat memenuhi kebutuhan pasien/konsumen, seperti yang ditentukan profesi layanan kesehatan, dan harus pula memenuhi harapan pasien, tetapi dengan biaya yang seefisien mungkin (Pohan, 2006).

Grafik 2.1
Capaian Akreditasi Puskesmas Di Indonesia Tahun 2021



Sumber : Laporan Komisi AKreditasi Puskesmas, Kemenkes RI Tahun 2021

Grafik 2.2
Status Kelulusan Akreditasi Puskesmas Di Indonesia Tahun 2021



Sumber : Laporan Komisi AKreditasi Puskesmas, Kemenkes RI Tahun 2021

Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan RI, jumlah puskesmas di Indonesia adalah sebanyak 9759 puskesmas, dimana terdiri dari 3401 puskesmas rawat inap dan 6358 puskesmas non rawat inap yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia. Sampai dengan tahun 2020 terdapat 5941 puskesmas yang telah terakreditasi. Dimana terdapat 1141 puskesmas terakreditasi dasar, 3233

terakreditasi madya, 1300 puskesmas terakreditasi utama, 265 puskesmas terakreditasi paripurna dan 2 puskesmas tidak terakreditasi.

Akreditasi puskesmas adalah pengakuan terhadap Puskesmas yang diberikan oleh lembaga independen penyelenggara akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan setelah dinilai bahwa Puskesmas telah memenuhi standar pelayanan Puskesmas yang telah ditetapkan oleh Menteri Kesehatan untuk meningkatkan mutu pelayanan puskesmas secara berkesinambungan.

Tujuan diberlakukannya akreditasi puskesmas adalah untuk membina puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan primer dalam upaya untuk berkelanjutan memperbaiki sistem pelayanan dan kinerja yang berfokus pada kebutuhan masyarakat, keselamatan, dan manajemen risiko. Melalui akreditasi, diharapkan manajemen Puskesmas dapat menerapkan Prosedur Standar dengan baik sehingga pasien merasa puas dengan pelayanan yang diberikan. Kualitas yang diberikan oleh Puskesmas, akan menimbulkan persepsi pasien terhadap pelayanan yang diberikan kepadanya.

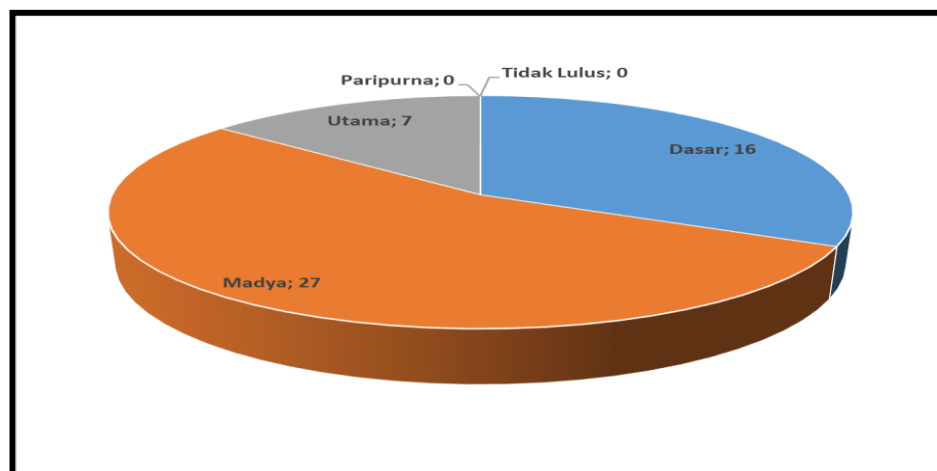
Di kabupaten Karawang, sampai dengan tahun 2020 dari 50 puskesmas yang ada seluruhnya telah melaksanakan survey akreditasi perdana dengan kategori hasil yang beragam.

Tabel 2.6
Capaian Indikator Kinerja Presentase Puskesmas Terakreditasi

Indikator Kinerja sasaran	2019			2020			Kategori	Target Akhir Renstra
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian		
Persentase Puskesmas yang terakreditasi	90%	100%	111,11%	100%	100%	100%	Sangat Baik	100%

Berdasarkan data diatas terdapat 50 puskesmas yang telah melaksanakan survey akreditasi perdana. Ke 50 puskesmas di survey mulai tahun 2016 dan selesai pada tahun 2019, ini berarti 50 puskesmas di Kabupaten Karawang telah terakreditasi.

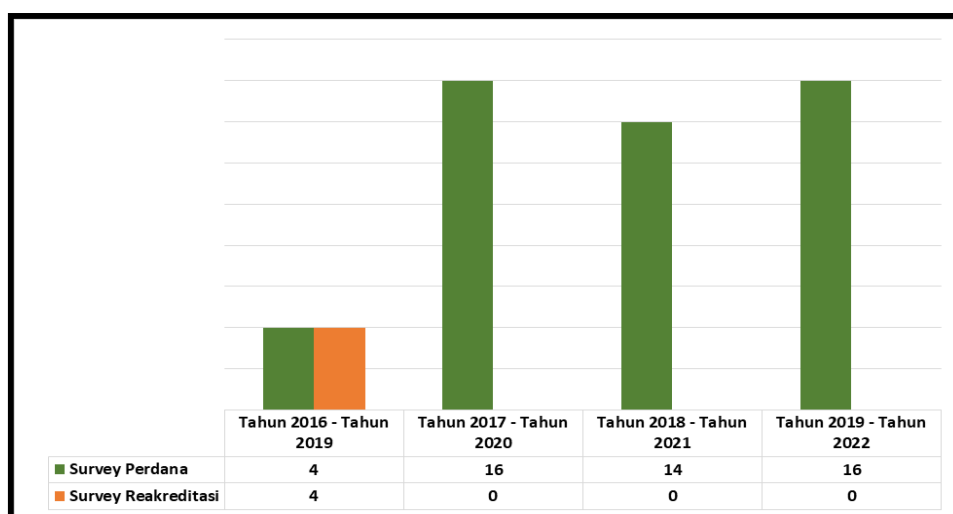
Grafik 2.3
Status Kelulusan Survey Perdana Akreditasi Puskesmas



Sumber : Laporan Survey Akreditasi Puskesmas Tahun 2021

Dari data diatas dapat kita lihat, predikat hasil akreditasi dibagi menjadi paripurna, utama, madya, dasar dan tidak terakreditasi. Banyak hal yang dinilai di akreditasi Puskesmas meliputi penyelenggaraan administrasi manajemen, penyelenggaraan upaya Puskesmas, dan pelayanan klinis dasar. Hal lain yang dinilai dalam akreditasi meliputi penilaian tenaga kesehatan, fasilitas dan program yang ada di Puskesmas. Berdasarkan data tersebut dari 50 puskesmas yang telah terakreditasi terdapat 16 puskesmas terakreditasi dasar, 27 puskesmas terakreditasi madya dan 7 puskesmas terakreditasi utama.

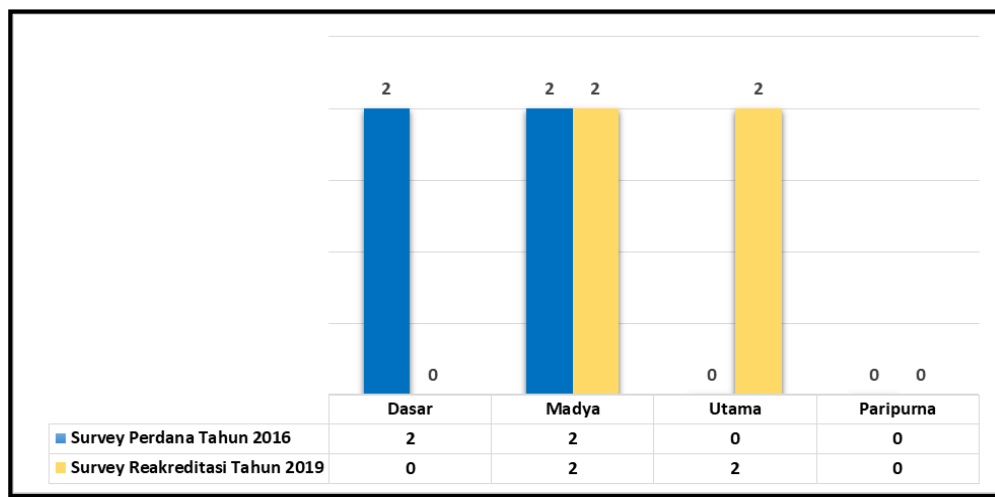
Grafik 2.4
Jumlah Puskesmas Yang Telah Melaksanakan Survey Reakreditasi Puskesmas Di Kabupaten Karawang s.d. Tahun 2021



Sumber : Laporan Survey Akreditasi Puskesmas Tahun 2021

Berdasarkan data diatas sampai dengan tahun 2019 terdapat 50 puskesmas telah selesai diakreditasi. Target tahun survey dibagi dalam empat tahun yaitu tahun 2016, tahun 2017, tahun 2018 dan tahun 2019. Pada tahun 2019 target survey reakreditasi sebanyak 4 puskesmas, dan telah sesuai dilaksanakan sebanyak 4 puskesmas.

Grafik 2.5
Status Kelulusan Survey Reakreditasi Puskesmas



Sumber : Laporan Survey Akreditasi Puskesmas Tahun 2021

Dari data diatas dapat kita lihat, predikat hasil akreditasi pada tahun 2019 telah mengalami peningkatan status akreditasi dimana pada tahun 2019 sudah tidak ada lagi status kelulusan dasar, bahkan status kelulusan meningkat menjadi utama pada tahun 2019. Status kelulusan utama terdapat pada Puskesmas Cilamaya dan Puskesmas Cikampek.

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan akreditasi puskesmas pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- Kabupaten Karawang pada tahun 2021 masih masuk dalam masa pandemic Covid-19 sehingga seluruh bentuk pertemuan yang menimbulkan kerumunan masih dibatasi
- Surat Edaran Nomor HK.02.01/MENKES/455/2020 Tentang Perijinan dan akreditasi Faskes, dan Penetapan RS Pendidikan Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) menyatakan sertifikat akreditasi masih tetap berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak status Bencana Nasional atau

Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19 dinyatakan dicabut oleh Pemerintah. Sehingga survei akreditasi tahun 2021 tidak dilaksanakan.

Indikator Kinerja 3. Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar

Pelayanan Kesehatan Masa Hamil yang kemudian disebut pelayanan antenatal (ANC) terpadu adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan sejak terjadinya masa konsepsi hingga sebelum mulainya proses persalinan yang komprehensif dan berkualitas. Pelayanan ini bertujuan untuk memenuhi hak setiap ibu hamil untuk memperoleh pelayanan antenatal yang komprehensif dan berkualitas sehingga ibu hamil dapat menjalani kehamilan dan persalinan dengan pengalaman yang bersifat positif serta melahirkan bayi yang sehat dan berkualitas. Pengalaman yang bersifat positif adalah pengalaman yang menyenangkan dan memberikan nilai tambah yang bermanfaat bagi ibu hamil dalam menjalankan perannya sebagai perempuan, istri dan ibu.

Pernyataan standar pelayanan minimal kesehatan ibu hamil adalah setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar. Pemerintah Daerah tingkat kabupaten/kota wajib memberikan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar kepada semua ibu hamil di wilayah kerja tersebut dalam kurun waktu satu tahun. Pelayanan antenatal yang sesuai standar meliputi standar kuantitas dan standar kualitas.

Pemenuhan standar kuantitas menurut PERMENKES No. 4 tahun 2019 adalah kunjungan 4 kali selama periode kehamilan (K4) dengan ketentuan :

- 1 kali pada trimester pertama
- 1 kali pada trimester kedua
- 2 kali pada trimester ketiga

Namun menurut PERMENKES No. 21 tahun 2021 tentang penyelenggaraan pelayanan kesehatan masa sebelum hamil, masa hamil, persalinan, dan masa sesudah melahirkan, pelayanan

kontrasepsi, dan pelayanan kesehatan seksual, indikator yang digunakan untuk menggambarkan akses ibu hamil terhadap pelayanan masa hamil adalah cakupan K1 (kunjungan pertama). Sedangkan indikator untuk menggambarkan kualitas layanan adalah cakupan K4-K6 (kunjungan ke-4 sampai ke-6) dan kunjungan selanjutnya apabila diperlukan.

1. Kunjungan pertama (K1)

K1 adalah kontak pertama ibu hamil dengan tenaga kesehatan yang mempunyai kompetensi, untuk mendapatkan pelayanan terpadu dan komprehensif sesuai standar. Kontak pertama harus dilakukan sedini mungkin pada trimester pertama, sebaiknya sebelum minggu ke-8.

2. Kunjungan ke-4 (K4)

K4 adalah kontak ibu hamil dengan tenaga kesehatan yang mempunyai kompetensi, untuk mendapatkan pelayanan antenatal terpadu dan komprehensif sesuai standar selama kehamilannya minimal 4 kali dengan distribusi waktu : 1 kali pada trimester ke-1 (0-12 minggu), 1 kali pada trimester ke-2 (>12 minggu-24 minggu) dan 2 kali pada trimester ke-3 (>24 minggu sampai kelahirannya).

3. Kunjungan ke-6 (K6)

K6 adalah kontak ibu hamil dengan tenaga kesehatan yang mempunyai kompetensi, untuk mendapatkan pelayanan antenatal terpadu dan komprehensif sesuai standar, selama kehamilannya minimal 6 kali dengan distribusi waktu : 2 kali pada trimester ke-1 (0-12 minggu), 1 kali pada trimester ke-2 (>12 minggu-24 minggu), dan 3 kali pada trimester ke-3 (>24 minggu sampai kelahirannya). Kunjungan antenatal bisa lebih dari 6 (enam) kali sesuai kebutuhan dan jika ada keluhan, penyakit atau gangguan kehamilan.Ibu hamil harus kontak dengan dokter minimal 2 kali, 1 kali di trimester 1 dan 1 kali di trimester 3.

Pelayanan ANC oleh dokter pada trimester 1 (satu) dengan usia kehamilan kurang dari 12 minggu atau dari kontak pertama, dokter

melakukan skrining kemungkinan adanya faktor risiko kehamilan atau penyakit penyerta pada ibu hamil termasuk didalamnya pemeriksaan ultrasonografi (USG). Pelayanan ANC oleh dokter pada trimester 3 (tiga) dilakukan perencanaan persalinan, termasuk pemeriksaan ultrasonografi (USG) dan rujukan terencana bila diperlukan.

Pemenuhan standar kualitas meliputi pelayanan ANC berkualitas dengan pelayanan 10T terdiri dari :

1. **Timbang** berat badan dan ukur tinggi badan
2. Ukur **tekanan darah**
3. Nilai **status gizi** (ukur lingkaran lengan atas/LILA)
4. Ukur **tinggi puncak rahim** (fundus uteri)
5. **Tentukan** presentasi janin dan denyut jantung janin (DJJ)
6. Skrining status imunisasi **tetanus** dan berikan imunisasi tetanus difteri (Td) bila diperlukan
7. Pemberian **tablet tambah darah** minimal 90 tablet selama masa kehamilan
8. **Tes laboratorium**: tes kehamilan, kadar hemoglobin darah, golongan darah, tes triple eliminasi (HIV, Sifilis dan Hepatitis B,) malaria pada daerah endemis. Tes lainnya dapat dilakukan sesuai indikasi seperti glukosa-protein urin, gula darah sewaktu, sputum Basil Tahan Asam (BTA), kusta, malaria daerah non endemis, pemeriksaan feses untuk kecacingan, pemeriksaan darah lengkap untuk deteksi dini talasemia dan pemeriksaan lainnya.
9. **Tata laksana**/penanganan kasus sesuai kewenangan.
10. **Temu wicara** (konseling) dan penilaian kesehatan jiwa. Informasi yang disampaikan saat konseling minimal meliputi hasil pemeriksaan, perawatan sesuai usia kehamilan dan usia ibu, gizi ibu hamil, kesiapan mental, mengenali tanda bahaya kehamilan, persalinan, dan nifas, persiapan persalinan, kontrasepsi pascapersalinan, perawatan bayi baru lahir, inisiasi menyusui dini, ASI eksklusif.

Berdasarkan target Kementerian Kesehatan bahwa semua ibu hamil harus mendapatkan pelayanan kesehatan selama kehamilan yaitu 100% . Pelayanan kesehatan ibu hamil (antenatal) adalah

pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan untuk ibu selama masa kehamilannya yang dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan antenatal. Dengan indikator ini dapat diketahui cakupan pelayanan antenatal secara lengkap (memenuhi standar pelayanan dan menepati waktu yang ditetapkan), yang menggambarkan tingkat perlindungan ibu hamil di suatu wilayah, disamping menggambarkan kemampuan manajemen ataupun kelangsungan program KIA.

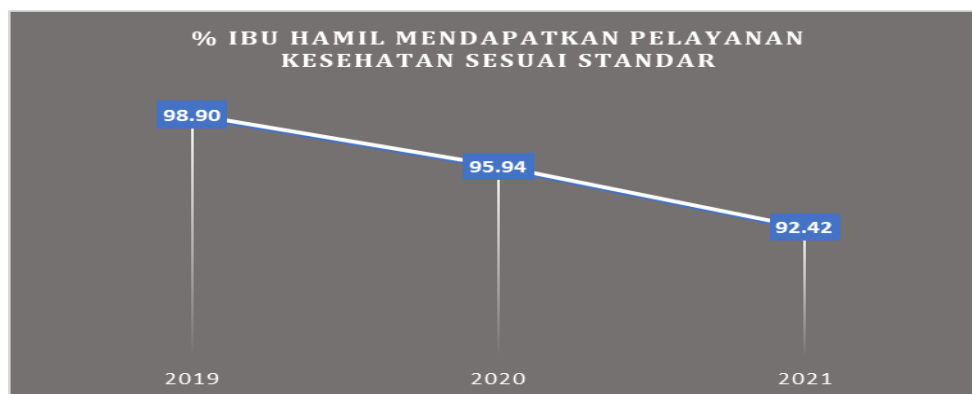
Hasil Capaian Indikator Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil, terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.7
Capaian Indikator Kinerja Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar

Indikator Kinerja sasaran	2020			2021			Kategori	Target Akhir Renstra
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian		
Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	100%	95,94%	95,94%	100%	92,42%	92,42%	Sangat Baik	100%

Berdasarkan data di atas terlihat bahwa Hasil capaian cakupan pelayanan Kesehatan ibu hamil (K4) di Kabupaten Karawang periode Januari – Desember 2021 mengalami sedikit penurunan apabila dibandingkan capaian tahun 2020. Target yang telah dicapai tahun 2021 adalah 92,42% (dari sasaran proyeksi 41.423 ibu hamil baru 38.284 ibu hamil yang mendapatkan pelayanan Kesehatan K4).

Grafik 2.6
Capaian Indikator Kinerja Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar



Sumber : Bidang Kesehatan Masyarakat, Dinkes 2021

Pada grafik diatas dapat dilihat bahwa terdapat trend penurunan capaian pada pelayanan Kesehatan ibu hamil (K4). Seperti diketahui bahwa tahun 2020 dan tahun 2021 ditetapkan adanya pandemi Covid-19 dan terjadi lonjakan kasus yang signifikan pada bulan Juni-Agustus 2021. Hal ini secara tidak langsung sangat mempengaruhi pelayanan program baik dari kuantitas maupun kualitas. Adanya pandemi Covid-19 secara tidak langsung membuat perubahan pola dan standar teknis dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat khususnya ibu hamil. Beberapa hal yang mempengaruhi pelaksanaan pelayanan ibu hamil pada masa pandemi Covid-19 diantaranya :

1. Penerapan PPKM dan adaptasi kebiasaan baru pada pelayanan KIA memberikan pengaruh yang sangat signifikan terhadap pelayanan Kesehatan ibu hamil
2. Menurunnya akses pelayanan kesehatan ibu hamil dengan adanya pembatasan layanan
3. Adanya perubahan kebijakan dalam pelayanan baik preventif, promotive baik pelayanan dalam gedung maupun luar gedung sehingga mempengaruhi akses dan kualitas pelayanan.
4. Keterbatasan SDM, dimana SDM yang melaksanakan pelayanan KIA hampir semuanya dialihtugaskan atau berbagi tugas dalam kesiapsiagaan dalam penanggulangan Covid-19 secara tidak langsung mempengaruhi dalam hal pelayanan Kesehatan ibu hamil
5. Menurunnya antusias komunitas pelayanan KIA khususnya ibu hamil dalam pemeriksaan kehamilan karena adanya factor kekhawatiran kasus lonjakan Covid-19
6. Pelayanan Kesehatan ibu hamil baru dilihat dari segi kuantitas 4 kali pemeriksaan, belum semua dilakukan pemeriksaan sesuai standar kualitas 10T
7. Belum optimalnya system surveilans Kesehatan ibu melalui PWS KIA
8. Kurangnya tingkat kepatuhan bidan dalam sistim pencatatan dan pelaporan melalui kartu ibu dan kohort ibu untuk memantau perkembangan pelayanan ibu hamil

9. Kurangnya pemanfaatan buku KIA sebagai sarana edukasi bagi ibu hamil
10. Keterbatasan koordinasi antara Kabupaten dengan SDM pemberi layanan KIA puskesmas karena terfokus pada tracing, tracking dan traetmen penanganan Covid-19
11. Refocusing anggaran tahun 2021 sehingga menghambat rencana kegiatan program

Beberapa upaya telah dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan akses pelayanan ibu hamil diantaranya :

1. Meningkatkan kapasitas bidan desa dalam pengisian dan pemanfaatan buku KIA sebagai sarana edukasi ibu hamil dan surveilans Kesehatan ibu hamil
2. Meningkatkan kapasitas PMB (praktek mandiri bidan) dalam pengisian dan pemafaatan buku KIA sebagai sarana edukasi ibu hamil dan surveilans Kesehatan ibu hamil
3. Meningkatkan kapasitas dokter puskesmas dalam memberikan pelayanan ANC berkualitas pada ibu hamil pada pelayanan ANC K6
4. Meningkatkan kapasitas bidan dalam memberikan pelayanan ANC terpadu
5. Koordinasi rutin dengan SDM pemberi layanan KIA di tingkat puskesmas terkait pemberian layanan kesehatan ibu hamil pada masa pandemi Covid-19 melalui kunjungan rumah untuk mendekatkan akses pelayanan
6. Pelaksanaan pelayanan ibu hamil harus tetap dilaksanakan dengan protocol kesehatan dengan tetap berpedoman dengan adaptasi kebiasaan baru

Sebagai langkah berikutnya untuk tetap mempertahankan serta meningkatkam akses dan kualitas pelayanan kesehatan ibu hamil di tahun 2022, beberapa rencana kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Melanjutkan beberapa kegiatan program yang telah dilaksanakan pada tahu 2021

2. Melakukan inovasi melalui “Manteng Sawaka” yaitu Monitoring dan Pendampingan Intensif KIA Terintegrasi untuk Penyelamatan Ibu dan BBL ke 50 puskesmas
3. Bekerja sama dan memaksimalkan peran SpoG konsulen ahli untuk melakukan pembinaan puskesmas terkait pelayanan ibu hamil normal, ibu hamil resti dan komplikasi, serta peningkatan kapasitas dan peran dokter puskesmas dalam memberikan layanan ANC terpadu untuk pemenuhan kuantitas pelayanan ibu hamil baik K1, K4 maupun K6
4. Melakukan revitalisasi program P4K di desa
5. Meningkatkan kapasitas dan peran para pemberi layanan KIA dalam surveilans pelayanan Kesehatan ibu hamil melalui E-kohort KIA
6. Meningkatkan peran kepala puskesmas sebagai penentu kebijakan di tingkat layanan dasar dalam meningkatkan kualitas layanan ibu hamil baik pada masa pandemi Covid-19 maupun pada masa normal
7. Meningkatkan koordianasi dengan LP dan LS dalam penguatan implementasi pelayanan Kesehatan ibu hamil
8. Penguatan teknis mentor puskesmas
9. Memperkuat koordinasi dan kerjasama dengan lintas program yang terkait dengan pelayanan ibu hamil baik di tingkat kabupaten maupun di tingkat puskesmas untuk meningkatkan akses dan kualitas ANC 10T
10. Revitalisasi dan peningkatan kualitas kelas ibu hamil pada era pandemi Covid-19
11. Meningkatkan kembali peran kader dan posyandu
12. Berkoordinasi dengan seluruh RS di Kabupaten Karawang dalam kesiapsiagaan penyelamatan ibu dan BBL serta persiapan menghadapi lonjakan kasus ibu hamil terkonfirmasi Covid-19 sehingga ibu hamil dapat memperoleh penanganan sesuai standar
13. Revitalisasi dan memperbaiki system rujukan SiJariEMAS
14. Percepatan vaksinasi Covid-19 bagi ibu hamil
15. Meningkatkan pemeriksaan PCR bagi ibu hamil menggunakan metode TCM

16. Memenuhi ketersediaan standar dan jumlah sarana prasarana pendukung pelayanan Kesehatan ibu hamil sesuai Permenkes No. 4 tahun 2019 yaitu vaksin TT (1 amp sejumlah sasaran ibu hamil/10, tablet tambah darah (Fe) 90 tablet sejumlah ibu hamil, alat deteksi resiko kehamilan (pemeriksaan HB, golongan darah, glukoprotein urin sejumlah ibu hamil, kartu ibu sejumlah ibu hamil, dan buku KIA sesuai kebutuhan.

Indikator Kinerja 4. Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan Sesuai Standar

Pelayanan Kesehatan Persalinan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang ditujukan pada ibu sejak dimulainya persalinan hingga 6 (enam) jam sesudah melahirkan. Persalinan adalah sebuah proses melahirkan bayi oleh seorang ibu yang sangat dinamis. Meskipun 85% persalinan akan berjalan tanpa penyulit namun komplikasi dapat terjadi selama proses persalinan. Oleh karena itu, pendekatan yang dilakukan adalah setiap tempat penyelenggara pelayanan persalinan harus memiliki sumber daya dan kemampuan untuk mengenali sedini mungkin dan memberikan penanganan awal bagi penyulit yang timbul.

Pelayanan persalinan adalah sebuah sistem penyelenggaraan pelayanan persalinan yang dapat mengakomodasi kebutuhan ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir untuk mendapatkan luaran kehamilan yang optimal. Sistem tersebut akan memperhatikan tata kelola klinis, tata kelola program dan tata kelola manajemen dalam penyelenggaraan pelayanan persalinan di dalam jejaring pelayanan persalinan di tingkat kabupaten/kota dan pengampu di tingkat regional.

Persalinan dilakukan sesuai dengan standar persalinan normal atau standar persalinan komplikasi. Standar persalinan normal adalah Asuhan Persalinan Normal (APN) sesuai standard dan memenuhi persyaratan, meliputi:

1. Dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan
2. Tenaga adalah tim penolong persalinan, terdiri dari dokter, bidan dan perawat, apabila ada keterbatasan akses dan tenaga

medis, persalinan dilakukan oleh tim minimal 2 orang tenaga kesehatan yang terdiri dari bidan-bidan, atau bidan-perawat

3. Tim penolong mampu melakukan tata laksana awal penanganan kegawatdaruratan maternal dan neonatal

Sedangkan standar persalinan komplikasi mengacu pada Buku Saku Pelayanan Kesehatan Ibu di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dan rujukan. Pelayanan persalinan harus memenuhi 7 (tujuh) aspek yang meliputi:

1. Membuat keputusan klinik
2. Asuhan sayang ibu dan sayang bayi, termasuk Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dan resusitasi bayi baru lahir
3. Pencegahan infeksi
4. Pencegahan penularan penyakit dari ibu ke anak
5. Persalinan bersih dan aman
6. Pencatatan atau rekam medis asuhan persalinan
7. Rujukan pada kasus komplikasi ibu dan bayi baru lahir

Dengan indikator ini dapat diperkirakan proporsi persalinan yang ditangani oleh tenaga kesehatan dan kemampuan fasilitas kesehatan dalam melakukan pertolongan persalinan sesuai standar yang menggambarkan kemampuan manajemen program KIA dalam pertolongan persalinan sesuai standar. Berdasarkan target Kementerian Kesehatan bahwa semua ibu bersalin harus mendapatkan pelayanan kesehatan yaitu 100%.

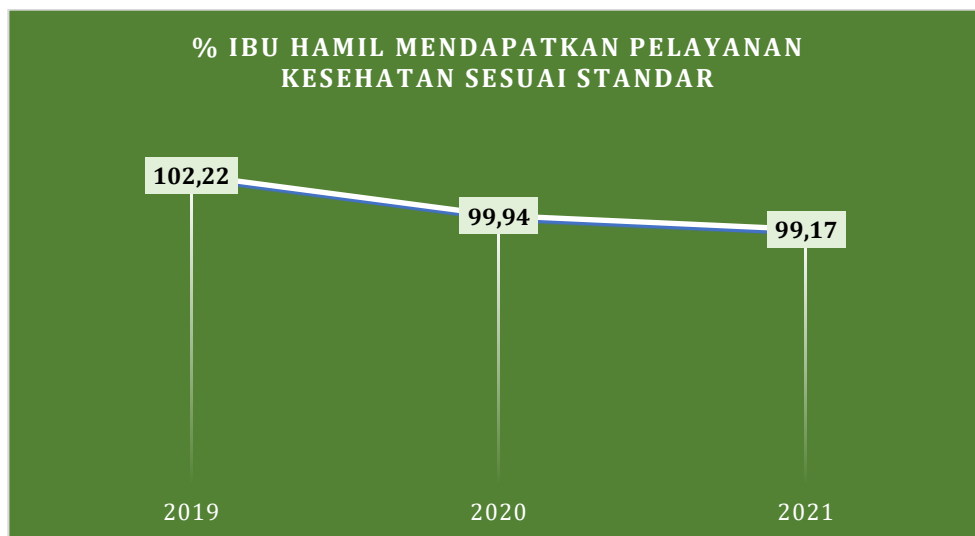
Hasil Capaian Indikator Pelayanan Kesehatan ibu bersalin, terlihat pada tabel berikut :

Grafik 2.7
Capaian Indikator Kinerja Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar

Indikator Kinerja sasaran	2020			2021			Kategori	Target Akhir Renstra
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian		
Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan Sesuai Standar	100%	99,94%	99,94%	100%	99,17%	99,17%	Sangat Baik	100%

Berdasarkan tabel di atas Hasil capaian cakupan pelayanan Kesehatan ibu bersalin di Kabupaten Karawang periode Januari–Desember 2021 mengalami sedikit penurunan apabila dibandingkan capaian tahun 2020. Target yang telah dicapai tahun 2021 adalah 99,17% (dari sasaran proyeksi 39.540 ibu hamil baru 39.210 ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan sesuai standar.

Grafik 2.8
Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar Tahun 2019 s.d 2021



Sumber : Bidang Kesehatan Masyarakat, Dinkes 2021

Pada gambar diatas dapat dilihat bahwa terjadi sedikit penurunan pada indicator pelayanan kesehatan ibu bersalin. Beberapa hal yang mempengaruhi pelayanan kesehatan ibu bersalin adalah sebagai berikut :

1. Masih ada persalinan tidak sesuai standar yaitu di non fasilitas kesehatan (rumah pasien) sebanyak 88 persalinan, hal ini sudah cukup ada perbaikan dibandingkan tahun 2020 masih ada 290 persalinan di non fasilitas kesehatan
2. Masih ada factor social budaya di daerah tertentu yang mempercayakan persalinan ke dukun paraji selain karena factor sulitnya akses ke fasilitas Kesehatan
3. Kurang nya upaya promosi di daerah tertentu terkait pembinaan dan kemitraan dukun paraji

Beberapa upaya yang telah dilaksanakan persalinan sesuai standar sebagai berikut :

1. Peningkatan kapasitas tenaga Kesehatan terutama di PONED dalam pertolongan persalinan sesuai standar baik persalinan normal maupun dengan komplikasi/ kegawatdaruratan
2. Revitalisasi peran PONED sebagai fasilitas Kesehatan tingkat pertama dalam melaksanakan pertolongan persalinan
3. Melaksanakan penyeliaan fasilitatif ke fasilitas kesehatan di lingkungan puskesmas baik bidan desa, BPM maupun klinik tentang kelengkapan sarana dan prasarana pertolongan persalinan sebagai dasar pendukung terpenuhinya syarat minimal fasilitas kesehatan yang direkomendasikan untuk melakukan pertolongan persalinan
4. Peningkatan kapasitas SDM pemberi layanan KIA dalam pemanfaatan E-kohort
5. Pada masa pandemi Covid-19, melaksanakan skrining ibu hamil pada trimester 3 dan saat menjelang persalinan dengan PCR

Sebagai langkah berikutnya untuk tetap mempertahankan serta meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan ibu bersalin di tahun 2022, beberapa rencana kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Melanjutkan kegiatan program tahun sebelumnya.
2. Penyeliaan fasilitatif oleh tim mentor ke puskesmas PONED.
3. Memenuhi ketersediaan standar dan jumlah sarana prasarana pendukung pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai Permenkes No. 4 tahun 2019 yaitu formulir partograf sejumlah sasaran ibu bersalin sebagai instrument pemantaun persalinan, kartu ibu terintegrasi dengan ibu hamil sebagai form rekam medis bagi ibu, buku KIA terintegrasi dengan ibu hamil.
4. Monitoring dan sosialisasi tentang leveling persalinan ke fasilitas pelayanan kesehatan dari tingkat dasar dan lanjut.
5. Meningkatkan peran system rujukan SiJariEMAS untuk penanganan kasus kegawatdaruratan selama proses persalinan.

Indikator Kinerja 5. Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar

Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan neonatal esensial sesuai standar. Pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota wajib memberikan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar kepada semua bayi usia 0-28 hari di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Pelayanan Kesehatan bayi sesuai standar meliputi standar kuantitas dan standar kualitas.

Pelayanan kesehatan bayi baru lahir dimulai segera setelah bayi lahir sampai 28 hari. Pelayanan pasca persalinan pada bayi baru lahir dimulai sejak usia 6 jam sampai 28 hari.

Standar kuantitas pelayanan neonatal esensial dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali kunjungan, yang meliputi:

1. 1 (satu) kali pada umur 6-48 jam; (KN 1)
2. 1 (satu) kali pada umur 3-7 hari (KN 2); dan
3. 1 (satu) kali pada umur 8-28 hari. (KN 3)

Sedangkan standar kualitas meliputi perawatan neonatal esensial saat lahir meliputi:

1. Pemotongan dan perawatan tali pusat
2. Inisiasi menyusui dini (IMD)
3. Injeksi vitamin K1
4. Pemberian salep/ tetes mata antibiotic
5. Pemberian imunisasi (injeksi vaksin HB0)

Pelayanan neonatal esensial setelah lahir meliputi :

1. Konseling perawatan bayi baru lahir dan ASI eksklusif
2. Memeriksa kesehatan dengan menggunakan pendekatan MTBM
3. Pemberian vitamin K1 bagi yang lahir tidak di fasilitas pelayanan kesehatan atau belum mendapatkan injeksi vitamin K1
4. Imunisasi hepatitis B injeksi untuk bayi usia < 24 jam yang lahir tidak di tolong tenaga kesehatan
5. Penanganan dan rujukan kasus neonatal komplikasi

Tabel 2.8
Capaian Indikator Kinerja Persentase Bayi Baru Lahir
Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai
Standar

Indikator Kinerja sasaran	2020			2021			Kategori	Target Akhir Renstra
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian		
Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar	100%	105,40%	105,40%	100%	100%	100%	Sangat Baik	100%

Berdasarkan tabel diatas Capaian cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir di Kabupaten Karawang tahun 2021 sebesar 100% yang artinya semua bayi baru lahir mendapatkan pelayanan sesuai standar. Tahun 2019-2020 dilihat dari presentase realisasi cakupan pelayanan kesehatan neonatus sudah melebihi target SPM 100%. Capaian melebihi 100% karena jumlah sasaran riil dan capaian riil di puskesmas lebih besar bila dibandingkan dengan sasaran proyeksi yang perhitungannya sudah ditentukan oleh BPS.

Tabel di atas juga menunjukkan bahwa efektifitas serta kualitas pelayanan kesehatan neonatus juga cukup berhasil karena hampir seluruh bayi yang lahir mendapatkan kunjungan neonatal lengkap. Akan tetapi perlu menjadi bahan pertimbangan bahwa efektifitas dan kualitas pelayanan kesehatan neonatal masih perlu dimaksimalkan lagi karena beberapa program belum berjalan optimal diantaranya :

1. Inisiasi menyusui dini (IMD) belum dilaksanakan secara optimal
2. Konseling asi eksklusif belum dilaksanakan secara optimal
3. Pemeriksaan kesehatan bayi baru lahir belum menggunakan pendekatan MTBM
4. Skrining hipotiroid kongenital belum dilaksanakan secara optimal di semua puskesmas
5. Kurangnya kepatuhan bidan dalam mengisi kartu bayi dan kohort

Beberapa rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan bayi baru lahir adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kapasitas SDM pemberi layanan KIA dalam pemanfaatan E-Kohort.
2. Perencanaan kebutuhan alat dan bahan habis pakai untuk skrining hipotiroid kongenital.
3. Optimalisasi layanan IMD dan asi eksklusif.
4. Optimalisasi pelaksanaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir pada masa pandemic Covid-19 yaitu dengan melakukan kunjungan rumah dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.
5. Peningkatan pengawasan pada bayi resiko tinggi dan komplikasi.
6. Kalakarya MTBM bagi bidan.
7. Memenuhi ketersediaan standar dan jumlah sarana prasarana pendukung pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai Permenkes No. 4 tahun 2019 yaitu vaksin HB0, vitamin K injeksi, salep mata, formulir bayi baru lahir, formulir MTBM dan buku KIA.

Indikator Kinerja 6. Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar

Setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah Tingkat Kabupaten/Kota wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada semua balita di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun. Pelayanan kesehatan balita berusia 0-59 bulan sesuai standar meliputi :

- Pelayanan kesehatan balita sehat.
- Pelayanan kesehatan balita sakit.

Pelayanan kesehatan balita sehat adalah pelayanan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan menggunakan buku KIA dan skrining tumbuh kembang, meliputi:

1. Pelayanan kesehatan Balita usia 0 -11 bulan:
 - a. Penimbangan minimal 8 kali setahun.

- b. Pengukuran panjang/tinggi badan minimal 2 kali/tahun.
 - c. Pemantauan perkembangan minimal 2 kali/tahun.
 - d. Pemberian kapsul vitamin A pada usia 6-11 bulan 1 kali setahun.
 - e. Pemberian imunisasi dasar lengkap.
2. Pelayanan kesehatan Balita usia 12-23 bulan:
- a. Penimbangan minimal 8 kali setahun (minimal 4 kali dalam kurun waktu 6 bulan).
 - b. Pengukuran panjang/tinggi badan minimal 2 kali/tahun.
 - c. Pemantauan perkembangan minimal 2 kali/ tahun.
 - d. Pemberian kapsul vitamin A sebanyak 2 kali setahun.
 - e. Pemberian Imunisasi Lanjutan.
3. Pelayanan kesehatan Balita usia 24-59 bulan:
- a. Penimbangan minimal 8 kali setahun (minimal 4 kali dalam kurun waktu 6 bulan).
 - b. Pengukuran panjang/tinggi badan minimal 2 kali/tahun.
 - c. Pemantauan perkembangan minimal 2 kali/ tahun.
 - d. Pemberian kapsul vitamin A sebanyak 2 kali setahun.
4. Pemantauan perkembangan balita.
 5. Pemberian kapsul vitamin A.
 6. Pemberian imunisasi dasar lengkap.
 7. Pemberian imunisasi lanjutan.
 8. Pengukuran berat badan dan panjang/tinggi badan.
 9. Edukasi dan informasi.

Pelayanan kesehatan balita sakit adalah pelayanan balita menggunakan pendekatan manajemen terpadu balita sakit (MTBS).

Tabel 2.9
Capaian Indikator Kinerja Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar

Indikator Kinerja sasaran	2020			2021			Kategori	Target Akhir Renstra
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian		
Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	100%	77,90%	77,90%	100%	81,68%	81,68%	Baik	100%

Berdasarkan tabel di atas, cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar pada tahun 2021 mengalami peningkatan dibanding tahun 2020, yaitu sebesar 77,90% pada tahun 2020 menjadi 81,68% pada tahun 2021. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2020 awal pandemi terjadi penurunan cakupan, namun tahun 2021 cakupan meningkat kembali dengan penyesuaian kegiatan pelayanan melalui adaptasi kebiasaan baru. Namun dari beberapa indikator pelayanan kesehatan balita masih ada yang belum optimal dilaksanakan yaitu :

1. Pemantauan perkembangan balita melalui SDIDTK sulit dilaksanakan dengan kondisi pandemi Covid-19 karena belum semua tenaga terlatih dan membutuhkan waktu yang cukup lama
2. MTBS belum berjalan optimal karena belum semua tenaga terlatih dan update MTBS
3. Posyandu tidak berjalan optimal seperti sebelum pandemi Covid-19
4. Kelas ibu balita tidak dilaksanakan oleh seluruh puskesmas
5. Kurangnya kepatuhan tenaga kesehatan dalam mengisi kartu balita dan kohort
6. Kurangnya pemanfaatan buku KIA

Upaya tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan Kesehatan balita adalah sebagai berikut :

1. Melanjutkan rencana program tahun sebelumnya
2. Meningkatkan kerjasama dengan lintas sektor dan lintas program dalam meningkatkan pemberdayaan posyandu
3. Mendorong puskesmas untuk melaksanakan kelas ibu balita melalui perencanaan dana BOK puskesmas
4. Orientasi kalakarya MTBS bagi tenaga kesehatan di puskesmas
5. Orientasi SDIDTK update bagi tenaga kesehatan di puskesmas
6. Meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan pemberi layanan KIA dalam pemanfaatan E-kohort
7. Meningkatkan kapasitas bidan dalam pemanfaatan buku KIA
8. Meningkatkan kapasitas kader dan guru PAUD dalam melaksanakan SDIDTK

9. Memenuhi ketersediaan standar dan jumlah sarana prasarana pendukung pelayanan kesehatan balita sesuai Permenkes No. 4 tahun 2019 yaitu formulir KPSP, formulir DDTK, buku KIA, vitamin A merah biru, vaksin imunisasi dasar, vaksin imunisasi lanjutan.

Indikator Kinerja 7. Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar

Anak usia sekolah merupakan sasaran untuk pelaksanaan program kesehatan yang muda dijangkau karena terorganisir dengan baik yaitu berada di sekolah/ madrasah melalui penjangkauan kesehatan dan pemeriksaan berkala, yang dibutuhkan untuk mendukung proses belajar. Penjangkauan kesehatan merupakan suatu prosedur pemeriksaan kesehatan yang dilakukan untuk mendeteksi dini masalah kesehatan yang dapat mengganggu proses belajar dan tumbuh kembang anak sehingga dapat ditindaklanjuti dengan segera.

Penjangkauan kesehatan dan pemeriksaan berkala anak usia sekolah dan remaja merupakan salah satu indikator standar pelayanan minimal bidang kesehatan yang dilaksanakan di sekolah/ madrasah dan di luar sekolah berdasarkan wilayah Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun.

Pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar sesuai standar meliputi :

1. Skrining kesehatan.
2. Tindaklanjut hasil skrining kesehatan.

Pelayanan ini dilakukan pada anak kelas 1 sampai dengan kelas 7 di sekolah minimal satu kali dalam satu tahun ajaran dan usia 7 sampai 15 tahun diluar sekolah.

Pelaksanaan skrining kesehatan anak usia pendidikan dasar dilaksanakan di satuan pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTS) dan di luar satuan pendidikan dasar seperti di pondok pesantren, panti/LKSA, lapas/LPKA dan lainnya, meliputi:

1. Penilaian status gizi.
2. Penilaian tanda vital.
3. Penilaian kesehatan gigi dan mulut.
4. Penilaian ketajaman indera

Tindaklanjut hasil skrining kesehatan meliputi:

1. Memberikan umpan balik hasil skrining kesehatan
2. Melakukan rujukan jika diperlukan
3. Memberikan penyuluhan kesehatan

Menghadapi masa pandemi Covid 19 Kemenkes telah mengeluarkan Pedoman untuk memodifikasi cara pelaksanaan pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja dalam rangka mencegah penularan dan menjamin setiap anak mendapatkan haknya atas pelayanan kesehatan esensial. Langkah-langkah dalam menerapkan penyesuaian pelayanan kesehatan bagi kelompok usia sekolah dan remaja di puskesmas selama masa pandemi COVID-19, antara lain :

1. Pelaksanaan penjangkaran kesehatan harus mengutamakan kesehatan dan keselamatan anak dan tenaga kesehatan. Perlu dipertimbangkan risiko penularan Covid 19 di sekolah.
2. Kegiatan penjangkaran didorong untuk dilaksanakan secara daring dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi menggunakan Google form
3. Pada daerah dimana satuan pendidikan melakukan PTM, penjangkaran dapat dipertimbangkan dilakukan secara tatap muka dengan menerapkan protokol kesehatan, yaitu :
 - Pengaturan jadwal, jaga jarak, menggunakan masker, CTPS, pemeriksaan di ruang dengan ventilasi yang baik
 - Waktu pemeriksaan diupayakan sesingkat mungkin

Tabel 2.10
Capaian Indikator Kinerja Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar

Indikator Kinerja sasaran	2020			2021			Kategori	Target Akhir Renstra
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian		
Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar	100%	98,43%	98,43%	100%	73,86%	73,86%	Baik	100%

Dari Tabel diatas terlihat capaian pelayanan kesehatan pada anak usia pendidikan dasar terjadi penurunan. Dari jumlah sasaran 95.514 yang sudah mendapat pelayanan sebanyak 70.544 (73,86%)

dan 24.970 anak belum mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Hal ini dikarenakan :

1. Puncak masa pandemi Covid 19 terjadi pada saat pertengahan tahun 2021, sehingga sekolah tidak boleh melakukan Pembelajaran Tatap Muka (PTM), sehingga siswa melakukan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Hal ini menyulitkan petugas dalam melakukan pelayanan penjarangan. Sesuai surat edaran Kementerian Kesehatan tentang pelaksanaan penjarangan pada masa pandemi, penjarangan dapat dilakukan melalui daring yaitu melalui Google Form. Hal ini sudah dilakukan tetapi banyak sekali kendala yang dihadapi, antara lain kendala sinyal, kuota, orang tua/ anak yang tidak menguasai teknologi informasi & kurangnya respon siswa & orang tua, sehingga data yang diperoleh tidak maksimal dan tidak sesuai standar.
2. Tidak adanya pembiayaan penjarangan kesehatan pada Biaya Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas pada tahun 2021
3. Pelaksanaan penjarangan melalui daring ini tidak diimbangi dengan baiknya kualitas hasil penjarangan karena petugas tidak dapat melakukan pemeriksaan pada sasaran secara langsung. Data yang diperoleh dari hasil penjarangan juga belum dianalisa oleh programer di Puskesmas, sehingga hasilnya belum disampaikan ke lintas program & lintas sektor, terutama ke pihak sekolah.

Upaya tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan Kesehatan pada anak usia pendidikan dasar adalah sebagai berikut :

1. Melanjutkan rencana program tahun sebelumnya
2. Pendampingan penjarangan bagi petugas Anak Usia Sekolah & Remaja (AUSREM)
3. Meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan dalam melakukan penjarangan kesehatan melalui pemanfaatan Google Form penjarangan
4. Memasukan pembiayaan penjarangan kesehatan ke dalam perencanaan dana BOK puskesmas

Mendorong para petugas AUSREM untuk melakukan analisa hasil penjarangan.

Indikator Kinerja Utama 8. Pelayanan Kesehatan Usia Produktif

Setiap warga negara Indonesia usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan skrining kesehatan sesuai standar pada warga negara usia 15–59 tahun di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

Pelayanan skrining kesehatan usia 15–59 tahun dilakukan di Puskesmas dan jaringannya (Posbindu PTM) serta fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang bekerja sama dengan pemerintah daerah. Pelayanan skrining kesehatan usia 15–59 tahun meliputi :

1. Deteksi kemungkinan obesitas dilakukan dengan memeriksa tinggi badan dan berat badan serta lingkar perut.
2. Deteksi hipertensi dengan memeriksa tekanan darah sebagai pencegahan primer.
3. Deteksi kemungkinan diabetes melitus menggunakan tes cepat gula darah.
4. Deteksi gangguan mental emosional dan perilaku
5. Pemeriksaan ketajaman penglihatan
6. Pemeriksaan ketajaman pendengaran
7. Deteksi dini kanker dilakukan melalui pemeriksaan payudara klinis dan pemeriksaan IVA khusus untuk wanita usia 30–59 tahun.

Capaian pelayanan kesehatan usia produktif pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 3.11.

Tabel 2.11
Capaian Indikator Kinerja Pelayanan Kesehatan Usia Produktif

Indikator Kinerja sasaran	2020			2021			Kategori	Target Akhir Renstra
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian		
Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	100%	12,26%	12,26%	100%	59,40%	59,40%	Cukup	100%

Berdasarkan tabel diatas capaian Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif pada tahun 2021 baru mencapai 59,4% atau dari sasaran

1.560.975 penduduk usia 15-59 tahun, hanya 927.833 orang yang mendapat pelayanan kesehatan. Mengingat capaian yang masih kecil maka diperlukan rencana strategis tahun depan untuk menjangkau setiap warga umur 15-59 tahun untuk berkunjung ke fasilitas pelayanan kesehatan dan jaringannya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan usia produktif. Perlu juga dilakukan analisis sebab-sebab mereka belum berkunjung adalah apakah persoalan pandemi, akses, sudah memeriksa sendiri atau tidak mau mendapat pelayanan skrining. Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota harus mempunyai strategi untuk menjangkau seluruh warga negara usia 15-59 tahun agar seluruhnya dapat memperoleh Pelayanan skrining sesuai standar setahun sekali.

Indikator Kinerja 9. Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut

Semakin bertambah usia, makin besar kemungkinan seseorang mengalami permasalahan fisik, fisiologis, mental, spiritual, ekonomi dan social. Salah satu permasalahan yang sangat mendasar pada lanjut usia adalah masalah Kesehatan akibat proses kemunduran fungsi tubuh yang terjadi secara bertahap yang berujung pada kerusakan jaringan atau organ. Adapun definisi Lansia menurut Undang Undang no 13 tahun 1998 tentang kesejahteraan lansia adalah Penduduk berusia diatas 60 tahun dimana mereka merupakan salah satu kelompok beresiko yang membutuhkan penanganan khusus.

Menurut riset Kesehatan Dasar 2018 (Riskesdas, 2018) masalah Kesehatan lansia terbanyak yang dialami Lansia adalah penyakit tidak menular diantaranya tekanan darah tinggi (hipertensi), peradangan sendi, kencing manis (DM), penyakit jantung, stroke, gagal ginjal menahun dan kanker. Masalah tersebut dapat menyebabkan ketidakmampuan lansia dalam melakukan kegiatan dan memenuhi kebutuhannya sehari-hari, sehingga membutuhkan perawatan jangka Panjang.

Pembinaan kesehatan usia lanjut terutama ditujukan pada upaya peningkatan Kesehatan lansia yang sehat, mandiri dan produktif. Kemampuan untuk mandiri agar selama mungkin tetap produktif dan berperan aktif dalam pembangunan, serta dilaksanakan secara terpadu dengan meningkatkan peran lintas sektor dan lintas program.

Realisasi cakupan pelayanan kesehatan lansia belum mencapai target dan belum diimbangi dengan kualitas pelaporan yang baik. Pembinaan ke puskesmas terkait pelayanan kesehatan lansia merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun melalui bimbingan teknis puskesmas santun lansia. Dari hasil pembinaan rutin yang telah dilakukan ternyata belum diimbangi dengan meningkatnya kualitas pelayanan santun lansia. Dari 50 puskesmas yang melaksanakan pelayanan santun lansia masih termasuk strata pertama yaitu belum tersedianya:

- Pendaftaran untuk pelayanan lansia
- Ruang periksa untuk lansia
- Ruang tunggu/duduk untuk lansia
- Apotik untuk lansia
- Pegangan khusus untuk berjalan para lansia
- Jalan khusus untuk kursi roda
- Fasilitas kursi roda
- Toilet khusus lansia dengan pegangan
- Lansia kit masih terbatas (2 lansia kit)

Petugas lansia yang sudah terlatih geriatric baru 2 org

Tabel 2.12
Capaian Indikator Kinerja Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut

Indikator Kinerja sasaran	2020			2021			Kategori	Target Akhir Renstra
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian		
Cakupan Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut	100%	53,44%	53,44%	100%	63,34%	63,34%	Cukup	100%

Hasil capaian cakupan pelayanan kesehatan pada usia lanjut (>60 tahun) dari sasaran proyeksi sebesar 245,426 hanya 155,450 orang yang mendapatkan pelayanan skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun atau 63,34 dari target 100%.

Beberapa faktor yang menyebabkan cakupan program lansia belum mencapai target adalah:

1. Adanya Pandemi Covid 19, sehingga pelaksanaan screening untuk lansia tidak efektif.
2. Pencatatan dan pelaporan hasil pelayanan kesehatan lansia dari puskesmas belum berjalan dengan baik, sebagian besar puskesmas tidak melaporkan setiap bulan
3. Laporan belum lengkap masuk ke penanggungjawab program lansia
4. Belum optimalnya pemahaman tentang definisi operasional pelayanan kesehatan lansia
5. Sering adanya pergantian petugas lansia atau petugas memegang lebih dari 1 program sehingga menghambat kesinambungan program
6. Program lansia di puskesmas belum dijadikan program prioritas padahal sebagai salah satu indikator SPM bidang kesehatan
7. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang pemeriksaan kesehatan lansia di puskesmas

Upaya yang telah dilakukan baru pembinaan secara rutin ke 50 puskesmas dengan menggunakan daftar ceklis dan instrumen penilaian puskesmas santun lansia. Namun upaya yang telah dilakukan belum optimal dalam meningkatkan kualitas pelayanan lansia maka perlu dilanjutkan ditahun berikutnya serta di rekomendasikan menerbitkan SK puskesmas santun lansia dengan menyediakan sarana dan prasarana penunjang serta mengusulkan pelatihan/ peningkatan kompetensi teknis petugas lansia dalam pelayanan puskesmas santun lansia

Pengembangan Puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan Kesehatan santun lansia puskesmas yang mempunyai ciri ciri :

- Memberikan prioritas pelayanan kepada lanjut usia dan penyediaan sarana yang aman dan mudah di akses.
- Memberikan dukungan/bimbingan kepada lanjut usia dan keluarga secara berkesinambungan
- Melakukan pelayanan secara pro aktif yaitu posyandu lansia
- Melakukan koordinasi dengan lintas program dengan pendekatan siklus hidup.

- Melakukan kerja sama dengan lintas sector, termasuk organisasi kemasyarakatan dan dunia usaha dengan asas kemitraan.

Indikator Kinerja 10. Cakupan Desa/Kelurahan *Universal Child Immunization*

Dalam Undang - Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 dinyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh imunisasi dasar sesuai dengan ketentuan untuk mencegah terjadinya penyakit yang dapat dihindari melalui imunisasi dan pemerintah wajib memberikan imunisasi lengkap kepada setiap bayi dan anak. Penyelenggaraan imunisasi tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 yang diundangkan tanggal 11 April 2017 menggantikan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2013.

Imunisasi adalah suatu upaya untuk menimbulkan/meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit tertentu, sehingga bila suatu saat terpapar dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan. Beberapa penyakit menular yang termasuk ke dalam Penyakit yang Dapat Dicegah dengan Imunisasi (PD3I) antara lain TBC, difteri, tetanus, hepatitis B, pertusis, campak, rubella, polio, radang selaput otak, dan radang paru-paru. Anak yang telah diberi imunisasi akan terlindungi dari berbagai penyakit berbahaya tersebut, yang dapat menimbulkan kecacatan atau kematian. Imunisasi merupakan salah satu intervensi kesehatan yang terbukti paling cost-effective (murah), karena dapat mencegah dan mengurangi kejadian kesakitan, kecacatan, dan kematian akibat PD3I yang diperkirakan 2 hingga 3 juta kematian tiap tahunnya.

Berdasarkan jenis penyelenggaraannya, imunisasi dikelompokkan menjadi imunisasi program dan imunisasi pilihan. Imunisasi program adalah imunisasi yang diwajibkan kepada seseorang sebagai bagian dari masyarakat dalam rangka melindungi yang bersangkutan dan masyarakat sekitarnya dari penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Sedangkan imunisasi pilihan adalah imunisasi yang dapat diberikan kepada seseorang sesuai dengan

kebutuhannya dalam rangka melindungi yang bersangkutan dari penyakit tertentu.

Universal Child Immunization (UCI) adalah suatu keadaan tercapainya imunisasi dasar secara lengkap pada semua bayi. Bayi adalah anak dibawah umur 1 tahun (Kepmenkes No. 1611/MENKES/SK/XI/2005:9). UCI merupakan salah satu target keberhasilan program imunisasi dasar lengkap bayi secara merata pada bayi di semua desa/kelurahan. Capaian UCI di Kabupaten Karawang dapat dilihat pada tabel :

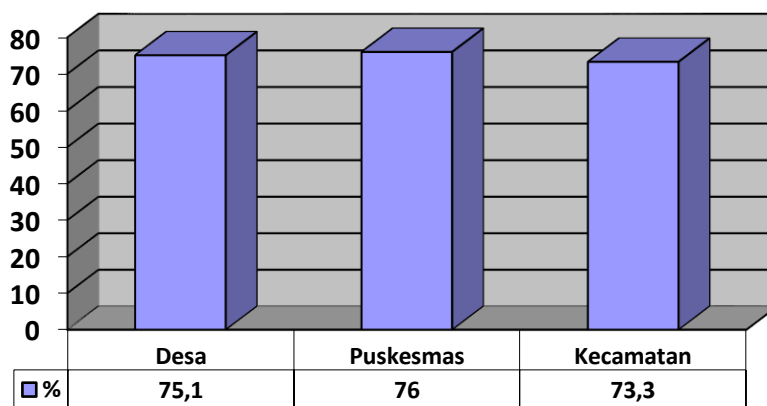
Tabel 2.13
Capaian Indikator Kinerja Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization

Indikator Kinerja sasaran	2020			2021			Kategori	Target Akhir Renstra
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian		
Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization	100%	73,14%	73,14%	100%	75,10%	75,10%	Baik	100%

Capaian UCI di Kabupaten Karawang pada tahun 2021 sebanyak 75,10%. Capaian kinerja persentase desa/kelurahan UCI pada tahun 2021 masih belum ada kenaikan capaian yang signifikan, hal ini disebabkan karena belum berakhirnya pandemic Covid-19.

Lebih jelasnya capaian UCI di Kabupaten Karawang tahun 2021 dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Grafik 2.9
Hasil Universal Child Immunization tahun 2021



Sumber: Seksi Surveilans dan Imunisasi, 2021

Dari hasil gambar diatas dapat dilihat bahwa hasil UCI desa, puskesmas dan UCI kecamatan belum mencapai target yang telah ditetapkan, dari seluruh jumlah desa (309 desa). Desa yang sudah mencapai target UCI adalah 232 desa.

Beberapa faktor lain yang menyebabkan rendahnya ketercapaian kinerja persentase desa/kelurahan UCI antara lain:

- a. Munculnya isue negatif yang beranggapan masih adanya unsur haram di dalam vaksin.
- b. Belum adanya perda tentang kewajiban masuk sekolah dasar melampirkan sertifikat imunisasi dasar lengkap dan lanjutan pada waktu usia Baduta
- c. Kurang optimalnya pelacakan anak anak yang DO dari imunisasi.
- d. Sasaran Riil bagi bayi yang belum valid
- e. Pencatatan dan pelaporan hasil pelayanan imunisasi di BPS, Posyandu dan Puskesmas yang belum menggunakan sistem secara terpadu/online
- f. Adanya kontroversi manfaat dan kejadian ikutan pasca imunisasi (KIPI)

Rendahnya cakupan UCI ini bisa menimbulkan bencana penyakit baru (seperti wabah campak, difteri, dan tuberculosis) yang lebih besar pada masa mendatang di luar Covid-19 padahal penyakit tersebut bisa dicegah dengan vaksinasi.

Dalam masa pandemi ini, imunisasi harus tetap diupayakan lengkap sesuai jadwal untuk melindungi anak-anak dari PD3I (Penyakit yang dapat Dicegah Dengan Imunisasi). Pelayanan imunisasi pada masa pandemic Covid-19 dilaksanakan sesuai kebijakan pemerintah daerah setempat, berdasarkan analisa situasi epidemiologi penyebaran Covid-19, cakupan imunisasi rutin, dan situasi epidemiologi PD3I.

Adapun prinsip-prinsip yang menjadi acuan dalam melaksanakan program imunisasi pada masa pandemi Covid-19 yaitu:

- a. Imunisasi dasar dan lanjutan tetap diupayakan lengkap dan dilaksanakan sesuai jadwal untuk melindungi anak dari PD3I
- b. Secara operasional pelayanan imunisasi baik di posyandu, puskesmas, puskesmas keliling maupun fasilitas pelayanan

- kesehatan lainnya yang memberikan layanan imunisasi mengikuti kebijakan pemerintah daerah setempat
- c. Kegiatan surveilans PD3I harus dioptimalkan termasuk pelaporannya
 - d. Menerapkan prinsip PPI dan menjaga jarak aman 1-2 meter.

Indikator Kinerja 11. Pelayanan Kesehatan pada Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis

Tuberkulosis (TB) merupakan masalah kesehatan masyarakat dan menjadi tantangan global. Berdasarkan Global TB Report WHO tahun 2021, data Tahun 2021 menunjukkan Indonesia menjadi negara urutan ke-3 (ketiga) yang mempunyai beban TB terbesar setelah India dan China. Selain itu terdapat tantangan yang perlu menjadi perhatian yaitu meningkatnya kasus TB-MDR, TB-HIV, TB-DM, TB Anak dan masyarakat rentan lainnya. Indonesia saat ini menghadapi tantangan yang cukup besar dengan beban prevalensi 301/100.000 penduduk. Program Penanggulangan TB nasional terus melakukan intensifikasi, akselerasi, ekstensifikasi dan inovasi program untuk menghadapi situasi tersebut.

Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh orang dengan TB sebagai upaya pencegahan di wilayah kerjanya. Pelayanan Tuberkulosis Sesuai Standar adalah pelayanan kesehatan diberikan kepada seluruh orang dengan TB yang dilakukan oleh tenaga kesehatan sesuai kewenangannya di FKTP (puskesmas dan jaringannya) dan di FKTL baik pemerintah maupun swasta. Pengobatan dengan menggunakan Obat Anti Tuberkulosis (OAT) dengan panduan OAT standar.

Gejala Utama TB adalah batuk selama 2 minggu atau lebih. Batuk dapat diikuti dengan dahak bercampur darah, batuk darah, sesak nafas, badan lemas, nafsu makan menurun, berat badan menurun, berkeringat malam hari tanpa aktifitas fisik dan badan meriang lebih dari satu bulan.

Kegiatan Promotif dan preventif antara lain penemuan kasus secara dini, penemuan kasus secara aktif, pemberian KIE untuk pencegahan penularan dengan penerapan etika batuk,

pengendalian faktor risiko dan pemberian obat pencegahan. Prinsip pelayanan TBC adalah penemuan orang dengan TBC sedini mungkin, ditatalaksana sesuai standar sekaligus pemantauan hingga sembuh atau “TOSS TB” (Temukan, Obati Sampai Sembuh).

Program penanggulangan TB di Kabupaten Karawang dari tahun ke tahun menunjukkan hasil yang fluktuatif, dimana penemuan kasus/*case detection rate* (CDR) mengalami peningkatan dari angka CDR hanya 37,6% pada 2013 menjadi 90% pada 2021 dan angka penemuan ini sudah mencapai target minimal 90%.

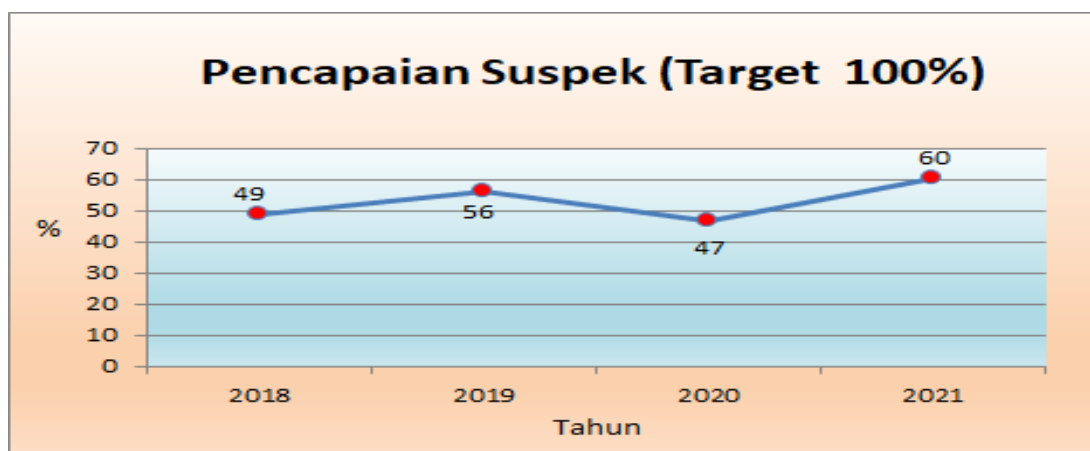
Pada tahun 2021 capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan orang dengan Terduga TBC dinilai dari persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar. Capaian orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar tahun 2021 sebesar 14.952 orang dari target 24.718 orang terduga TBC, maka realisasi capaian pelayanan orang terduga TB tahun 2021 baru mencapai 60,49%, namun hal ini meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Capaian kinerja pelayanan kesehatan dengan TB dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.14
Capaian Indikator Kinerja Pelayanan Kesehatan dengan TB

Indikator Kinerja sasaran	2020			2021			Kategori	Target Akhir Renstra
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian		
Pelayanan Kesehatan orang terduga Tuberkulosis	100%	39,87%	39,87%	100%	60,49%	60,49%	Cukup	100%

Berdasarkan tabel diatas capaian indikator kinerja pelayanan kesehatan orang terduga Tuberculosis mengalami peningkatan dibandingkan tahun lalu, dari 39,87% menjadi 60,49%, tetapi belum mencapai target yang ditetapkan pada akhir renstra. Dibawah ini merupakan trend capaian indikator kinerja pelayanan kesehatan dengan TB di Kabupaten Karawang sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2021.

Grafik 2.10
Trend capaian pelayanan kesehatan dengan TB di Kab. Karawang



Sumber: Seksi P2P Dinkes Karawang, 2021

Realisasi capaian tahun 2021 yang belum mencapai target yang ditetapkan, ini disebabkan karena:

- Perubahan definisi operasional SPM TB. Pada tahun 2017 sampai 2018 disebutkan bahwa SPM TB didefinisikan sebagai pelayanan terhadap orang dengan TB (penderita terdiagnosa TB) sedangkan mulai pada tahun 2019 dalam Permenkes No. 9 berubah menjadi pelayanan terhadap orang terduga TB (terduga TB/ belum terdiagnosa TB). Hal ini menyebabkan perhitungan capaian kinerja SPM TB menjadi jauh berbeda tiap tahunnya.
- Perubahan perhitungan target SPM TB dimana pada tahun 2016 sampai 2018 masih mengacu pada perhitungan beban RAD TB Kemenkes, sedangkan mulai pada tahun 2019 menggunakan perhitungan yang mengacu pada Permenkes No.9 tahun 2019, sehingga hal ini mengakibatkan terjadinya perbedaan hasil capaian kinerja SPM TB yang besar setiap tahunnya.
- Belum semua fasilitas kesehatan menyampaikan pelaporan program TB tahun 2021 ke kabupaten melalui pelaporan online SITB, terutama layanan kesehatan swasta baik laporan terduga maupun kasus TB. Untuk diketahui bahwa mulai tahun 2019, beban Tatalaksana TB dibebankan kepada masing-masing fasyankes, bukan lagi berbasis wilayah. Sehingga semua

fasyankes harus melaporkan semua kasus TB (*Mandatory Notifcation*), dan perhitungan target setiap fasyankes ditetapkan berdasarkan *template* perhitungan beban kinerja yang sudah diberikan oleh Kemenkes pada tahun 2019 dan berlaku untuk 5 tahun kedepannya. Untuk itu, data capaian program TB, baik SPM maupun indikator program harus memunculkan semua fasyankes yang terlibat dalam tatalaksana TB didalam laporan SPM maupun Profil Kesehatan.

- Masih terdapat 5 RS yang belum memiliki baseline data untuk perhitungan beban target, sehingga capaian kinerja tidak dapat diperhitungkan dan akan berdampak pada capaian kinerja pelayanan TB
- Kurangnya tenaga petugas di lapangan baik programer maupun analis laboratorium TB untuk melakukan penjangkauan pelayanan orang terduga TB di masyarakat.
- Anggaran program TB bersumber APBD II Tahun 2021 mengalami efisiensi dan *re-focusing* anggaran untuk pencegahan dan penanggulangan Covid-19, dimana hanya ada beberapa kegiatan program yang bisa direalisasikan di akhir tahun sehingga upaya penemuan orang terduga TB menjadi terhambat begitu pula upaya deteksi dini dan penemuan kasus TB.

Indikator Kinerja 12. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV

Setiap orang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan) mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar. Pelayanan kesehatan yang diberikan kepada orang dengan risiko terinfeksi HIV sesuai standar meliputi:

1. Edukasi perilaku berisiko
2. Skrining

Orang dengan risiko terinfeksi virus HIV yaitu :

1. Ibu hamil, yaitu setiap perempuan yang sedang hamil.
2. Pasien TBC, yaitu pasien yang terbukti terinfeksi TBC dan sedang mendapat pelayanan terkait TBC

3. Pasien Infeksi Menular Seksual (IMS), yaitu pasien yang terbukti terinfeksi IMS selain HIV dan sedang mendapat pelayanan terkait IMS
4. Penjaja seks, yaitu seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan orang lain sebagai sumber penghidupan utama maupun tambahan, dengan imbalan tertentu berupa uang, barang atau jasa
5. Lelaki yang berhubungan seks dengan lelaki (LSL), yaitu lelaki yang pernah berhubungan seks dengan lelaki lainnya, sekali, sesekali atau secara teratur apapun orientasi seksnya (heteroseksual, homoseksual atau biseksual)
6. Transgender/Waria, yaitu orang yang memiliki identitas gender atau ekspresi gender yang berbeda dengan jenis kelamin atau seksnya yang ditunjuk saat lahir, kadang disebut juga transeksual.
7. Pengguna napza suntik (penasun), yaitu orang yang terbukti memiliki riwayat menggunakan narkotika dan atau zat adiktif suntik lainnya.
8. Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), yaitu orang yang dalam pembinaan pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM dan telah mendapatkan vonis tetap.

Mekanisme Pelayanan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia, meliputi:

1. Penetapan sasaran HIV ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan orang yang berisiko terinfeksi HIV (penderita TBC, IMS, penjaja seks, LSL, transgender, WBP, dan ibu hamil).
2. Edukasi perilaku berisiko dan pencegahan penularan
3. Skrining dilakukan dengan pemeriksaan Tes Cepat HIV minimal 1 kali dalam setahun.
4. Melakukan rujukan jika diperlukan.

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (*Human Immunodeficiency Virus* = HIV) dinilai dari persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai

standar. Capaian kinerja Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.15
Capaian Indikator Kinerja Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV

Indikator Kinerja sasaran	2020			2021			Kategori	Target Akhir Renstra
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian		
Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	100%	48,20%	48,20%	100%	55,89%	55,89%	Cukup	100%

Capaian pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV pada tahun 2021 baru mencapai 55,89% atau dari sasaran 51.488 orang dengan resiko terinfeksi Virus HIV baru 28.777 yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar.

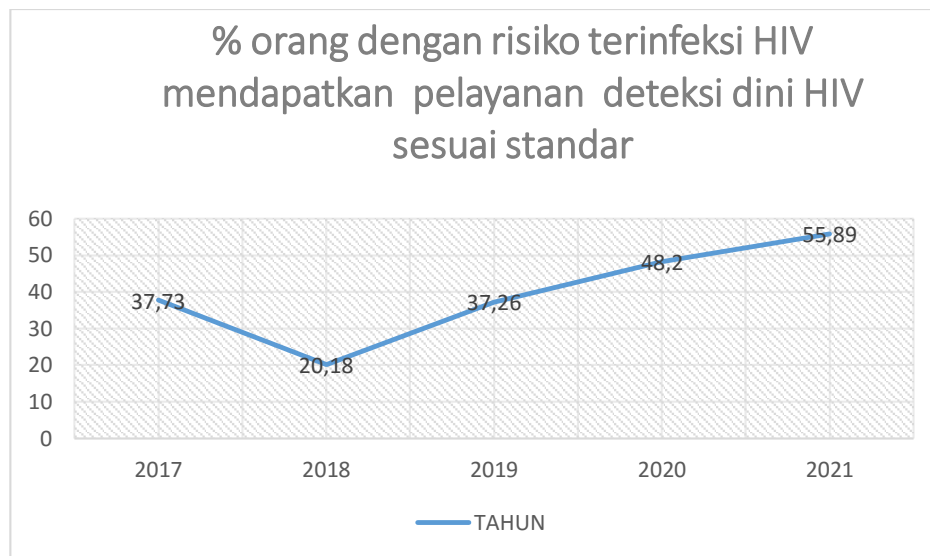
Rendahnya capaian ini disebabkan oleh beberapa hal:

1. Belum semua Puskesmas melakukan screening terhadap populasi berisiko HIV (terutama ibu hamil dan pasien TB), belum melakukan pencatatan dan pelaporan secara offline dan melaporkan secara online. Hal ini disebabkan karena keterbatasan tenaga di Puskesmas terutama Analis Laboratorium.
2. Masih banyaknya ibu hamil dan pasien TB yang menolak untuk di screening HIV karena menganggap mereka tidak mengidap penyakit berbahaya itu.
3. Belum semua Faskes swasta melakukan screening terhadap populasi berisiko (Ibu hamil dan pasien TB) sedangkan ibu hamil dan pasien TB banyak yang berobat ke Faskes swasta.
4. Baru RSUD dan 5 RS swasta diantara 25 rumah sakit yang sudah bekerjasama dengan dinas kesehatan dalam melakukan screening terhadap populasi berisiko HIV.

Sedangkan capaian untuk populasi kunci (WTS, LSL, waria) dapat mencapai angka 100% bahkan lebih karena dapat dilaksanakan

secara mobile walaupun berada di lokasi layanan yang tidak dapat memeriksa HIV. Capaian pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV di Kabupaten Karawang tahun 2017-2021 digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1
Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi Virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV)



Sumber: Seksi Pencegahan dan pengendalian Penyakit Menular, 2021

Indikator Kinerja 13. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

Pemerintah Kabupaten mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh penderita hipertensi sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerjanya.

Sasarannya adalah penduduk usia 15 tahun ke atas. Penderita hipertensi esensial atau hipertensi tanpa komplikasi memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar; dan upaya promosi kesehatan melalui modifikasi gaya hidup di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). Penderita hipertensi dengan komplikasi (jantung, stroke dan penyakit ginjal kronis, diabetes melitus) perlu dirujuk ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut (FKTL) yang mempunyai kompetensi untuk penanganan komplikasi.

Standar pelayanan kesehatan penderita hipertensi adalah:

1. Mengikuti Panduan Praktik Klinik Bagi Dokter di FKTP

2. Pelayanan kesehatan sesuai standar diberikan kepada penderita Hipertensi di FKTP
3. Pelayanan kesehatan hipertensi sesuai standar meliputi: pemeriksaan dan monitoring tekanan darah, edukasi, pengaturan diet seimbang, aktifitas fisik, dan pengelolaan farmakologis.
4. Pelayanan kesehatan berstandar ini dilakukan untuk mempertahankan tekanan darah pada <140/90 mmHg untuk usia di bawah 60 th dan <150/90 mmHg untuk penderita 60 tahun ke atas dan untuk mencegah terjadinya komplikasi jantung, stroke, diabetes melitus dan penyakit ginjal kronis.
5. Selama menjalani pelayanan kesehatan sesuai standar, jika tekanan darah penderita hipertensi tidak bisa dipertahankan sebagaimana dimaksud pada poin sebelumnya atau mengalami komplikasi, maka penderita perlu dirujuk ke FKTL yang berkompeten.

Capaian pelayanan kesehatan pada penderita hipertensi dapat dilihat pada tabel dibawah berikut :

Tabel 2.16
Capaian Indikator Kinerja Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hipertensi

Indikator Kinerja sasaran	2020			2021			Kategori	Target Akhir Renstra
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian		
Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hipertensi	100%	24,94%	24,94%	100%	54,24%	54,24%	Kurang	100%

Capaian pelayanan kesehatan penderita hipertensi pada tahun 2021 sebesar 54,24%. Dari total jumlah estimasi penderita hipertensi berdasarkan angka prevalensi Kabupaten dalam kurun waktu satu tahun pada tahun yang sama sebesar 623.205 penduduk hanya 337.541 penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun. Rendahnya capaian pelayanan kesehatan penderita hipertensi ini dikarenakan deteksi dini faktor resiko belum maksimal pandemi Covid 19 masih berlangsung di

tahun 2021, pencatatan dan pelaporan belum terintegrasi dengan jejaring (Klinik, RS dan dokter praktek mandiri). Penderita mengobati diri sendiri dengan obat herbal karena intinya semua penderita hipertensi yang datang atau di temukan oleh petugas kesehatan telah di obati atau dilayani pengobatan sesuai standar. Oleh karena itu perlu meningkatkan jejaring dengan pelayanan kesehatan swasta.

Indikator Kinerja 14. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus

Diabetes melitus diakui pemerintah indonesia sebagai masalah kesehatan masyarakat, dengan konsekuensi bukan hanya pada efek yang tidak dikehendaki, melainkan juga menjadi beban ekonomi pada sistem pelayanan kesehatan. Diabetes melitus merupakan penyakit yang memerlukan pengobatan seumur hidup sehingga diperlukan biaya yang tidak sedikit untuk mengobati penyakit tersebut. Sampai saat ini sebagian masyarakat belum menyadari besar biaya yang akan dikeluarkan bagi seorang penderita DM yang sudah berat dibandingkan bila penganganan tersebut lebih dini.

Tujuan utama manajemen pasien DM adalah mengurangi atau mencegah terjadinya komplikasi dan memperbaiki harapan hidup dan kualitas hidup pasien. Penelitian dan perkembangan obat yang dilakukan memberikan informasi yang dapat diterapkan secara langsung untuk memperbaiki outcome pasien DM, disamping juga intervensi untuk mencegah penyakit DM pada populasi yang beresiko.

Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar bagi penyandang DM dinilai dari persentase penyandang DM yang mendapatkan pelayanan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Pemerintah kabupaten/kota secara bertahap harus membuat rencana aksi untuk bisa menjangkau seluruh penyandang DM di wilayahnya dan mengupayakan agar semua penyandang DM tersebut memperoleh akses terhadap pelayanan kesehatan sesuai standar. Capaian pelayanan kesehatan pada penderita Diabetes Melitus dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.17
Capaian Indikator Kinerja Pelayanan Kesehatan pada Penderita Diabetes Melitus

Indikator Kinerja sasaran	2020			2021			Kategori	Target Akhir Renstra
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian		
Pelayanan Kesehatan pada Penderita Diabetes Melitus	100%	37,86%	37,86%	100%	65,40%	65,40%	Cukup	100%

Berdasarkan data di atas capaian pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus pada tahun 2021 sebesar 65,4 % atau hanya 100.427 penyandang Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dari total 153.547 penduduk penyandang Diabetes Melitus berdasarkan angka prevalensi Diabetes melitus nasional di wilayah kerja Kabupaten Karawang dalam kurun waktu 1 tahun yang sama. Hal ini bisa disebabkan karena deteksi dini faktor resiko DM di Posbindu dan puskesmas belum maksimal, pencatatan dan pelaporan belum terintegrasi dengan jejaring (Klinik, RS dan dokter praktek mandiri) dan keterbatasan alat untuk pemeriksaan Gula darah, ada juga yang mengobati dirinya dengan obat herbal. Capaian tahun 2021 masih belum mencapai target tetapi sudah ada peningkatan dari tahun 2020 maka dari itu perlu dilakukan rencana aksi untuk bisa menjangkau semua penderita Diabetes Melitus agar mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di fasilitas kesehatan dan jaringannya.

Indikator Kinerja 15. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat

Kesehatan jiwa adalah kondisi seseorang untuk dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial sehingga seseorang tersebut menyadari kemampuan diri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif serta mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya.

Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat yaitu setiap ODGJ berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai

standar. Pelayanan ODGJ diberikan oleh perawat dan dokter Puskesmas di wilayah kerjanya, bertujuan meningkatkan kesehatan jiwa ODGJ berat (psikotik) dan mencegah terjadinya kekambuhan dan pemasungan.

Pelayanan kesehatan jiwa pada ODGJ berat meliputi :

1. Edukasi dan evaluasi tentang: tanda dan gejala gangguan jiwa, kepatuhan minum obat dan informasi lain terkait obat, mencegah tindakan pemasungan, kebersihan diri, sosialisasi, kegiatan rumah tangga dan aktivitas bekerja sederhana, dan/atau
2. Tindakan kebersihan diri ODGJ berat

Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan ODGJ berat dinilai dengan jumlah ODGJ berat (psikotik) di wilayah kerjanya yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa promotif preventif sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun. Capaian pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.18
Capaian Indikator Kinerja Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat

Indikator Kinerja sasaran	2020			2021			Kategori	Target Akhir Renstra
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian		
Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	100%	69,54%	69,54%	100%	60,01%	60,01%	Cukup	100%

Capaian Pelayanan Kesehatan pada penderita Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat pada tahun 2021 mencapai 60,01% (1.982 orang) dari target 100 % (3.303 orang). Hal ini dikarenakan penjangkaran deteksi dini ODGJ belum maksimal, terbatasnya SDM yang terlatih untuk penanganan ODGJ berat, kerjasama lintas sektor belum maksimal , obat obatan terbatas , belum terbentuknya tim TPKJM, kurangnya dukungan keluarga dan kepedulian masyarakat terhadap penderita ODGJ, masih kurangnya sarana RS rujukan rawat inap di daerah untuk penanganan penderita ODGJ (merujuk

Penderita keluar daerah Karawang ke RSMM Bogor, RSJ Cimahi Bandung, dan RSJ Grogol), dan Pencatatan/pelaporan belum terintegrasi dengan jejaring (Klinik, RS dan dokter praktek mandiri).

Indikator Kinerja 16. Persentase Puskesmas Rawat Inap yang Dibangun

Dalam rangka mengembangkan layanan kesehatan dan mendekatkan akses pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah berupaya mengembangkan fungsi layanan puskesmas yakni puskesmas non perawatan dan puskesmas perawatan (rawat inap). Puskesmas rawat inap didefinisikan sebagai puskesmas yang dilengkapi ruangan tambahan dan fasilitas untuk menyelamatkan pasien gawat darurat dan tindakan yang diberikan adalah tindakan operatif terbatas dan rawat inap sementara (Effendi, 2009). Rawat inap pasien dilakukan paling sedikit 24 jam perawatan.

Puskesmas Perawatan adalah Puskesmas yang berdasarkan Surat Keputusan Bupati atau Walikota menjalankan fungsi perawatan dan untuk menjalankan fungsinya diberikan tambahan ruangan dan fasilitas rawat inap yang sekaligus merupakan pusat rujukan antara (Departemen Kesehatan RI, 2007).

Puskesmas perawatan (rawat inap) berfungsi sebagai pusat rujukan pasien yang gawat darurat sebelum dibawa ke rumah sakit. Tindakan operatif terbatas seperti kecelakaan lalu lintas, persalinan dengan penyulit dan penyakit lain yang bersifat gawat darurat. Puskesmas perawatan sebagai puskesmas rawat inap tingkat pertama memberikan pelayanan kesehatan yang meliputi observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dengan tinggal di ruang rawat inap puskesmas (Kepmenkes nomor 28/MENKES/SK/IX/2008).

Capaian indikator kinerja jumlah puskesmas rawat inap yang dibangun dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.19
Capaian Indikator Kinerja Persentase Puskesmas Rawat Inap tiap Kecamatan

Indikator Kinerja sasaran	2020			2021			Kategori	Target Akhir Renstra
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian		
Persentase Puskesmas Rawat Inap tiap Kecamatan	90%	83,33%	92,59%	100%	83,33%	83,33%	Sangat Baik	100%

Berdasarkan tabel di atas capaian indikator kinerja Persentase Puskesmas Rawat Inap tiap Kecamatan pada tahun 2021 adalah 86,67% (26 puskesmas rawat inap di 25 Kecamatan) dari total 30 Kecamatan di Kabupaten Karawang. Indikator ini merupakan bagian dari target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk membangun puskesmas rawat inap tiap Kecamatan.

Pada tahun anggaran 2021 dilaksanakan pembangunan puskesmas rawat inap di 5 Kecamatan, antara lain Puskemas Majalaya, Puskesmas Telukjambe, Puskesmas Plawad, Puskesmas Purwasari dan Puskesmas Pasirukem dengan sumber anggaran APBD II. Sehingga capaian indikator kinerja Persentase Puskesmas Rawat Inap tiap Kecamatan pada tahun 2022 sudah mencapai

2.2.3 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2021

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap indikator kinerja tahun 2021 diperoleh capaian kinerja dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.20
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	Target Akhir Renstra	Capaian Tahun 2021 terhadap Target Akhir Renstra
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Jaminan Kesehatan	Persentase Masyarakat Karawang yang Mempunyai Asuransi Kesehatan	95%	88,54%	93,20%	Sangat Baik	95%	93,20%

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	Target Akhir Renstra	Capaian Tahun 2021 terhadap Target Akhir Renstra
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Tradisional dan Akreditasi	Persentase Puskesmas terakreditasi	100%	100%	100%	Sangat Baik	100%	100%
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Keluarga dan Gizi	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100%	92,42%	92,42%	Sangat Baik	100%	92,42%
4		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	100%	99,17%	99,17%	Sangat Baik	100%	99,17%
5		Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	100%	100%	100%	Sangat Baik	100%	100%
6		Persentase Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar	100%	81,68%	81,68%	Baik	100%	81,68%
7		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	73,86%	73,86%	Baik	100%	73,86%
8		Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	59,40%	59,40%	Cukup	100%	59,40%
9		Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	63,34%	63,34%	Cukup	100%	63,34%

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	Target Akhir Renstra	Capaian Tahun 2021 terhadap Target Akhir Renstra
10	Meningkatnya Kualitas Surveilans dan Imunisasi	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	100%	75,10%	75,10%	Baik	100%	75,10%
11	Meningkatnya Kualitas Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100%	60,49%	60,49%	Cukup	100%	60,49%
12		Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100%	55,89%	55,89%	Cukup	100%	55,89%
13	Meningkatnya Kualitas Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tidak Menular dan Kesehatan Jiwa	Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	54,24%	54,24%	Kurang	100%	54,24%
14		Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	65,40%	65,40%	Cukup	100%	65,40%
15		Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100%	60,01%	60,01%	Cukup	100%	60,01%
16	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Umum dan Kepegawaian	Persentase Puskesmas Rawat Inap tiap Kecamatan	90%	83,33%	83,33%	Sangat Baik	100%	83,33%

Secara keseluruhan dari 16 (enam belas) indikator kinerja yang ditetapkan maka kriteria pencapaian indikator kinerja sebagai berikut

:

- Sangat Baik : 6 indikator kinerja (37,50%)
- Baik : 3 indikator kinerja (18,75%)
- Cukup : 6 indikator kinerja (37,50%)
- Kurang : 1 indikator kinerja (6,25%)

2.2.4 Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Pemerintah Kabupaten Karawang menyusun rencana pencapaian SPM yang memuat target tahunan pencapaian SPM dengan mengacu pada batas waktu pencapaian SPM sesuai dengan Peraturan/Keputusan Menteri. Rencana pencapaian SPM dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD).

Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, yang selanjutnya disingkat SPM Bidang Kesehatan merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam penyediaan pelayanan kesehatan yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Capaian SPM bidang kesehatan Kabupaten Karawang terlihat dalam tabel 2.21.

Tabel 2.21
Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal Dinas Kesehatan
Kab. Karawang

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	Target Akhir Renstra
1	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	100%	38.284	92,42	Sangat Baik	100%
2	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	100%	39.210	99,17	Sangat Baik	100%
3	Presentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan	100%	39.027	100,00	Sangat Baik	100%

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	Target Akhir Renstra
	kesehatan bayi baru lahir sesuai standar					
4	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar	100%	118.564	81,68	Baik	100%
5	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	70.544	73,86	Baik	100%
6	Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	927.833	59,44	Cukup	100%
7	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standard	100%	164.008	66,83	Cukup	100%
8	Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	337.541	54,16	Cukup	100%
9	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100.427	65,40	Cukup	100%
10	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan	100%	1.982	60,01	Cukup	100%

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	Target Akhir Renstra
	kesehatan jiwa sesuai standar					
11	Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100%	14.853	60,09	Cukup	100%
12	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100%	28.744	55,83	Cukup	100%

Berdasarkan tabel di atas capaian indikator SPM Bidang Kesehatan tidak dapat mencapai target yang telah ditetapkan dalam Permenkes. Hal ini disebabkan adanya pandemic Covid-19 yang menyebabkan pembatasan kegiatan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan pemerintah/swasta serta adanya refocusing anggaran untuk pencegahan dan penanganan Covid-19 sehingga ketercapaian target indikator SPM Bidang Kesehatan tidak maksimal. Selain itu masih kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan dasar dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar di Puskesmas serta masih rendahnya pemahaman tenaga kesehatan dalam memahami maupun memberikan pelayanan SPM Bidang kesehatan sesuai standar membuat capaian tidak maksimal.

a. Capaian Indikator SPM 1 : Persentase Ibu Hamil

Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar

Pelayanan Kesehatan Masa Hamil yang kemudian disebut pelayanan antenatal (ANC) terpadu adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan sejak terjadinya masa konsepsi hingga sebelum mulainya proses persalinan yang komprehensif dan berkualitas. Pelayanan ini bertujuan untuk memenuhi hak setiap ibu hamil untuk memperoleh pelayanan antenatal yang komprehensif dan berkualitas sehingga ibu hamil dapat menjalani kehamilan dan persalinan dengan pengalaman yang bersifat positif serta melahirkan

bayi yang sehat dan berkualitas. Pengalaman yang bersifat positif adalah pengalaman yang menyenangkan dan memberikan nilai tambah yang bermanfaat bagi ibu hamil dalam menjalankan perannya sebagai perempuan, istri dan ibu.

Pernyataan standar pelayanan minimal kesehatan ibu hamil adalah setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar. Pemerintah Daerah tingkat kabupaten/kota wajib memberikan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar kepada semua ibu hamil di wilayah kerja tersebut dalam kurun waktu satu tahun. Pelayanan antenatal yang sesuai standar meliputi standar kuantitas dan standar kualitas.

Pemenuhan standar kuantitas menurut PERMENKES No. 4 tahun 2019 adalah kunjungan 4 kali selama periode kehamilan (K4) dengan ketentuan :

- 1 kali pada trimester pertama
- 1 kali pada trimester kedua
- 2 kali pada trimester ketiga

Namun menurut PERMENKES No. 21 tahun 2021 tentang penyelenggaraan pelayanan kesehatan masa sebelum hamil, masa hamil, persalinan, dan masa sesudah melahirkan, pelayanan kontrasepsi, dan pelayanan kesehatan seksual, indikator yang digunakan untuk menggambarkan akses ibu hamil terhadap pelayanan masa hamil adalah cakupan K1 (kunjungan pertama). Sedangkan indikator untuk menggambarkan kualitas layanan adalah cakupan K4-K6 (kunjungan ke-4 sampai ke-6) dan kunjungan selanjutnya apabila diperlukan.

diperlukan.

1. Kunjungan pertama (K1)

K1 adalah kontak pertama ibu hamil dengan tenaga kesehatan yang mempunyai kompetensi, untuk mendapatkan pelayanan terpadu dan komprehensif sesuai standar. Kontak pertama harus dilakukan sedini mungkin pada trimester pertama, sebaiknya sebelum minggu ke-8.

2. Kunjungan ke-4 (K4)

K4 adalah kontak ibu hamil dengan tenaga kesehatan yang mempunyai kompetensi, untuk mendapatkan pelayanan

antenatal terpadu dan komprehensif sesuai standar selama kehamilannya minimal 4 kali dengan distribusi waktu : 1 kali pada trimester ke-1 (0-12 minggu), 1 kali pada trimester ke-2 (>12 minggu-24 minggu) dan 2 kali pada trimester ke-3 (>24 minggu sampai kelahirannya).

3. Kunjungan ke-6 (K6)

K6 adalah kontak ibu hamil dengan tenaga kesehatan yang mempunyai kompetensi, untuk mendapatkan pelayanan antenatal terpadu dan komprehensif sesuai standar, selama kehamilannya minimal 6 kali dengan distribusi waktu : 2 kali pada trimester ke-1 (0-12 minggu), 1 kali pada trimester ke-2 (>12 minggu-24 minggu), dan 3 kali pada trimester ke-3 (>24 minggu sampai kelahirannya). Kunjungan antenatal bisa lebih dari 6 (enam) kali sesuai kebutuhan dan jika ada keluhan, penyakit atau gangguan kehamilan. Ibu hamil harus kontak dengan dokter minimal 2 kali, 1 kali di trimester 1 dan 1 kali di trimester 3.

Pelayanan ANC oleh dokter pada trimester 1 (satu) dengan usia kehamilan kurang dari 12 minggu atau dari kontak pertama, dokter melakukan skrining kemungkinan adanya faktor risiko kehamilan atau penyakit penyerta pada ibu hamil termasuk didalamnya pemeriksaan ultrasonografi (USG). Pelayanan ANC oleh dokter pada trimester 3 (tiga) dilakukan perencanaan persalinan, termasuk pemeriksaan ultrasonografi (USG) dan rujukan terencana bila diperlukan.

Pemenuhan standar kualitas meliputi pelayanan ANC berkualitas dengan pelayanan 10T terdiri dari :

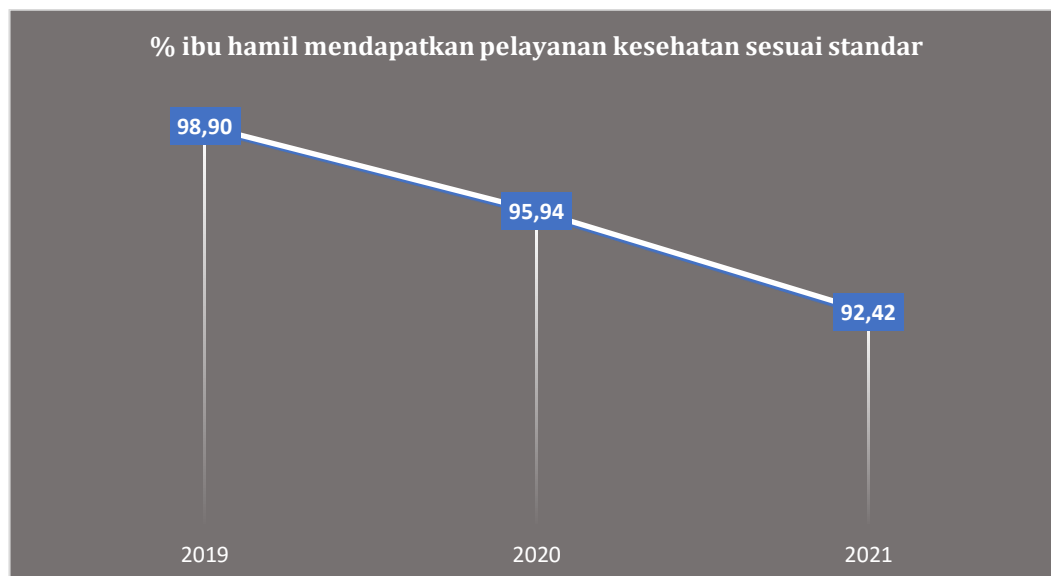
1. **Timbang** berat badan dan ukur tinggi badan
2. Ukur **tekanan darah**
3. Nilai **status gizi** (ukur lingkaran lengan atas/LILA)
4. Ukur **tinggi puncak rahim** (fundus uteri)
5. **Tentukan** presentasi janin dan denyut jantung janin (DJJ)
6. Skrining status imunisasi **tetanus** dan berikan imunisasi tetanus difteri (Td) bila diperlukan
7. Pemberian **tablet tambah darah** minimal 90 tablet selama masa kehamilan

8. **Tes laboratorium:** tes kehamilan, kadar hemoglobin darah, golongan darah, tes triple eliminasi (HIV, Sifilis dan Hepatitis B,) malaria pada daerah endemis. Tes lainnya dapat dilakukan sesuai indikasi seperti glukosa-protein urin, gula darah sewaktu, sputum Basil Tahan Asam (BTA), kusta, malaria daerah non endemis, pemeriksaan feses untuk kecacingan, pemeriksaan darah lengkap untuk deteksi dini talasemia dan pemeriksaan lainnya.
9. **Tata laksana**/penanganan kasus sesuai kewenangan.
10. **Temu wicara** (konseling) dan penilaian kesehatan jiwa. Informasi yang disampaikan saat konseling minimal meliputi hasil pemeriksaan, perawatan sesuai usia kehamilan dan usia ibu, gizi ibu hamil, kesiapan mental, mengenali tanda bahaya kehamilan, persalinan, dan nifas, persiapan persalinan, kontrasepsi pascapersalinan, perawatan bayi baru lahir, inisiasi menyusui dini, ASI eksklusif.

Berdasarkan target Kementerian Kesehatan bahwa semua ibu hamil harus mendapatkan pelayanan kesehatan selama kehamilan yaitu 100% . Pelayanan kesehatan ibu hamil (antenatal) adalah pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan untuk ibu selama masa kehamilannya yang dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan antenatal. Dengan indikator ini dapat diketahui cakupan pelayanan antenatal secara lengkap (memenuhi standar pelayanan dan menepati waktu yang ditetapkan), yang menggambarkan tingkat perlindungan ibu hamil di suatu wilayah, disamping menggambarkan kemampuan manajemen ataupun kelangsungan program KIA.

Hasil capaian cakupan pelayanan Kesehatan ibu hamil (K4) di Kabupaten Karawang periode Januari – Desember 2021 mengalami sedikit penurunan apabila dibandingkan capaian tahun 2020. Target yang telah dicapai tahun 2021 adalah 92,42% (dari sasaran proyeksi 41.423 ibu hamil baru 38.284 ibu hamil yang mendapatkan pelayanan Kesehatan K4).

Grafik 2.11
Capaian Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil



Pada grafik di atas dapat dilihat bahwa terdapat trend penurunan capaian pada pelayanan Kesehatan ibu hamil (K4). Seperti diketahui bahwa tahun 2020 dan tahun 2021 ditetapkan adanya pandemi Covid-19 dan terjadi lonjakan kasus yang signifikan pada bulan Juni-Agustus 2021. Hal ini secara tidak langsung sangat mempengaruhi pelayanan program baik dari kuantitas maupun kualitas. Adanya pandemi Covid-19 secara tidak langsung membuat perubahan pola dan standar teknis dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat khususnya ibu hamil. Beberapa hal yang mempengaruhi pelaksanaan pelayanan ibu hamil pada masa pandemi Covid-19 diantaranya :

1. Penerapan PPKM dan adaptasi kebiasaan baru pada pelayanan KIA memberikan pengaruh yang sangat signifikan terhadap pelayanan Kesehatan ibu hamil
2. Menurunnya akses pelayanan kesehatan ibu hamil dengan adanya pembatasan layanan
3. Adanya perubahan kebijakan dalam pelayanan baik preventif, promotive baik pelayanan dalam gedung maupun luar gedung sehingga mempengaruhi akses dan kualitas pelayanan,
4. Keterbatasan SDM, dimana SDM yang melaksanakan pelayanan KIA hampir semuanya dialih tugaskan atau berbagi tugas dalam kesiapsiagaan dalam penanggulangan Covid-19 secara tidak

langsung mempengaruhi dalam hal pelayanan Kesehatan ibu hamil

5. Menurunnya antusias komunitas pelayanan KIA khususnya ibu hamil dalam pemeriksaan kehamilan karena adanya factor kekhawatiran kasus lonjakan Covid-19
6. Pelayanan Kesehatan ibu hamil baru dilihat dari segi kuantitas 4 kali pemeriksaan, belum semua dilakukan pemeriksaan sesuai standar kualitas 10T
7. Belum optimalnya system surveilans Kesehatan ibu melalui PWS KIA
8. Kurangnya tingkat kepatuhan bidan dalam sistim pencatatan dan pelaporan melalui kartu ibu dan kohort ibu untuk memantau perkembangan pelayanan ibu hamil
9. Kurangnya pemanfaatan buku KIA sebagai sarana edukasi bagi ibu hamil
10. Keterbatasan koordinasi antara Kabupaten dengan SDM pemberi layanan KIA puskesmas karena terfokus pada tracing, tracking dan traetmen penanganan Covid-19
11. Refocusing anggaran tahun 2021 sehingga menghambat rencana kegiatan program

Beberapa upaya telah dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan akses pelayanan ibu hamil diantaranya :

- a) Meningkatkan kapasitas bidan desa dalam pengisian dan pemanfaatan buku KIA sebagai sarana edukasi ibu hamil dan surveilans Kesehatan ibu hamil
- b) Meningkatkan kapasitas PMB (praktek mandiri bidan) dalam pengisian dan pemafaatan buku KIA sebagai sarana edukasi ibu hamil dan surveilans Kesehatan ibu hamil
- c) Meningkatkan kapasitas dokter puskesmas dalam memberikan pelayanan ANC berkualitas pada ibu hamil pada pelayanan ANC K6
- d) Meningkatkan kapasitas bidan dalam memberikan pelayanan ANC terpadu
- e) Koordinasi rutin dengan SDM pemberi layanan KIA di tingkat puskesmas terkait pemberian layanan kesehatan ibu hamil pada

masa pandemi Covid-19 melalui kunjungan rumah untuk mendekatkan akses pelayanan

- f) Pelaksanaan pelayanan ibu hamil harus tetap dilaksanakan dengan protocol kesehatan dengan tetap berpedoman dengan adaptasi kebiasaan baru

Sebagai langkah berikutnya untuk tetap mempertahankan serta meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan ibu hamil di tahun 2022, beberapa rencana kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- 2) Melanjutkan beberapa kegiatan program yang telah dilaksanakan pada tahun 2021
- 3) Melakukan inovasi melalui “Manteng Sawaka” yaitu Monitoring dan Pendampingan Intensif KIA Terintegrasi untuk Penyelamatan Ibu dan BBL ke 50 puskesmas
- 4) Bekerja sama dan memaksimalkan peran SpoG konsulen ahli untuk melakukan pembinaan puskesmas terkait pelayanan ibu hamil normal, ibu hamil resti dan komplikasi, serta peningkatan kapasitas dan peran dokter puskesmas dalam memberikan layanan ANC terpadu untuk pemenuhan kuantitas pelayanan ibu hamil baik K1, K4 maupun K6
- 5) Melakukan revitalisasi program P4K di desa
- 6) Meningkatkan kapasitas dan peran para pemberi layanan KIA dalam surveilans pelayanan Kesehatan ibu hamil melalui E-kohort KIA
- 7) Meningkatkan peran kepala puskesmas sebagai penentu kebijakan di tingkat layanan dasar dalam meningkatkan kualitas layanan ibu hamil baik pada masa pandemi Covid-19 maupun pada masa normal
- 8) Meningkatkan koordianasi dengan LP dan LS dalam penguatan implementasi pelayanan Kesehatan ibu hamil
- 9) Penguatan teknis mentor puskesmas
- 10) Memperkuat koordinasi dan kerjasama dengan lintas program yang terkait dengan pelayanan ibu hamil baik di tingkat kabupaten maupun di tingkat puskesmas untuk meningkatkan akses dan kualitas ANC 10T

- 11) Revitalisasi dan peningkatan kualitas kelas ibu hamil pada era pandemi Covid-19
- 12) Meningkatkan kembali peran kader dan posyandu
- 13) Berkoordinasi dengan seluruh RS di Kabupaten Karawang dalam kesiapsiagaan penyelamatan ibu dan BBL serta persiapan menghadapi lonjakan kasus ibu hamil terkonfirmasi Covid-19 sehingga ibu hamil dapat memperoleh penanganan sesuai standar
- 14) Revitalisasi dan memperbaiki system rujukan SiJariEMAS
- 15) Percepatan vaksinasi Covid-19 bagi ibu hamil
- 16) Meningkatkan pemeriksaan PCR bagi ibu hamil menggunakan metode TCM
- 17) Memenuhi ketersediaan standar dan jumlah sarana prasarana pendukung pelayanan Kesehatan ibu hamil sesuai Permenkes No. 4 tahun 2019 yaitu vaksin TT (1 amp sejumlah sasaran ibu hamil/10, tablet tambah darah (Fe) 90 tablet sejumlah ibu hamil, alat deteksi resiko kehamilan (pemeriksaan HB, golongan darah, glukoprotein urin sejumlah ibu hamil, kartu ibu sejumlah ibu hamil, dan buku KIA sesuai kebutuhan.

b. Capaian Indikator SPM 2 : Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Persalinan Sesuai Standar

Pelayanan Kesehatan Persalinan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang ditujukan pada ibu sejak dimulainya persalinan hingga 6 (enam) jam sesudah melahirkan. Persalinan adalah sebuah proses melahirkan bayi oleh seorang ibu yang sangat dinamis. Meskipun 85% persalinan akan berjalan tanpa penyulit namun komplikasi dapat terjadi selama proses persalinan. Oleh karena itu, pendekatan yang dilakukan adalah setiap tempat penyelenggara pelayanan persalinan harus memiliki sumber daya dan kemampuan untuk mengenali sedini mungkin dan memberikan penanganan awal bagi penyulit yang timbul.

Pelayanan persalinan adalah sebuah sistem penyelenggaraan pelayanan persalinan yang dapat mengakomodasi kebutuhan ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir untuk mendapatkan luaran kehamilan yang optimal. Sistem tersebut akan memperhatikan tata kelola klinis, tata kelola program dan tata kelola manajemen

dalam penyelenggaraan pelayanan persalinan di dalam jejaring pelayanan persalinan di tingkat kabupaten/kota dan pengampu di tingkat regional.

Persalinan dilakukan sesuai dengan standar persalinan normal atau standar persalinan komplikasi. Standar persalinan normal adalah Asuhan Persalinan Normal (APN) sesuai standard dan memenuhi persyaratan, meliputi:

- a. Dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan
- b. Tenaga adalah tim penolong persalinan, terdiri dari dokter, bidan dan perawat, apabila ada keterbatasan akses dan tenaga medis, persalinan dilakukan oleh tim minimal 2 orang tenaga kesehatan yang terdiri dari bidan-bidan, atau bidan-perawat
- c. Tim penolong mampu melakukan tata laksana awal penanganan kegawatdaruratan maternal dan neonatal

Sedangkan standar persalinan komplikasi mengacu pada Buku Saku Pelayanan Kesehatan Ibu di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dan rujukan. Pelayanan persalinan harus memenuhi 7 (tujuh) aspek yang meliputi :

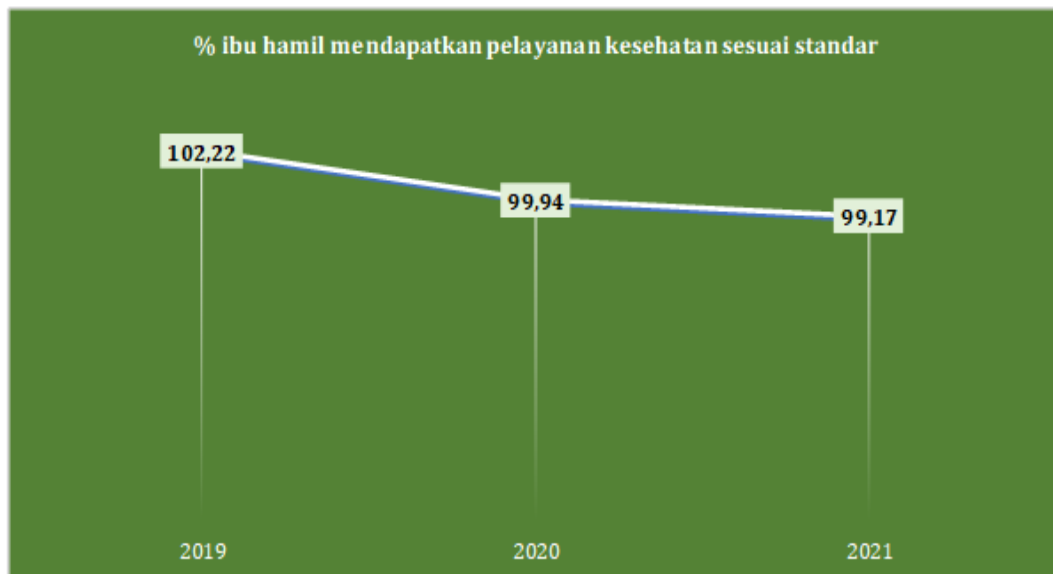
- a) membuat keputusan klinik
- b) asuhan sayang ibu dan sayang bayi, termasuk Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dan resusitasi bayi baru lahir
- c) pencegahan infeksi
- d) pencegahan penularan penyakit dari ibu ke anak
- e) persalinan bersih dan aman
- f) pencatatan atau rekam medis asuhan persalinan
- g) rujukan pada kasus komplikasi ibu dan bayi baru lahir

Dengan indikator ini dapat diperkirakan proporsi persalinan yang ditangani oleh tenaga kesehatan dan kemampuan fasilitas kesehatan dalam melakukan pertolongan persalinan sesuai standar yang menggambarkan kemampuan manajemen program KIA dalam pertolongan persalinan sesuai standar. Berdasarkan target Kementerian Kesehatan bahwa semua ibu bersalin harus mendapatkan pelayanan kesehatan yaitu 100%.

Hasil capaian cakupan pelayanan Kesehatan ibu bersalin di Kabupaten Karawang periode Januari – Desember 2021 mengalami

sedikit penurunan apabila dibandingkan capaian tahun 2020. Target yang telah dicapai tahun 2021 adalah 99,17% (dari sasaran proyeksi 39.540 ibu hamil baru 39.210 ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan sesuai standar.

Grafik 2.12
Capaian Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin



Pada gambar di atas dapat dilihat bahwa terjadi sedikit penurunan pada indikator pelayanan kesehatan ibu bersalin. Beberapa hal yang mempengaruhi pelayanan kesehatan ibu bersalin adalah sebagai berikut :

- 1) Masih ada persalinan tidak sesuai standar yaitu di non fasilitas kesehatan (rumah pasien) sebanyak 88 persalinan, hal ini sudah cukup ada perbaikan dibandingkan tahun 2020 masih ada 290 persalinan di non fasilitas kesehatan
- 2) Masih ada faktor sosial budaya di daerah tertentu yang mempercayakan persalinan ke dukun paraji selain karena factor sulitnya akses ke fasilitas Kesehatan
- 3) Kurang nya upaya promosi di daerah tertentu terkait pembinaan dan kemitraan dukun paraji

Beberapa upaya yang telah dilaksanakan persalinan sesuai standar sebagai berikut :

- a) Peningkatan kapasitas tenaga Kesehatan terutama di PONEC dalam pertolongan persalinan sesuai standar baik persalinan normal maupun dengan komplikasi/ kegawatdaruratan

- b) Revitalisasi peran PONED sebagai fasilitas Kesehatan tingkat pertama dalam melaksanakan pertolongan persalinan
- c) Melaksanakan penyeliaan fasilitatif ke fasilitas kesehatan di lingkungan puskesmas baik bidan desa, BPM maupun klinik tentang kelengkapan sarana dan prasarana pertolongan persalinan sebagai dasar pendukung terpenuhinya syarat minimal fasilitas kesehatan yang direkomendasikan untuk melakukan pertolongan persalinan
- d) Peningkatan kapasitas SDM pemberi layanan KIA dalam pemanfaatan E-kohort
- e) Pada masa pandemi Covid-19, melaksanakan skrining ibu hamil pada trimester 3 dan saat menjelang persalinan dengan PCR

Sebagai langkah berikutnya untuk tetap mempertahankan serta meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan ibu bersalin di tahun 2022, beberapa rencana kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- a) Melanjutkan kegiatan program tahun sebelumnya
- b) Penyeliaan fasilitatif oleh tim mentor ke puskesmas PONED
- c) Memenuhi ketersediaan standar dan jumlah sarana prasarana pendukung pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai Permenkes No. 4 tahun 2019 yaitu formulir partograf sejumlah sasaran ibu bersalin sebagai instrument. pemantaun persalinan, kartu ibu terintegrasi dengan ibu hamil sebagai form rekam medis bagi ibu, buku KIA terintegrasi dengan ibu hamil
- d) Monitoring dan sosialisasi tentang leveling persalinan ke fasilitas pelayanan kesehatan dari tingkat dasar dan lanjut
- e) Meningkatkan peran system rujukan SiJariEMAS untuk penanganan kasus kegawatdaruratan selama proses persalinan

c. Capaian Indikator SPM 3 : Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar

Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan neonatal esensial sesuai standar. Pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota wajib memberikan pelayanan kesehatan bayi baru

lahir sesuai standar kepada semua bayi usia 0-28 hari di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Pelayanan Kesehatan bayi sesuai standar meliputi standar kuantitas dan standar kualitas.

Pelayanan kesehatan bayi baru lahir dimulai segera setelah bayi lahir sampai 28 hari. Pelayanan pasca persalinan pada bayi baru lahir dimulai sejak usia 6 jam sampai 28 hari.

Standar kuantitas pelayanan neonatal esensial dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali kunjungan, yang meliputi:

- 1 (satu) kali pada umur 6-48 jam; (KN 1)
- 1 (satu) kali pada umur 3-7 hari (KN 2); dan
- 1 (satu) kali pada umur 8-28 hari. (KN 3)

Sedangkan standar kualitas meliputi perawatan neonatal esensial saat lahir meliputi:

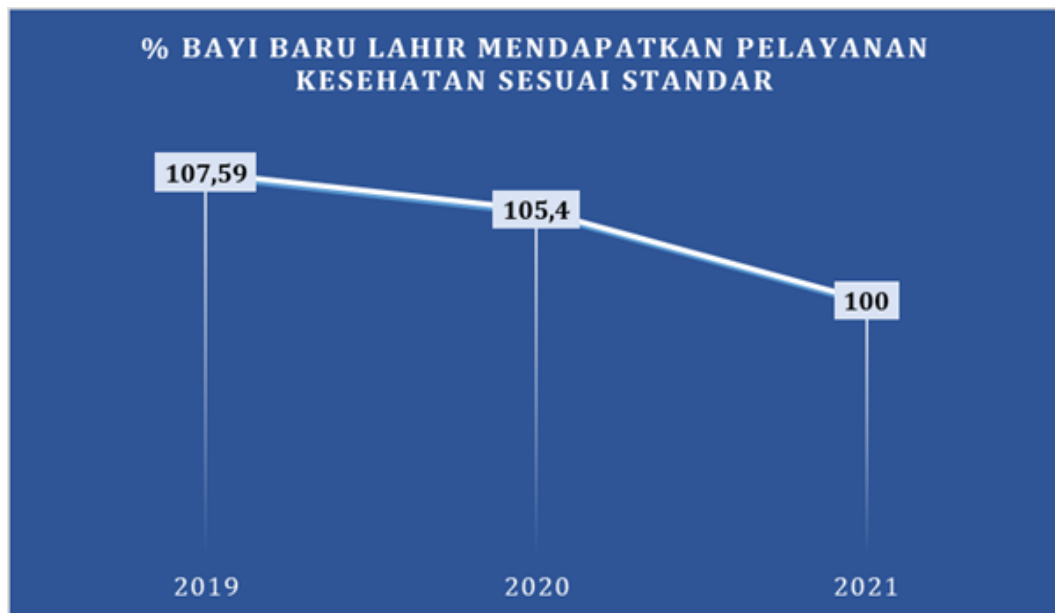
- Pemotongan dan perawatan tali pusat
- Inisiasi menyusui dini (IMD)
- Injeksi vitamin K1
- Pemberian salep/ tetes mata antibiotic
- Pemberian imunisasi (injeksi vaksin HB0)

Pelayanan neonatal esensial setelah lahir meliputi :

- Konseling perawatan bayi baru lahir dan ASI eksklusif
- Memeriksa kesehatan dengan menggunakan pendekatan MTBM
- Pemberian vitamin K1 bagi yang lahir tidak di fasilitas pelayanan kesehatan atau belum mendapatkan injeksi vitamin K1
- Imunisasi hepatitis B injeksi untuk bayi usia < 24 jam yang lahir tidak di tolong tenaga kesehatan
- Penanganan dan rujukan kasus neonatal komplikasi

Capaian cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir di Kabupaten Karawang tahun 2021 sebesar 100% yang artinya semua bayi baru lahir mendapatkan pelayanan sesuai standar. Tahun 2019-2020 dilihat dari presentase realisasi cakupan pelayanan kesehatan neonatus sudah melebihi target SPM 100%. Capaian melebihi 100% karena jumlah sasaran riil dan capaian riil di puskesmas lebih besar bila dibandingkan dengan sasaran proyeksi yang perhitungannya sudah ditentukan oleh BPS.

Grafik 2.13
Capaian Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar



Hal ini menunjukkan bahwa efektifitas serta kualitas pelayanan kesehatan neonatus juga cukup berhasil karena hampir seluruh bayi yang lahir mendapatkan kunjungan neonatal lengkap. Akan tetapi perlu menjadi bahan pertimbangan bahwa efektifitas dan kualitas pelayanan kesehatan neonatal masih perlu dimaksimalkan lagi karena beberapa program belum berjalan optimal diantaranya :

- a) Inisiasi menyusu dini (IMD) belum dilaksanakan secara optimal
- b) Konseling asi eksklusif belum dilaksanakan secara optimal
- c) Pemeriksaan kesehatan bayi baru lahir belum menggunakan pendekatan MTBM
- d) Skrining hipotiroid kongenital belum dilaksanakan secara optimal di semua puskesmas
- e) Kurangnya kepatuhan bidan dalam mengisi kartu bayi dan kohort

Beberapa rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan bayi baru lahir adalah sebagai berikut :

- 1) Peningkatan kapasitas SDM pemberi layanan KIA dalam pemanfaatan E-Kohort
- 2) Perencanaan kebutuhan alat dan bahan habis pakai untuk skrining hipotiroid kongenital
- 3) Optimalisasi layanan IMD dan asi eksklusif

- 4) Optimalisasi pelaksanaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir pada masa pandemic Covid-19 yaitu dengan melakukan kunjungan rumah dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan
- 5) Peningkatan pengawasan pada bayi resiko tinggi dan komplikasi
- 6) Kalakarya MTBM bagi bidan
- 7) Memenuhi ketersediaan standar dan jumlah sarana prasarana pendukung pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai Permenkes No. 4 tahun 2019 yaitu vaksin HB0, vitamin K injeksi, salep mata, formulir bayi baru lahir, formulir MTBM dan buku KIA

d. Capaian Indikator SPM 4 : Persentase Balita Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

Setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah Tingkat Kabupaten/Kota wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada semua balita di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun. Pelayanan kesehatan balita berusia 0-59 bulan sesuai standar meliputi:

- Pelayanan kesehatan balita sehat.
- Pelayanan kesehatan balita sakit.

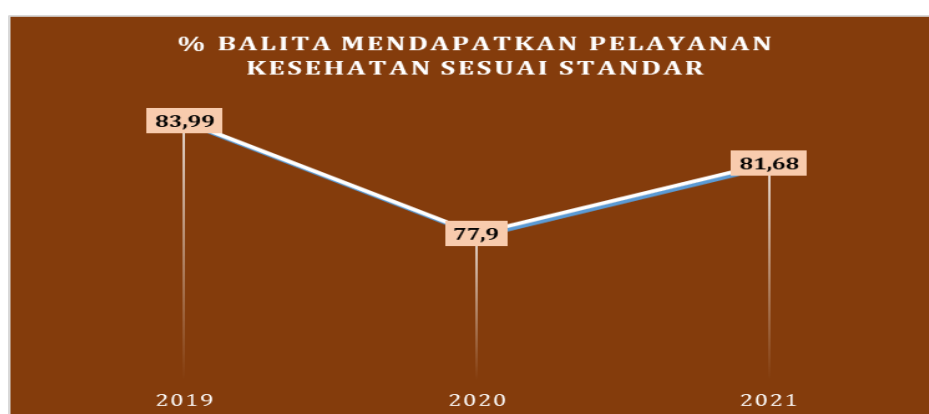
Pelayanan kesehatan balita sehat adalah pelayanan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan menggunakan buku KIA dan skrining tumbuh kembang, meliputi:

- a) Pelayanan kesehatan Balita usia 0 -11 bulan:
 - 1) Penimbangan minimal 8 kali setahun.
 - 2) Pengukuran panjang/tinggi badan minimal 2 kali/tahun.
 - 3) Pemantauan perkembangan minimal 2 kali/tahun.
 - 4) Pemberian kapsul vitamin A pada usia 6-11 bulan 1 kali setahun.
 - 5) Pemberian imunisasi dasar lengkap.
- b) Pelayanan kesehatan Balita usia 12-23 bulan:
 - 1) Penimbangan minimal 8 kali setahun (minimal 4 kali dalam kurun waktu 6 bulan).
 - 2) Pengukuran panjang/tinggi badan minimal 2 kali/tahun.

- 3) Pemantauan perkembangan minimal 2 kali/ tahun.
 - 4) Pemberian kapsul vitamin A sebanyak 2 kali setahun.
 - 5) Pemberian Imunisasi Lanjutan.
- c) Pelayanan kesehatan Balita usia 24-59 bulan:
- 1) Penimbangan minimal 8 kali setahun (minimal 4 kali dalam kurun waktu 6 bulan).
 - 2) Pengukuran panjang/tinggi badan minimal 2 kali/tahun.
 - 3) Pemantauan perkembangan minimal 2 kali/ tahun.
 - 4) Pemberian kapsul vitamin A sebanyak 2 kali setahun.
- d) Pemantauan perkembangan balita.
- e) Pemberian kapsul vitamin A.
- f) Pemberian imunisasi dasar lengkap.
- g) Pemberian imunisasi lanjutan.
- h) Pengukuran berat badan dan panjang/tinggi badan.
- i) Edukasi dan informasi.

Pelayanan kesehatan balita sakit adalah pelayanan balita menggunakan pendekatan manajemen terpadu balita sakit (MTBS).

Grafik 2.14
Capaian Balita Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar



Pada gambar diatas dapat dilihat bahwa capaian pelayanan balita sangat fluktuatif. Pada tahun 2020 awal pandemi terjadi penurunan cakupan, namun tahun 2021 cakupan meningkat Kembali dengan penyesuaian kegiatan pelayanan melalui adaptasi kebiasaan baru.

Namun dari beberapa indikator pelayanan Kesehatan balita masih ada yang belum optimal dilaksanakan yaitu

- 1) Pemantauan perkembangan balita melalui SDIDTK sulit dilaksanakan dengan kondisi pandemi Covid-19 karena belum semua tenaga terlatih dan membutuhkan waktu yang cukup lama
- 2) MTBS belum berjalan optimal karena belum semua tenaga terlatih dan update MTBS
- 3) Posyandu tidak berjalan optimal seperti sebelum pandemi Covid-19
- 4) Kelas ibu balita tidak dilaksanakan oleh seluruh puskesmas
- 5) Kurangnya kepatuhan tenaga kesehatan dalam mengisi kartu balita dan kohort
- 6) Kurangnya pemanfaatan buku KIA

Upaya tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan

Kesehatan balita adalah sebagai berikut :

- a) Melanjutkan rencana program tahun sebelumnya
- b) Meningkatkan kerjasama dengan lintas sektor dan lintas program dalam meningkatkan pemberdayaan posyandu
- c) Mendorong puskesmas untuk melaksanakan kelas ibu balita melalui perencanaan dana BOK puskesmas
- d) Orientasi kalakarya MTBS bagi tenaga kesehatan di puskesmas
- e) Orientasi SDIDTK update bagi tenaga kesehatan di puskesmas
- f) Meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan pemberi layanan KIA dalam pemanfaatan E-kohort
- g) Meningkatkan kapasitas bidan dalam pemanfaatan buku KIA
- h) Meningkatkan kapasitas kader dan guru PAUD dalam melaksanakan SDIDTK
- i) Memenuhi ketersediaan standar dan jumlah sarana prasarana pendukung pelayanan kesehatan balita sesuai Permenkes No. 4 tahun 2019 yaitu formulir KPSP, formulir DDTK, buku KIA, vitamin A merah biru, vaksin imunisasi dasar, vaksin imunisasi lanjutan.

e. Capaian Indikator SPM 5 : Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

Anak usia sekolah merupakan sasaran untuk pelaksanaan program kesehatan yang muda dijangkau karena terorganisir dengan baik yaitu berada di sekolah/ madrasah melalui penjangkauan kesehatan dan pemeriksaan berkala, yang dibutuhkan untuk mendukung proses belajar. Penjangkauan kesehatan merupakan suatu prosedur pemeriksaan kesehatan yang dilakukan untuk mendeteksi dini masalah kesehatan yang dapat mengganggu proses belajar dan tumbuh kembang anak sehingga dapat ditindaklanjuti dengan segera.

Penjangkauan kesehatan dan pemeriksaan berkala anak usia sekolah dan remaja merupakan salah satu indikator standar pelayanan minimal bidang kesehatan yang dilaksanakan di sekolah/ madrasah dan di luar sekolah berdasarkan wilayah Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun.

Pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar sesuai standar meliputi :

- a. Skrining kesehatan.
- b. Tindaklanjut hasil skrining kesehatan.

Pelayanan ini dilakukan pada anak kelas 1 sampai dengan kelas 7 di sekolah minimal satu kali dalam satu tahun ajaran dan usia 7 sampai 15 tahun diluar sekolah.

Pelaksanaan skrining kesehatan anak usia pendidikan dasar dilaksanakan di satuan pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTS) dan di luar satuan pendidikan dasar seperti di pondok pesantren, panti/LKSA, lapas/LPKA dan lainnya, meliputi:

- a) Penilaian status gizi.
- b) Penilaian tanda vital.
- c) Penilaian kesehatan gigi dan mulut.
- d) Penilaian ketajaman indera

Tindaklanjut hasil skrining kesehatan meliputi:

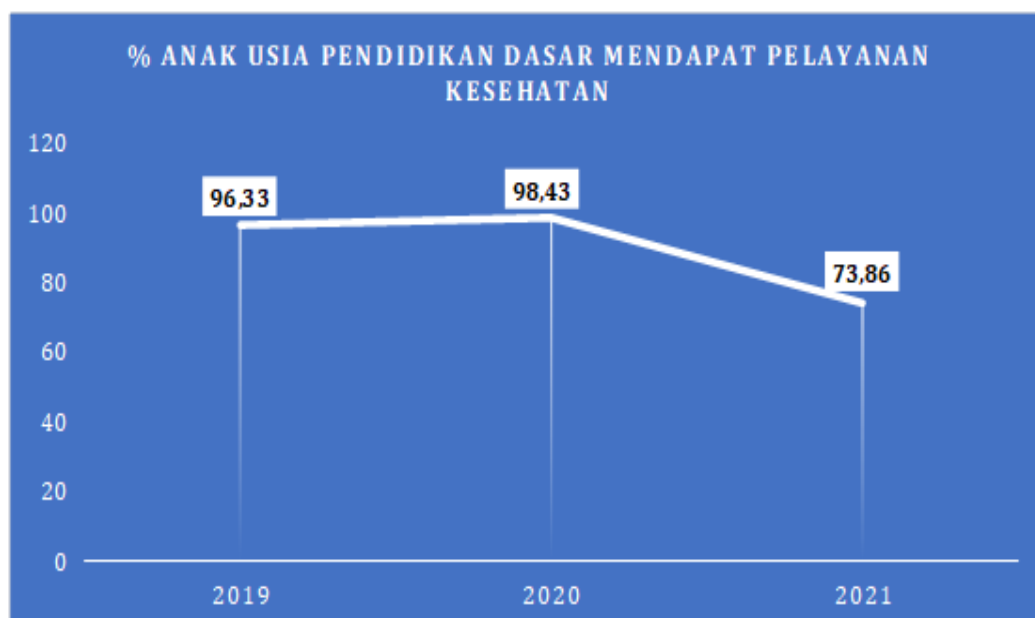
- a. Memberikan umpan balik hasil skrining kesehatan
- b. Melakukan rujukan jika diperlukan
- c. Memberikan penyuluhan kesehatan

Menghadapi masa pandemi Covid 19 Kemenkes telah mengeluarkan Pedoman untuk memodifikasi cara pelaksanaan pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja dalam rangka mencegah penularan dan menjamin setiap anak mendapatkan haknya atas

pelayanan kesehatan esensial. Langkah-langkah dalam menerapkan penyesuaian pelayanan kesehatan bagi kelompok usia sekolah dan remaja di puskesmas selama masa pandemi COVID-19, antara lain :

- a) Pelaksanaan penjangkaran kesehatan harus mengutamakan kesehatan dan keselamatan anak dan tenaga kesehatan. Perlu dipertimbangkan risiko penularan Covid 19 di sekolah.
- b) Kegiatan penjangkaran didorong untuk dilaksanakan secara daring dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi menggunakan Google form
- c) Pada daerah dimana satuan pendidikan melakukan PTM, penjangkaran dapat dipertimbangkan dilakukan secara tatap muka dengan menerapkan protokol kesehatan, yaitu :
 - Pengaturan jadwal, jaga jarak, menggunakan masker, CTPS, pemeriksaan di ruang dengan ventilasi yang baik
 - Waktu pemeriksaan diupayakan sesingkat mungkin.

Grafik 2.15
Capaian Anak Usia Pendidikan Dasar Mendapatkan Pelayanan Kesehatan



Dari gambar diatas terlihat capaian pelayanan kesehatan pada anak usia pendidikan dasar terjadi penurunan. Dari jumlah sasaran 95.514 yang sudah mendapat pelayanan sebanyak 70.544 (73,86%)

dan 24.970 anak belum mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Hal ini dikarenakan :

1. Puncak masa pandemi Covid 19 terjadi pada saat pertengahan tahun 2021, sehingga sekolah tidak boleh melakukan Pembelajaran Tatap Muka (PTM), sehingga siswa melakukan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Hal ini menyulitkan petugas dalam melakukan pelayanan penjarangan. Sesuai surat edaran Kementrian Kesehatan tentang pelaksanaan penjarangan pada masa pandemi, penjarangan dapat dilakukan melalui daring yaitu melalui Google Form. Hal ini sudah dilakukan tetapi banyak sekali kendala yang dihadapi, antara lain kendala sinyal, kuota, orang tua/ anak yang tidak menguasai teknologi informasi & kurangnya respon siswa & orang tua, sehingga data yang diperoleh tidak maksimal dan tidak sesuai standar.
2. Tidak adanya pembiayaan penjarangan kesehatan pada Biaya Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas pada tahun 2021
3. Pelaksanaan penjarangan melalui daring ini tidak diimbangi dengan baiknya kualitas hasil penjarangan karena petugas tidak dapat melakukan pemeriksaan pada sasaran secara langsung. Data yang diperoleh dari hasil penjarangan juga belum dianalisa oleh programmer di Puskesmas, sehingga hasilnya belum disampaikan ke lintas program & lintas sektor, terutama ke pihak sekolah.

Upaya tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan Kesehatan pada anak usia pendidikan dasar adalah sebagai berikut :

1. Melanjutkan rencana program tahun sebelumnya
2. Pendampingan penjarangan bagi petugas Anak Usia Sekolah & Remaja (AUSREM)
3. Meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan dalam melakukan penjarangan kesehatan melalui pemanfaatan Google Form penjarangan
4. Memasukan pembiayaan penjarangan kesehatan ke dalam perencanaan dana BOK puskesmas
5. Mendorong para petugas AUSREM untuk melakukan analisa hasil penjarangan

f. Capaian Indikator SPM 6 : Persentase warga negara usia 60 tahun Keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar

Pembinaan kesehatan usia lanjut terutama ditujukan pada upaya peningkatan kesehatan dan kemampuan untuk mandiri agar selama mungkin tetap produktif dan berperan aktif dalam pembangunan, serta dilaksanakan secara terpadu dengan meningkatkan peran lintas sektor dan lintas program.

Setiap warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan usia lanjut sesuai standar. Pelayanan kesehatan dilakukan dalam bentuk edukasi dan skrining usia lanjut. Pelayanan kesehatan usia lanjut sesuai standar meliputi:

- Edukasi perilaku hidup bersih dan sehat yang dilaksanakan di fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau UKBM dan/atau kunjungan rumah
- Skrining faktor resiko penyakit menular dan penyakit tidak menular
- Tindaklanjut hasil skrining kesehatan meliputi melakukan rujukan jika diperlukan serta memberikan penyuluhan kesehatan.
- Konseling lansia, pendamping lansia

Tabel 2.22
Capaian Indikator Kinerja Pelayanan Kesehatan Usia Produktif

Indikator Kinerja sasaran	2020			2021			Kategori	Target Akhir Renstra
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian		
Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	100%	12,26%	12,26%	100%	59,40%	59,40%	Cukup	100%

Berdasarkan tabel diatas capaian Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif pada tahun 2021 baru mencapai 59,4% atau dari sasaran 1.560.975 penduduk usia 15-59 tahun, hanya 927.833 orang yang mendapat pelayanan kesehatan. Mengingat capaian yang masih kecil

maka diperlukan rencana strategis tahun depan untuk menjangkau setiap warga umur 15-59 tahun untuk berkunjung ke fasilitas pelayanan kesehatan dan jaringannya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan usia produktif. Perlu juga dilakukan analisis sebab-sebab mereka belum berkunjung adalah apakah persoalan pandemi, akses, sudah memeriksa sendiri atau tidak mau mendapat pelayanan skrining. Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota harus mempunyai strategi untuk menjangkau seluruh warga negara usia 15-59 tahun agar seluruhnya dapat memperoleh Pelayanan skrining sesuai standar setahun sekali.

Hasil capaian cakupan pelayanan kesehatan pada usia lanjut (>60 tahun) adalah dari sasaran proyeksi sebesar 245,426 hanya 155,450 orang yang mendapatkan pelayanan skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun atau 63,34 dari target 100%.

Beberapa faktor yang menyebabkan cakupan program lansia belum mencapai target adalah:

- Adanya Pandemi Covid 19, sehingga pelaksanaan screening untuk lansia tidak efektif.
- Pencatatan dan pelaporan hasil pelayanan kesehatan lansia dari puskesmas belum berjalan dengan baik, sebagian besar puskesmas tidak melaporkan setiap bulan
- Laporan belum lengkap masuk ke penanggungjawab program lansia
- Belum optimalnya pemahaman tentang definisi operasional pelayanan kesehatan lansia
- Sering adanya pergantian petugas lansia atau petugas memegang lebih dari 1 program sehingga menghambat kesinambungan program
- Program lansia di puskesmas belum dijadikan program prioritas padahal sebagai salah satu indikator SPM bidang kesehatan
- Kurangnya sarana dan prasarana penunjang pemeriksaan kesehatan lansia di puskesmas

Upaya yang telah dilakukan baru pembinaan secara rutin ke 50 puskesmas dengan menggunakan daftar ceklis dan instrumen

penilaian puskesmas santun lansia. Namun upaya yang telah dilakukan belum optimal dalam meningkatkan kualitas pelayanan lansia maka perlu dilanjutkan di tahun berikutnya.

g. Capaian Indikator SPM 7 : Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar

Setiap warga negara Indonesia usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan skrining kesehatan sesuai standar pada warga negara usia 15–59 tahun di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

Pelayanan skrining kesehatan usia 15–59 tahun dilakukan di Puskesmas dan jaringannya (Posbindu PTM) serta fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang bekerja sama dengan pemerintah daerah.

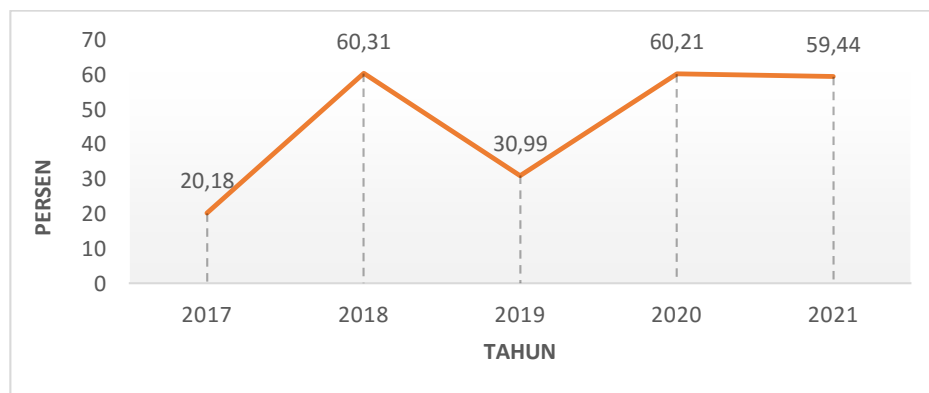
Pelayanan skrining kesehatan usia 15–59 tahun meliputi:

- a. Deteksi kemungkinan obesitas dilakukan dengan memeriksa tinggi badan dan berat badan serta lingkar perut.
- b. Deteksi hipertensi dengan memeriksa tekanan darah sebagai pencegahan primer.
- c. Deteksi kemungkinan diabetes melitus menggunakan tes cepat gula darah.
- d. Deteksi gangguan mental emosional dan perilaku.
- e. Pemeriksaan ketajaman penglihatan
- f. Pemeriksaan ketajaman pendengaran
- g. Deteksi dini kanker dilakukan melalui pemeriksaan payudara klinis dan pemeriksaan IVA khusus untuk wanita usia 30–59 tahun.

Capaian Pelayanan Kesehatan pada usia Produktif pada tahun 2021 baru mencapai 59.44 % atau dari sasaran 1.560.975 penduduk usia 15-59 tahun, baru sekitar 927.833 orang yang mendapat pelayanan kesehatan. Mengingat capaian yang masih kecil maka diperlukan rencana strategis tahun depan untuk menjangkau setiap warga umur 15-59 tahun untuk berkunjung ke fasilitas pelayanan kesehatan dan jaringannya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan usia produktif. Perlu juga dilakukan analisis sebab-sebab mereka

belum berkunjungapakah persoalan sosialisasi, akses, sudah memeriksa sendiri atau tidak mau mendapat pelayanan skrining. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota harus mempunyai strategi untuk menjangkau seluruh warga negara usia 15-59 tahun agar seluruhnya dapat memperoleh pelayanan skrining sesuai standar setahun sekali.

Grafik 2.16
Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Tahun 2017 s.d 2021



Sumber : Seksi P2PTM Dinas Kesehatan 2021

h. Capaian Indikator SPM 8 : Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar

Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh penderita hipertensi sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerjanya.

Sasarannya adalah penduduk usia 15 tahun ke atas. Penderita hipertensi esensial atau hipertensi tanpa komplikasi memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar; dan upaya promosi kesehatan melalui modifikasi gaya hidup di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). Penderita hipertensi dengan komplikasi (jantung, stroke dan penyakit ginjal kronis, diabetes melitus) perlu dirujuk ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut (FKTL) yang mempunyai kompetensi untuk penanganan komplikasi.

Standar pelayanan kesehatan penderita hipertensi adalah:

- a. Mengikuti Panduan Praktik Klinik Bagi Dokter di FKTP
- b. Pelayanan kesehatan sesuai standar diberikan kepada penderita Hipertensi di FKTP

- c. Pelayanan kesehatan hipertensi sesuai standar meliputi: pemeriksaan dan monitoring tekanan darah, edukasi, pengaturan diet seimbang, aktifitas fisik, dan pengelolaan farmakologis.
- d. Pelayanan kesehatan berstandar ini dilakukan untuk mempertahankan tekanan darah pada <140/90 mmHg untuk usia di bawah 60 th dan <150/90 mmHg untuk penderita 60 tahun ke atas dan untuk mencegah terjadinya komplikasi jantung, stroke, diabetes melitus dan penyakit ginjal kronis.

Selama menjalani pelayanan kesehatan sesuai standar, jika tekanan darah penderita hipertensi tidak bisa dipertahankan sebagaimana dimaksud pada poin sebelumnya atau mengalami komplikasi, maka penderita perlu dirujuk ke FKTL yang berkompeten.

Tabel 2.23
Capaian Indikator Kinerja Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hipertensi

Indikator Kinerja sasaran	2020			2021			Kategori	Target Akhir Renstra
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian		
Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hipertensi	100%	24,94%	24,94%	100%	54,24%	54,24%	Kurang	100%

Capaian pelayanan kesehatan penderita hipertensi pada tahun 2021 sebesar 54,24%. Dari total jumlah estimasi penderita hipertensi berdasarkan angka prevalensi Kabupaten dalam kurun waktu satu tahun pada tahun yang sama sebesar 623.205 penduduk hanya 337.541 penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun. Rendahnya capaian pelayanan kesehatan penderita hipertensi ini dikarenakan deteksi dini faktor resiko belum maksimal pandemi Covid 19 masih berlangsung di tahun 2021, pencatatan dan pelaporan belum terintegrasi dengan jejaring (Klinik, RS dan dokter praktek mandiri). Penderita mengobati diri sendiri dengan obat herbal karena intinya semua penderita hipertensi yang datang atau di temukan oleh petugas kesehatan telah

di obati atau dilayani pengobatan sesuai standar. Oleh karena itu perlu meningkatkan jejaring dengan pelayanan kesehatan swasta.

i. Capaian Indikator SPM 9 : Persentase penderita DM mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar

Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh penyandang diabetes melitus sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerjanya. Penduduk yang ditemukan menderita DM atau penyandang DM memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar dan upaya promotif dan preventif di FKTP. Penduduk yang ditemukan menderita DM atau penyandang DM dengan komplikasi perlu dirujuk ke fasilitas kesehatan rujukan untuk penanganan selanjutnya.

Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar bagi penyandang DM dinilai dari persentase penyandang DM yang mendapatkan pelayanan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

Pemerintah kabupaten/kota secara bertahap harus membuat rencana aksi untuk bisa menjangkau seluruh penyandang DM di wilayahnya dan mengupayakan agar semua penyandang DM tersebut memperoleh akses terhadap pelayanan kesehatan sesuai standar. Secara nasional saat ini baru 30 persen penyandang DM yang terdiagnosis dan mendapatkan pelayanan kesehatan.

Secara nasional saat ini baru 30 persen penyandang DM yang terdiagnosis dan mendapatkan pelayanan kesehatan.

Capaian Pelayanan Kesehatan pada penderita Diabetes Mellitus usia > 15 tahun pada tahun 2021 sudah mencapai mencapai 65,40 atau baru 100,427 orang yang mendapat pelayanan kesehatan diabetes mellitus sesuai standar dari total sasaran 153,547 orang.

Capaian tahun 2021 sudah melebihi target maka dari itu perlu perlu terus dilakukan penjaringan agar capaian ditahun berikutnya tidak mengalami penurunan.

Tabel 2.24
Capaian Indikator Kinerja Pelayanan Kesehatan pada Penderita Diabetes Melitus

Indikator Kinerja sasaran	2020			2021			Kategori	Target Akhir Renstra
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian		
Pelayanan Kesehatan pada Penderita Diabetes Melitus	100%	37,86%	37,86%	100%	65,40%	65,40%	Cukup	100%

Berdasarkan data di atas capaian pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus pada tahun 2021 sebesar 65,4 % atau hanya 100.427 penyandang Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dari total 153.547 penduduk penyandang Diabetes Melitus berdasarkan angka prevalensi Diabetes melitus nasional di wilayah kerja Kabupaten Karawang dalam kurun waktu 1 tahun yang sama. Hal ini bisa disebabkan karena deteksi dini faktor resiko DM di Posbindu dan puskesmas belum maksimal, pencatatan dan pelaporan belum terintegrasi dengan jejaring (Klinik, RS dan dokter praktek mandiri) dan keterbatasan alat untuk pemeriksaan Gula darah, ada juga yang mengobati dirinya dengan obat herbal. Capaian tahun 2021 masih belum mencapai target tetapi sudah ada peningkatan dari tahun 2020 maka dari itu perlu dilakukan rencana aksi untuk bisa menjangkau semua penderita Diabetes Melitus agar mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di fasilitas kesehatan dan jaringannya.

j. Capaian Indikator SPM 10 : Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar

Pelayanan promotif preventif yang bertujuan meningkatkan kesehatan jiwa ODGJ berat (psikotik) dan mencegah terjadinya kekambuhan dan pemasungan. Pelayanan kesehatan jiwa pada ODGJ berat diberikan oleh perawat dan dokter Puskesmas di wilayah kerjanya.

Pelayanan kesehatan jiwa pada ODGJ berat meliputi:

- a. Edukasi dan evaluasi tentang: tanda dan gejala gangguan jiwa, kepatuhan minum obat dan informasi lain terkait obat, mencegah tindakan pemasangan, kebersihan diri, sosialisasi, kegiatan rumah tangga dan aktivitas bekerja sederhana, dan/atau
- b. Tindakan kebersihan diri ODGJ berat

Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan ODGJ berat dinilai dengan jumlah ODGJ berat (psikotik) di wilayah kerjanya yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa promotif preventif sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun.

Tabel 2.25
Capaian Indikator Kinerja Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat

Indikator Kinerja sasaran	2020			2021			Kategori	Target Akhir Renstra
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian		
Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	100%	69,54%	69,54%	100%	60,01%	60,01%	Cukup	100%

Sumber : Seksi P2PTM Dinas Kesehatan 2021

Capaian Pelayanan Kesehatan pada penderita Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat pada tahun 2021 mencapai 60,01% (1.982 orang) dari target 100 % (3.303 orang). Hal ini dikarenakan penjangkaran deteksi dini ODGJ belum maksimal, terbatasnya SDM yang terlatih untuk penanganan ODGJ berat, kerjasama lintas sektor belum maksimal , obat obatan terbatas , belum terbentuknya tim TPKJM, kurangnya dukungan keluarga dan kepedulian masyarakat terhadap penderita ODGJ, masih kurangnya sarana RS rujukan rawat inap di daerah untuk penanganan penderita ODGJ (merujuk Penderita keluar daerah Karawang ke RSMM Bogor, RSJ Cimahi Bandung, dan RSJ Grogol), dan Pencatatan/pelaporan belum terintegrasi dengan jejaring (Klinik, RS dan dokter praktek mandiri).

k. Capaian Indikator SPM 11 : Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar

Setiap orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar. Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai kewajiban untuk

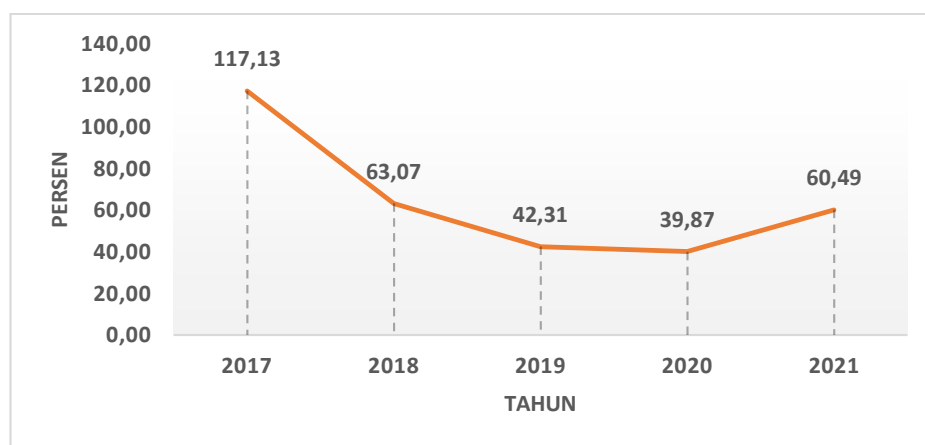
memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh orang dengan TB sebagai upaya pencegahan di wilayah kerjanya. Pelayanan Tuberkulosis Sesuai Standar adalah pelayanan kesehatan diberikan kepada seluruh orang dengan TB yang dilakukan oleh tenaga kesehatan sesuai kewenangannya di FKTP (puskesmas dan jaringannya) dan di FKTL baik pemerintah maupun swasta. Pengobatan dengan menggunakan Obat Anti Tuberkulosis (OAT) dengan panduan OAT standar.

Gejala Utama TB adalah batuk selama 2 minggu atau lebih. Batuk dapat diikuti dengan dahak bercampur darah, batuk darah, sesak nafas, badan lemas, nafsu makan menurun, berat badan menurun, berkeringat malam hari tanpa aktifitas fisik dan badan meriang lebih dari satu bulan.

Kegiatan Promotif dan preventif antara lain penemuan kasus secara dini, penemuan kasus secara aktif, pemberian KIE untuk pencegahan penularan dengan penerapan etika batuk, pengendalian faktor risiko dan pemberian obat pencegahan.

Prinsip pelayanan TBC adalah penemuan orang dengan TBC sedini mungkin, ditatalaksana sesuai standar sekaligus pemantauan hingga sembuh atau "TOSS TB" (Temukan, Obati Sampai Sembuh).

Tabel 2.26
Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Tahun 2021



Sumber : Seksi P2PM Dinas Kesehatan 2021

Berdasarkan tabel diatas capaian indikator kinerja pelayanan kesehatan orang terduga Tuberculosis mengalami peningkatan dibandingkan tahun lalu, dari 39,87% menjadi 60,49%, tetapi belum

mencapai target yang ditetapkan pada akhir renstra. Dibawah ini merupakan trend capaian indikator kinerja pelayanan kesehatan dengan TB di Kabupaten Karawang sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2021.

Realisasi capaian tahun 2021 yang belum mencapai target yang ditetapkan, ini disebabkan karena:

- Perubahan definisi operasional SPM TB. Pada tahun 2017 sampai 2018 disebutkan bahwa SPM TB didefinisikan sebagai pelayanan terhadap orang dengan TB (penderita terdiagnosa TB) sedangkan mulai pada tahun 2019 dalam Permenkes No. 9 berubah menjadi pelayanan terhadap orang terduga TB (terduga TB/ belum terdiagnosa TB). Hal ini menyebabkan perhitungan capaian kinerja SPM TB menjadi jauh berbeda tiap tahunnya.
- Perubahan perhitungan target SPM TB dimana pada tahun 2016 sampai 2018 masih mengacu pada perhitungan beban RAD TB Kemenkes, sedangkan mulai pada tahun 2019 menggunakan perhitungan yang mengacu pada Permenkes No.9 tahun 2019, sehingga hal ini mengakibatkan terjadinya perbedaan hasil capaian kinerja SPM TB yang besar setiap tahunnya.
- Belum semua fasilitas kesehatan menyampaikan pelaporan program TB tahun 2021 ke kabupaten melalui pelaporan online SITB, terutama layanan kesehatan swasta baik laporan terduga maupun kasus TB. Untuk diketahui bahwa mulai tahun 2019, beban Tatalaksana TB dibebankan kepada masing-masing fasyankes, bukan lagi berbasis wilayah. Sehingga semua fasyankes harus melaporkan semua kasus TB (*Mandatory Notifcation*), dan perhitungan target setiap fasyankes ditetapkan berdasarkan *template* perhitungan beban kinerja yang sudah diberikan oleh Kemenkes pada tahun 2019 dan berlaku untuk 5 tahun kedepannya. Untuk itu, data capaian program TB, baik SPM maupun indikator program harus memunculkan semua fasyankes yang terlibat dalam tatalaksana TB didalam laporan SPM maupun Profil Kesehatan.
- Masih terdapat 5 RS yang belum memiliki baseline data untuk perhitungan beban target, sehingga capaian kinerja tidak dapat

diperhitungkan dan akan berdampak pada capaian kinerja pelayanan TB

- Kurangnya tenaga petugas di lapangan baik programer maupun analis laboratorium TB untuk melakukan penjangkauan pelayanan orang terduga TB di masyarakat.
- Anggaran program TB bersumber APBD II Tahun 2021 mengalami efisiensi dan *re-focusing* anggaran untuk pencegahan dan penanggulangan Covid-19, dimana hanya ada beberapa kegiatan program yang bisa direalisasikan di akhir tahun sehingga upaya penemuan orang terduga TB menjadi terhambat begitu pula upaya deteksi dini dan penemuan kasus TB.

Selain itu untuk mengukur keberhasilan program tb, ada beberapa indikator kinerja yang harus diukur, seperti di bawah ini :

Tabel 2.27
Realisasi Capaian Kasus Tuberkulosis Kabupaten Karawang Tahun 2021

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	REALISASI	
1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1	Capaian Penemuan Kasus TB Semua Tipe (CDR = Case Detection Rate)	90%	99,53%
		2	Kasus Ternotifikasi (CNR=Case Notification Rate)	241/100.000 Pddk	251,9/100.000 Pddk
		3	Angka Keberhasilan Pengobatan TBSO (TSR TBSO)	90%	48,3%
		4	Capaian Penemuan Kasus TBRO (CDR TBRO)	3% kasus TBSO	

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	REALISASI
5		Angka Keberhasilan Pengobatan TBRO (TSR TBRO)	60%	55,1%

Realisasi capaian tahun 2021 yang masih dibawah target ini disebabkan karena:

- Perubahan definisi operasional SPM TB. Pada tahun 2017 sampai 2018 disebutkan bahwa SPM TB didefinisikan sebagai pelayanan terhadap orang dengan TB (penderita terdiagnosa TB) sedangkan mulai pada tahun 2019 dalam Permenkes No. 9 berubah menjadi pelayanan terhadap orang terduga TB (terduga TB/ belum terdiagnosa TB). Hal ini menyebabkan perhitungan capaian kinerja SPM TB menjadi jauh berbeda tiap tahunnya.
 - Perubahan perhitungan target SPM TB dimana pada tahun 2016 sampai 2018 masih mengacu pada perhitungan beban RAD TB Kemenkes, sedangkan mulai pada tahun 2019 menggunakan perhitungan yang mengacu pada Permenkes No.9 tahun 2019, sehingga hal ini mengakibatkan terjadinya perbedaan hasil capaian kinerja SPM TB yang besar setiap tahunnya.
 - Belum semua fasilitas kesehatan menyampaikan pelaporan program TB triwulan 1-4 tahun 2021 ke kabupaten, terutama layanan kesehatan swasta baik laporan terduga maupun kasus TB. Untuk itu, realisasi capaian ini masih bersifat sementara hingga saat ini tanggal 20 Januari 2022.
 - Adanya pandemi covid 19, tenaga petugas di lapangan baik programmer maupun analis laboratorium TB banyak melakukan kegiatan yang berhubungan dengan covid 19.
- 1. Capaian Indikator SPM 12 : Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar**

Setiap orang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan) mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar.

Pelayanan kesehatan yang diberikan kepada orang dengan risiko terinfeksi HIV sesuai standar meliputi:

- a. Edukasi perilaku berisiko
- b. Skrining

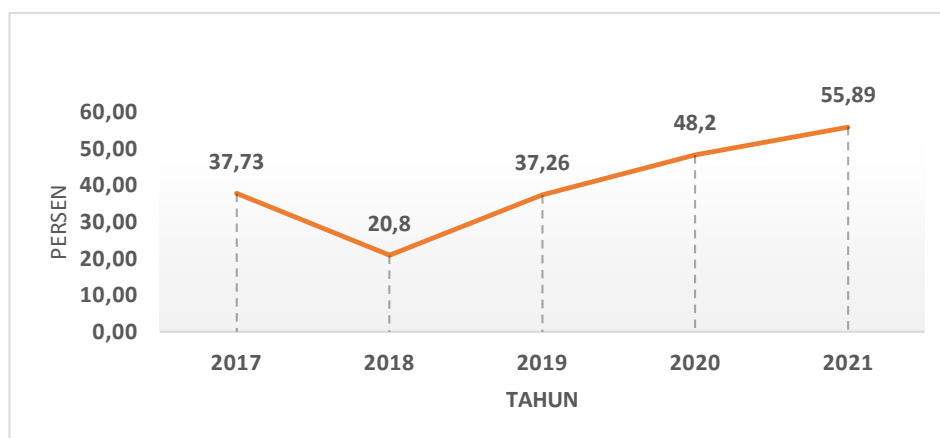
Orang dengan risiko terinfeksi virus HIV yaitu:

- a. Ibu hamil, yaitu setiap perempuan yang sedang hamil.
- b. Pasien TBC, yaitu pasien yang terbukti terinfeksi TBC dan sedang mendapat pelayanan terkait TBC
- c. Pasien Infeksi Menular Seksual (IMS), yaitu pasien yang terbukti terinfeksi IMS selain HIV dan sedang mendapat pelayanan terkait IMS
- d. Penjaja seks, yaitu seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan orang lain sebagai sumber penghidupan utama maupun tambahan, dengan imbalan tertentu berupa uang, barang atau jasa
- e. Lelaki yang berhubungan seks dengan lelaki (LSL), yaitu lelaki yang pernah berhubungan seks dengan lelaki lainnya, sekali, sesekali atau secara teratur apapun orientasi seksnya (heteroseksual, homoseksual atau biseksual)
- f. Transgender/Waria, yaitu orang yang memiliki identitas gender atau ekspresi gender yang berbeda dengan jenis kelamin atau seksnya yang ditunjuk saat lahir, kadang disebut juga transeksual.
- g. Pengguna napza suntik (penasun), yaitu orang yang terbukti memiliki riwayat menggunakan narkotika dan atau zat adiktif suntik lainnya.
- h. Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), yaitu orang yang dalam pembinaan pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM dan telah mendapatkan vonis tetap.

Mekanisme Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia, meliputi:

- a. Penetapan sasaran HIV ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan orang yang berisiko terinfeksi HIV (penderita TBC, IMS, penaja seks, LSL, transgender, WBP, dan ibu hamil).
- b. Edukasi perilaku berisiko dan pencegahan penularan
- c. Skrining dilakukan dengan pemeriksaan Tes Cepat HIV minimal 1 kali dalam setahun.
- d. Melakukan rujukan jika diperlukan.

Tabel 2.28
Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi Virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) Tahun 2017 s.d 2021



Sumber : Seksi P2PM Dinas Kesehatan 2021

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (*Human Immunodeficiency Virus/HIV*) dinilai dari persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar. Capaian Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia tahun 2021 sebesar 55,89 %.

Rendahnya capaian ini disebabkan oleh beberapa hal:

- a. Belum semua Puskesmas melakukan screening terhadap populasi berisiko HIV (terutama ibu hamil dan pasien TB), melakukan pencatatan dan pelaporan secara online. Hal ini disebabkan karena keterbatasan tenaga di Puskesmas terutama Analis Laboratorium.

- b. Masih banyaknya ibu hamil dan pasien TB yang menolak untuk di screening HIV karena menganggap mereka tidak mengidap penyakit berbahaya itu.
- c. Belum semua Faskes swasta melakukan screening terhadap populasi berisiko (Ibu hamil dan pasien TB), melakukan pencatatan dan pelaporan online, sedangkan ibu hamil dan pasien TB banyak yang berobat ke Faskes swasta.

Baru RSUD dan 4 RS swasta diantara 24 rumah sakit yang sudah bekerjasama dengan dinas kesehatan dalam melakukan screening terhadap populasi berisiko HIV Sedangkan capaian untuk populasi kunci (WTS, LSL, waria) dapat mencapai angka 100% bahkan lebih karena dapat dilaksanakan secara mobile walaupun berada di lokasi layanan yang tidak dapat memeriksa HIV.

2.2.5 Capaian Kinerja Keuangan

Salah satu target kinerja yang digunakan dalam mengukur keberhasilan program dan kegiatan adalah prosentase capaian atau realisasi APBD di akhir tahun anggaran, sekaligus dapat menuangkan analisis efisiensi dan efektivitas kinerja yaitu anggaran dan realisasi belanja sebagai wujud upaya pencapaian Tujuan Dinas Kesehatan yang telah ditentukan. Realisasi program kegiatan dan anggaran yang mendukung pencapaian indikator kinerja dan tugas pokok fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.29
Realisasi Program Kegiatan dan Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang Tahun 2021

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		SISA ANGGARAN
				Rp	%	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	77.185.000	77.185.000	77.185.000	100,00	0
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	77.185.000	77.185.000	77.185.000	100,00	0
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	213.255.877.080	241.967.043.350	214.911.882.250	88,82	27.055.161.100
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	213.239.007.080	241.950.173.350	214.896.217.250	88,82	27.053.956.100
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	16.870.000	16.870.000	15.665.000	92,86	1.205.000
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	10.160.000	10.160.000	7.400.000	72,83	2.760.000
	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	10.160.000	10.160.000	7.400.000	72,83	2.760.000
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	20.000.000	53.700.000	52.950.000	98,60	750.000
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	20.000.000	0			0
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	0	53.700.000	52.950.000	98,60	750.000
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.277.435.300	1.310.196.900	1.173.612.354	89,58	136.584.546
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.265.000	21.645.000	10.627.500	49,10	11.017.500
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	67.648.400	333.400.000	324.882.000	97,45	8.518.000
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	94.607.000	94.607.000	67.471.000	71,32	27.136.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	288.548.000	288.548.000	287.718.500	99,71	829.500
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	150.656.900	150.656.900	150.626.900	99,98	30.000

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		SISA ANGGARAN
				Rp	%	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	32.250.000	32.250.000	32.000.000	99,22	250.000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	263.620.000	200.130.000	154.990.000	77,44	45.140.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	367.840.000	188.960.000	145.296.454	76,89	43.663.546
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	450.000.000	450.000.000	100,00	0
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0	450.000.000	450.000.000	100,00	0
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.300.608.000	2.362.786.000	1.809.651.421	76,59	553.134.579
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	21.492.000	21.492.000	19.515.500	90,80	1.976.500
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	975.124.000	1.030.102.000	737.005.921	71,55	293.096.079
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.303.992.000	1.311.192.000	1.053.130.000	80,32	258.062.000
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	642.654.500	884.112.700	800.352.939	90,53	83.759.761
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	344.568.700	344.568.700	285.409.300	82,83	59.159.400
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	58.085.800	99.544.000	96.974.000	97,42	2.570.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	240.000.000	440.000.000	417.969.639	94,99	22.030.361
9	Peningkatan Pelayanan BLUD	233.229.532.870	487.370.426.965	354.264.588.902	72,69	133.105.838.063
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	233.229.532.870	487.370.426.965	354.264.588.902	72,69	133.105.838.063
10	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	54.468.296.464	55.202.157.139	49.783.277.354	90,18	5.418.879.785
	Pembangunan Puskesmas	33.102.499.000	31.563.021.494	28.279.245.811	89,60	3.283.775.683

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		SISA ANGGARAN
				Rp	%	
	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	4.269.533.864	1.779.811.745	1.714.186.745	96,31	65.625.000
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1.026.276.000	1.408.676.300	1.180.990.176	83,84	227.686.124
	Pengadaan Obat, Vaksin	8.878.881.953	11.878.881.953	11.055.732.562	93,07	823.149.391
	Pengadaan Bahan Habis Pakai	7.191.105.647	8.571.765.647	7.553.122.060	88,12	1.018.643.587
11	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota (RSUD & RSKP)	0	107.673.219.000	79.590.423.734	73,92	28.082.795.266
	Pengembangan Rumah Sakit	0	44.358.000.000	29.462.308.435	66,42	14.895.691.565
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	0	3.022.300.000	2.013.410.109	66,62	1.008.889.891
	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	0	350.000.000	344.627.000	98,46	5.373.000
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	0	57.823.175.900	45.742.227.910	79,11	12.080.947.990
	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	0	339.528.600	332.833.765	98,03	6.694.835
	Pengadaan Obat, Vaksin	0	1.180.103.500	1.102.123.915	93,39	77.979.585
	Pengadaan Bahan Habis Pakai	0	600.111.000	592.892.600	98,80	7.218.400
12	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	170.763.831.660	149.319.504.256	114.609.882.747	76,75	34.709.621.509
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	6.290.762.000	6.290.762.000	6.225.422.000	98,96	65.340.000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	4.069.750.500	4.000.674.000	1.034.703.787	25,86	2.965.970.213
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	166.719.500	228.459.000	186.009.000	81,42	42.450.000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	1.400.000	1.400.000	1.400.000	100,00	-
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia	123.842.500	9.360.000	9.360.000	100,00	-
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	59.562.000	55.365.000	49.355.000	89,14	6.010.000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	91.649.000	32.720.000	17.720.000	54,16	15.000.000

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		SISA ANGGARAN
				Rp	%	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	39.590.000	39.590.000	34.970.000	88,33	4.620.000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	29.440.000	73.363.000	72.223.000	98,45	1.140.000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	146.200.000	377.300.000	329.180.000	87,25	48.120.000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	769.930.000	895.280.000	895.280.000	100,00	-
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana	533.526.500	653.363.100	596.087.600	91,23	57.275.500
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1.438.307.500	1.389.892.500	1.169.151.750	84,12	220.740.750
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	107.256.000	114.095.000	107.715.000	94,41	6.380.000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	661.170.500	490.808.000	462.235.800	94,18	28.572.200
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	3.940.000	3.940.000	3.820.000	96,95	120.000
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	115.750.000	1.043.438.000	869.387.920	83,32	174.050.080
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	342.359.000	122.120.000	117.530.000	96,24	4.590.000
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1.502.710.000	651.170.000	566.344.000	86,97	84.826.000
	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	48.638.319.960	76.924.182.056	67.850.363.185	88,20	9.073.818.871
	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	50.820.919.000	0	-	#DIV/0!	
	Operasional Pelayanan Puskesmas	33.691.628.000	36.636.128.000	19.966.511.000	54,50	6.669.617.000
	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	15.050.721.100	10.050.721.100	8.348.716.800	83,07	1.702.004.300
	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	3.055.517.000	3.038.667.000	212.141.405	6,98	2.826.525.595

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		SISA ANGGARAN
				Rp	%	
	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1.402.620.600	4.586.585.000	3.949.265.000	86,10	637.320.000
	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1.610.241.000	1.610.241.000	1.534.990.500	95,33	75.250.500
13	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	379.708.900	379.708.900	379.708.900	100,00	0
	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	379.708.900	379.708.900	379.708.900	100,00	0
14	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaen/Kota	25.954.734.028	28.926.733.728	27.909.344.906	96,48	1.017.388.822
	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	9.720.404.028	9.695.604.028	8.797.479.906	90,74	898.124.122
	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	16.234.330.000	19.231.129.700	19.111.865.000	99,38	119.264.700
15	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaen/Kota (RSKP)	0	12.786.000.000	11.518.550.000	90,09	1.267.450.000
	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	0	12.786.000.000	11.518.550.000	90,09	1.267.450.000
16	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	0	48.229.160.804	29.044.346.514	60,22	19.184.814.290
	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	0	48.229.160.804	29.044.346.514	60,22	19.184.814.290
17	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	10.604.715.000	10.889.130.000	10.491.992.000	96,35	397.138.000
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	10.604.715.000	10.889.130.000	10.491.992.000	96,35	397.138.000

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		SISA ANGGARAN
				Rp	%	
18	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	33.240.000	33.240.000	33.240.000	100,00	0
	Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	33.240.000	33.240.000	33.240.000	100,00	0
19	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	11.604.561.000	11.874.933.000	11.842.053.000	99,72	32.880.000
	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	11.604.561.000	11.874.933.000	11.842.053.000	99,72	32.880.000
TOTAL		724.622.539.802	1.159.799.397.743	908.750.442.021	78,35	251.048.955.722

Pada tahun 2021 realisasi anggaran belanja Dinas Kesehatan dengan total anggaran Rp. 1.159.799.397.743,- yaitu sebesar Rp. 908.750.442.021,- atau sebanyak 78,35%. Dibandingkan tahun 2020 mengalami banyak penurunan, hal ini disebabkan belum berakhirnya pandemik covid-19. Selain itu juga adanya perubahan menu pada kegiatan DAK Non Fisik di triwulan dua menjadi salah satu faktor penyebab terhambatnya pencairan kegiatan.

Program kegiatan dengan realisasi terendah ada pada kegiatan DAK Non Fisik, Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota, yaitu dari total anggaran Rp. 3.038.667.000,- hanya realisasi sebesar Rp. 212.141.405 atau 6,98%. Hal ini disebabkan Kabupaten Karawang pada tahun 2021 masih masuk dalam masa pandemic Covid-19 sehingga seluruh bentuk pertemuan yang menimbulkan kerumunan masih dibatasi, hal ini di dukung juga oleh Surat Edaran Nomor HK.02.01/MENKES/455/2020 Tentang Perijinan dan akreditasi Faskes, dan Penetapan RS Pendidikan Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) menyatakan sertifikat akreditasi masih tetap berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak status Bencana Nasional atau Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19 dinyatakan dicabut oleh Pemerintah. Sehingga survei akreditasi tahun 2021 tidak dilaksanakan, sedangkan anggaran dari pusat tidak dikurangi, yang menyebabkan capaian menjadi rendah.

Program kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin menjadi yang kedua terendah setelah kegiatan akreditasi. Dari total anggaran Rp. 4.000.674.000,- realisasi kegiatan hanya Rp. 1.034.703.787,- atau sebanyak 25,86%. Penyebabnya karena pada kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin sebanyak 92,51 % (Rp.3.701.224.000,-) berisi anggaran untuk Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN (Jampersal), dimana klaim Jampersal berdasarkan riil di lapangan, dan pada tahun 2021 klaim jampersal cukup rendah.

Jika dibandingkan dengan realisasi anggaran belanja langsung tahun 2020 realisasi anggaran tahun 2021 ini menurun. Pada tahun 2020 realisasi anggaran sebesar 81,35% sedangkan pada tahun 2021 realisasi anggaran 78,35%. Faktor penyebab terbesar dikarenakan tahun 2021 merupakan tahun kedua terjadinya pandemic Covid-19

sehingga sebagian besar anggaran masih refocusing untuk kegiatan pencegahan dan penanganan Covid-19 serta selama masa pandemic Covid-19 tidak diperbolehkan adanya kegiatan yang bersifat mengumpulkan orang atau yang beresiko penularan Covid-19. Kekurangan tenaga kesehatan di lapangan juga menjadi penyebab, karena sebagian tenaga kesehatan fokus untuk penanganan Covid-19 dan pelaksanaan imunisasi/vaksinasi Covid-19, sedangkan untuk program-program kesehatan di luar covid-19 tetap harus dilaksanakan.

Berdasarkan analisis efektifitas kegiatan dari 67 kegiatan, sebanyak 13 kegiatan (19,40%) efektif, 52 kegiatan (77,61%) sesuai harapan, 1 kegiatan (1,49%) kurang efektif dan 1 kegiatan (1,49%) tidak efektif. (Analisis efektifitas dan efisiensi terlampir).

Tabel 2.30
Analisis Efisiensi dan Efektivitas Kegiatan

NO	URAIAN	INPUT		OUTPUT		OUTCOME		UNIT COST OUTPUT (UCO)		HASIL PERHITUNGAN	KET
		RENCANA	REALISASI	RENCANA	REALISASI	RENCANA	REALISASI	RENCANA	REALISASI	RUMUS (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	16
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	77.185.000	77.185.000	100	100	100	100	771.850	771.850	100	Efektif
2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	241.950.173.351	214.896.217.250	12	12	12	12	20.162.514.446	17.908.018.104	111	Sesuai Harapan
3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	16.870.000	15.665.000	100	100	100	100	168.700	156.650	107	Sesuai Harapan
4	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	10.160.000	7.400.000	100	100	100	100	101.600	74.000	127	Sesuai Harapan
5	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	53.700.000	52.950.000	100	100	100	100	537.000	529.500	101	Sesuai Harapan
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	21.645.000	10.627.500	100	100	100	100	216.450	106.275	151	Sesuai Harapan

NO	URAIAN	INPUT		OUTPUT		OUTCOME		UNIT COST OUTPUT (UCO)		HASIL PERHITUNGAN	KET
		RENCANA	REALISASI	RENCANA	REALISASI	RENCANA	REALISASI	RENCANA	REALISASI	RUMUS (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	16
7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	333.400.000	324.882.000	100	100	100	100	3.334.000	3.248.820	103	Sesuai Harapan
8	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	94.607.000	67.471.000	100	100	100	100	946.070	674.710	129	Sesuai Harapan
9	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	288.548.000	287.718.500	100	100	100	100	2.885.480	2.877.185	100	Efektif
10	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	150.656.900	150.626.900	100	100	100	100	1.506.569	1.506.269	100	Efektif
11	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	32.250.000	32.000.000	100	100	100	100	322.500	320.000	101	Efektif
12	Fasilitasi Kunjungan Tamu	200.130.000	154.990.000	100	100	100	100	2.001.300	1.549.900	123	Efektif
13	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	188.960.000	145.296.454	100	100	100	100	1.889.600	1.452.965	123	Sesuai Harapan
14	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	450.000.000	450.000.000	100	100	100	100	4.500.000	4.500.000	100	Efektif
15	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	21.492.000	19.515.500	100	100	100	100	214.920	195.155	109	Sesuai Harapan

NO	URAIAN	INPUT		OUTPUT		OUTCOME		UNIT COST OUTPUT (UCO)		HASIL PERHITUNGAN	KET
		RENCANA	REALISASI	RENCANA	REALISASI	RENCANA	REALISASI	RENCANA	REALISASI	RUMUS (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	16
16	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.030.102.000	737.005.921	100	100	100	100	10.301.020	7.370.059	128	Sesuai Harapan
17	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.311.192.000	1.053.130.000	100	100	100	100	13.111.920	10.531.300	120	Sesuai Harapan
18	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	344.568.700	285.409.300	100	100	100	100	3.445.687	2.854.093	117	Sesuai Harapan
19	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	99.544.000	96.974.000	100	100	100	100	995.440	969.740	103	Sesuai Harapan
20	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	440.000.000	417.969.639	100	100	100	100	4.400.000	4.179.696	105	Efektif
21	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	487.370.426.965	354.264.588.902	100	58	100	58	4.873.704.270	6.108.010.153	75	Kurang Efektif
22	Pembangunan Puskesmas	31.563.021.494	28.279.245.811	100	100	100	100	315.630.215	282.792.458	110	Sesuai Harapan
23	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1.779.811.745	1.714.186.745	100	100	100	100	17.798.117	17.141.867	104	Sesuai Harapan

NO	URAIAN	INPUT		OUTPUT		OUTCOME		UNIT COST OUTPUT (UCO)		HASIL PERHITUNGAN	KET
		RENCANA	REALISASI	RENCANA	REALISASI	RENCANA	REALISASI	RENCANA	REALISASI	RUMUS (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	16
24	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1.408.676.300	1.180.990.176	100	100	100	100	14.086.763	11.809.902	116	Sesuai Harapan
25	Pengadaan Obat, Vaksin	11.878.881.953	11.055.732.562	100	100	100	100	118.788.820	110.557.326	107	Sesuai Harapan
26	Pengadaan Bahan Habis Pakai	8.571.765.647	7.553.122.060	100	100	100	100	85.717.656	75.531.221	112	Sesuai Harapan
27	Pengembangan Rumah Sakit	44.358.000.000	29.462.308.435	100	100	100	100	443.580.000	294.623.084	134	Sesuai Harapan
28	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	3.022.300.000	2.013.410.109	100	100	100	100	30.223.000	20.134.101	133	Sesuai Harapan
29	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	350.000.000	344.627.000	100	100	100	100	3.500.000	3.446.270	102	Sesuai Harapan
30	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	57.823.175.900	45.742.227.910	100	87	100	87	578.231.759	525.772.735	109	Efektif
31	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	339.528.600	332.833.765	100	100	100	100	3.395.286	3.328.338	102	Sesuai Harapan

NO	URAIAN	INPUT		OUTPUT		OUTCOME		UNIT COST OUTPUT (UCO)		HASIL PERHITUNGAN	KET
		RENCANA	REALISASI	RENCANA	REALISASI	RENCANA	REALISASI	RENCANA	REALISASI	RUMUS (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	16
32	Pengadaan Obat, Vaksin	1.180.103.500	1.102.123.915	100	100	100	100	11.801.035	11.021.239	107	Sesuai Harapan
33	Pengadaan Bahan Habis Pakai	600.111.000	592.892.600	100	100	100	100	6.001.110	5.928.926	101	Sesuai Harapan
34	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	6.290.762.000	6.225.422.000	100	100	100	100	62.907.620	62.254.220	101	Sesuai Harapan
35	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	4.000.674.000	1.034.703.787	100	100	100	100	40.006.740	10.347.038	174	Sesuai Harapan
36	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	228.459.000	186.009.000	100	100	100	100	2.284.590	1.860.090	119	Sesuai Harapan
37	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	1.400.000	1.400.000	100	100	100	100	14.000	14.000	100	Sesuai Harapan
38	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia	9.360.000	9.360.000	100	100	100	100	93.600	93.600	100	Sesuai Harapan
39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	55.365.000	49.355.000	100	100	100	100	553.650	493.550	111	Sesuai Harapan
40	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	32.720.000	17.720.000	100	100	100	100	327.200	177.200	146	Sesuai Harapan

NO	URAIAN	INPUT		OUTPUT		OUTCOME		UNIT COST OUTPUT (UCO)		HASIL PERHITUNGAN	KET
		RENCANA	REALISASI	RENCANA	REALISASI	RENCANA	REALISASI	RENCANA	REALISASI	RUMUS (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	16
41	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	39.590.000	34.970.000	100	100	100	100	395.900	349.700	112	Sesuai Harapan
42	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	73.363.000	72.223.000	100	100	100	100	733.630	722.230	102	Sesuai Harapan
43	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	377.300.000	329.180.000	100	100	100	100	3.773.000	3.291.800	113	Sesuai Harapan
44	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	895.280.000	895.280.000	100	100	100	100	8.952.800	8.952.800	100	Sesuai Harapan
45	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana	653.363.100	596.087.600	100	100	100	100	6.533.631	5.960.876	109	Sesuai Harapan
46	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1.389.892.500	1.169.151.750	100	100	100	100	13.898.925	11.691.518	116	Sesuai Harapan
47	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	114.095.000	107.715.000	100	100	100	100	1.140.950	1.077.150	106	Sesuai Harapan

NO	URAIAN	INPUT		OUTPUT		OUTCOME		UNIT COST OUTPUT (UCO)		HASIL PERHITUNGAN	KET
		RENCANA	REALISASI	RENCANA	REALISASI	RENCANA	REALISASI	RENCANA	REALISASI	RUMUS (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	16
48	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	490.808.000	462.235.800	100	100	100	100	4.908.080	4.622.358	106	Sesuai Harapan
49	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	3.940.000	3.820.000	100	100	100	100	39.400	38.200	103	Sesuai Harapan
50	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1.043.438.000	869.387.920	100	56	100	56	10.434.380	15.524.784	51	Tidak Efektif
51	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	122.120.000	117.530.000	100	100	100	100	1.221.200	1.175.300	104	Sesuai Harapan
52	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	651.170.000	566.344.000	100	100	100	100	6.511.700	5.663.440	113	Efektif
53	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	76.924.182.056	67.850.363.185	100	100	100	100	769.241.821	678.503.632	112	Sesuai Harapan
54	Operasional Pelayanan Puskesmas	36.636.128.000	19.966.511.000	100	100	100	100	366.361.280	199.665.110	146	Sesuai Harapan
55	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	10.050.721.100	8.348.716.800	100	100	100	100	100.507.211	83.487.168	117	Sesuai Harapan

NO	URAIAN	INPUT		OUTPUT		OUTCOME		UNIT COST OUTPUT (UCO)		HASIL PERHITUNGAN	KET
		RENCANA	REALISASI	RENCANA	REALISASI	RENCANA	REALISASI	RENCANA	REALISASI	RUMUS (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	16
56	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	3.038.667.000	212.141.405	100	100	100	100	30.386.670	2.121.414	193	Efektif
57	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	4.586.585.000	3.949.265.000	100	100	100	100	45.865.850	39.492.650	114	Sesuai Harapan
58	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1.610.121.500	1.534.990.500	100	100	100	100	16.101.215	15.349.905	105	Sesuai Harapan
59	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	379.708.900	379.708.900	100	100	100	100	3.797.089	3.797.089	100	Efektif
60	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	9.695.604.028	8.797.479.906	100	100	100	100	96.956.040	87.974.799	109	Sesuai Harapan
61	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	19.231.129.700	19.111.865.000	100	100	100	100	192.311.297	191.118.650	101	Sesuai Harapan
62	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	12.786.000.000	11.518.550.000	100	100	100	100	127.860.000	115.185.500	110	Sesuai Harapan

NO	URAIAN	INPUT		OUTPUT		OUTCOME		UNIT COST OUTPUT (UCO)		HASIL PERHITUNGAN	KET
		RENCANA	REALISASI	RENCANA	REALISASI	RENCANA	REALISASI	RENCANA	REALISASI	RUMUS (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	16
63	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	48.229.160.804	29.044.346.514	100	100	100	100	482.291.608	290.443.465	140	Sesuai Harapan
64	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	10.889.130.000	10.491.992.000	100	100	100	100	108.891.300	104.919.920	104	Sesuai Harapan
65	Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	33.240.000	33.240.000	100	100	100	100	332.400	332.400	100	Efektif
66	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	11.874.933.000	11.842.053.000	100	100	100	100	118.749.330	118.420.530	100	Efektif

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KESEHATAN

Perumusan isu-isu strategis di Kabupaten Karawang dilaksanakan dengan memperhatikan serta menelaah visi, misi dan program-program kepala daerah terpilih, RPJMD Provinsi Jawa Barat serta RPJMN dengan juga memperhatikan berbagai sumber informasi dari lingkungan eksternal dalam skala regional, nasional dan internasional yang berkorelasi atau mempengaruhi tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah.

Untuk menentukan isu-isu strategis yang akan dijadikan dasar dalam penentuan tujuan, sasaran, strategis, kebijakan, program dan kegiatan di Dinas Kesehatan, maka terlebih dahulu diidentifikasi permasalahan-permasalahan pelayanan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan. Beberapa permasalahan pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang yang teridentifikasi adalah sebagai berikut.

Tabel 2.31
Pemetaan Permasalahan Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
Urusan Kesehatan			
1	Ketersediaan obat di Puskesmas belum optimal	Belum optimalnya ketersediaan pemerataan dan keterjangkauan obat esensial, penggunaan obat yang tidak rasional dan penyelenggaraan pelayanan kefarmasian yang berkualitas	Masih kurangnya sarana penunjang distribusi obat ke Puskesmas Instalasi Farmasi Kabupaten tidak memiliki kendaraan khusus distribusi obat
			Belum terpenuhinya secara merata tenaga Apoteker di Puskesmas
			Tidak semua Puskesmas memiliki tenaga farmasis

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			Masih rendahnya pengetahuan petugas Puskesmas dalam menerapkan penggunaan obat rasional
2	Pengawasan dan Pembinaan Kefarmasian belum optimal	Kompetensi pengelola obat Puskesmas belum memadai dalam penyelenggaraan pelayanan kefarmasian yang berkualitas	Jumlah tenaga masih kurang
			Belum semua tenaga kefarmasian mendapat pelatihan
3	Kualitas dan Kuantitas SDM Kesehatan yang masih kurang	Belum terpenuhinya jumlah, jenis, kualitas serta penyebaran sumber daya manusia kesehatan dan belum optimalnya dukungan kerangka regulasi ketenagaan kesehatan.	Realisasi rekrutmen untuk pemenuhan tenaga kesehatan selalu tidak sesuai dengan kebutuhan riil, baik jenis maupun jumlah
			Kompetensi sumber daya kesehatan yang masih belum memadai
			Masih minimnya kegiatan pendidikan dan pelatihan tentang manajemen dan informasi kesehatan meliputi pengelolaan administrasi dan hukum kesehatan
		Masih terbatasnya kemampuan manajemen dan informasi kesehatan meliputi pengelolaan administrasi dan hukum kesehatan.	Masih kurangnya peningkatan kapasitas tentang manajemen dan informasi kesehatan meliputi pengelolaan administrasi dan hukum kesehatan
4	Belum teratasinya permasalahan gizi secara menyeluruh;	Stunting	Kurangnya Asupan Makanan
			Adanya Penyakit Infeksi
			Kurangnya pengetahuan
			Pola asuh yang tidak sesuai kelompok umur
			Ketersediaan pangan tk RT yang rendah
			Pelayanan Kesehatan Yang kurang

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			Sanitasi dan lingkungan yang buruk
		Wasting (Balita Kurus)	Kurangnya Asupan Makanan
			Adanya Penyakit Infeksi
			Kurangnya pengetahuan
			Pola asuh yang tidak sesuai kelompok umur
			Ketersediaan pangan tk RT yang rendah
			Pelayanan Kesehatan Yang kurang
			Sanitasi dan lingkungan yang buruk
		Anemia pada ibu hamil	Asupan Kurang
			Ketersedian makan tingkat rumah tangga kurang
			Asupan makanan sumber Fe kurang
			Pengetahuan kurang
			Tidak ada PMO TTD
			Kepatuhan minum TTD masih kurang
		ASI Eksklusif	Kurang pengetahuan tentang ASI Eksklusif
			Kurang dukungan keluarga
			Ibu bekerja tidak bisa optimal dalam pemberian ASI
			Pelaksanaan Regulasi tentang praktik menyusui belum optimal
			Tenaga konselor ASI terbatas
			Kelompok pendukung ASI masih kurang
			Kondisi ibu
			Dukungan Faskes yang kurang terhadap praktik menyusui
			dukungan nakes belum optimal dalam praktik menyusui
		Pemantauan Pertumbuhan Balita	Pengetahuan yang kurang tentang pemantauan pertumbuhan balita
			Partisipasi masyarakat ke posyandu masih rendah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			alat ukur yang terstandar masih kurang
			Dukungan masyarakat belum optimal
			Ketrampilan kader dalam pemantauan pertumbuhan belum optimal
			Dukungan pemangku kebijakan kurang dalam kegiatan pemantauan pertumbuhan
		Status gizi remaja masih rendah	Pengetahuan remaja kurang tentang gizi remaja
			Kurangnya asupan makanan
			Kurangnya asupan sumber fe
			Sedentary life style
			psiko social
			body image remaja
			Kepatuhan minum TTD
		Obesitas pada anak	Asupan yang lebih
			Aktifitas fisik yang kurang
			Pola asuh yang salah
			Pengetahuan orang tua yang kurang
		SDM Gizi yang tidak mencukupi	Moratorium PNS
			Jangka waktu penambahan SDM lama
			Tidak ada regenerasi SDM yang sesuai kompetensi
			Tidak ada THL sesuai kompetensi
5	Angka Kematian Ibu dan Bayi masih tinggi	Masih ada ibu hamil yang tidak tercatat pada saat ANC	Akses informasi kesehatan reproduksi/KB bagi laki laki masih kurang, terutama mengenai : Metode kontrasepsi, kehamilan istrinya, IMS_HIV/AIDS, Hepatitis dan sphilis
			Pasangan Usia Subur terutama yang tidak menginginkan anak tidak mendapatkan informasi dan pelayanan Kb yg memadai
			Belum semua stake holder /pengambil keputusan memahami (PUG) dan ARG. Hal

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			ini berpengaruh pada anggaran yang responsif gender Terutama KB
			Para pengelola program belum terpapar dalam rencana MPS yang sensitif gender
			Budaya Patriaki dimana kedudukan pria diatas perempuan termasuk dalam memutuskan SESUATU
			KB / kesehatan reproduksi adalah urusan perempuan (stereotip)
		Terlambatnya pertolongan yg adekuat	Penempatan bidan melum merata.
			Sarana di RS Fasilitas : sangat kurang fasilitas ICU dan NICU
			RSUD sebagai pusat rujukan dengan 500 Tempat tidur hanya memiliki 13 ICU dengan ventilator 3 (idealnya 50 ICU dengan ventilator 25)
			Belum semua RS swasta dilengkapi dengan ICU
			Peralatan kesehatan di PONED belum lengkap, tidak ada alat untuk EKG dan USG, Infus Pump, alat resusitasi portable (mix safe resusitasi) ,
			Ketersediaan obat yang belum mencukupi.
			Bidan desa belum memadai secara kualitas
			Jumlah ibu yang memeriksakan kehamilan berkualitas belum optimal
		Faktor terlambat merujuk dan sampai di layanan kesehatan	Respon Time di Fasilitas Kesehatan masih lambat terutama pada saat hari2 besar, hanya RSUD yang mau menerima rujukan. Kebijakan BPJS untuk merujuk ke RS tipe C terlebih dahulu, sedangkan menurut hasil kajian RMP bahwa semua ibu hamil PEB harus di rujuk ke RSUD mengingat sarana dan prasarana penunjang yang lengkap baru di RSUD. Pendidikan rata-rata di kabupaten karawang masih rendah, masih ada budaya tidak mau lahir di RS
6	Kualitas pelayanan kesehatan anak di PKM rendah	Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pelayanan kesehatan anak masih kurang, serta SOP	Anggaran yang dibuat kurang dimanfaatkan untuk pelayanan kesehatan anak oleh puskesmas

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		elayanan kesehatan anak belum diterapkan	
		Kurangnya SDM dan kompetensi petugas di PKM untuk mengelola program ausrem	petugas pengelola program ausrem sering diganti, sehingga petugas yang sudah dilatih menjadi berkurang
		Dukungan regulasi dari pimpinan daerah untuk pelaksanaan kegiatan pelayanan ausrem tidak ada	Belum ada kesepakatan tentang kegiatan pelayanan kesehatan ausrem antara stake holder yang ada.
		Tumpang tindih kegiatan di setiap OPD terkait	Sinergitas lintas sektor masih kurang
7	Kualitas pelayanan kesehatan lansia masih rendah	Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pelayanan kesehatan Lansia masih kurang, serta SOP pelayanan kesehatan Lansia belum diterapkan	Anggaran yang dibuat kurang dimanfaatkan untuk pelayanan kesehatan Lansia oleh puskesmas
		Kurangnya SDM dan kompetensi petugas di PKM untuk mengelola program Lansia	Petugas pengelola program ausrem sering diganti, sehingga petugas yang sudah dilatih menjadi berkurang
		Dukungan regulasi dari pimpinan daerah untuk pelaksanaan kegiatan pelayanan Lansia tidak ada	Belum ada kesepakatan tentang kegiatan pelayanan kesehatan ausrem antara stake holder yang ada.
		Sinergitas lintas sektor masih kurang	Tumpang tindih kegiatan di setiap OPD terkait
8	Angka kesakitan akibat penyakit berbasis lingkungan masih cukup tinggi	Belum optimalnya upaya pencapaian target akses universal (100% akses air minum, 0% permukiman kumuh 100% akses sanitasi)	Masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang kesehatan
			Tradisi yang kuat dalam masyarakat
		Belum optimalnya kualitas sumber daya manusia tenaga kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan olahraga.	Kurangnya Tenaga kesehatan lingkungan
			Adanya Rotasi / Pergantian petugas kesling di Puskesmas

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			Minimnya Penyegaran pengetahuan & Pelatihan
		Belum optimalnya regulasi terkait tatakelola dan manajemen program kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga.	Perda Kesling & STBM belum tersosialisasikan dengan baik di tingkat masyarakat
		Belum optimalnya Sarana & prasarana Pendukung Pengawasan dan pemeriksaan Kualitas lingkungan	Kurangnya Sanitarian KIT
			Kurang optimalnya pengetahuan penggunaan alat Sanitarian KIT
9	Kasus Penyakit Akibat Kerja (PAK) dan Kecelakaan Kerja terus meningkat	Belum optimalnya kualitas sumber daya tenaga kesehatan kerja	Kurangnya tenaga pembimbing kesehatan kerja
			Pemahaman kesehatan kerja, pengelola tempat kerja baru dikaitkan dengan keselamatan kerja belum dengan kesehatan kerja
			Pelayanan kesehatan kerja belum merata karena belum menjangkau seluruh masyarakat pekerja
		Data dan informasi kesehatan kerja belum optimal	Belum adanya sistem informasi kesehatan kerja yang memadai
			Aplikasi sistem pelaporan kesehatan kerja belum tersosialisasi
		Belum optimalnya kegiatan GP2SP (Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif) di industri formal	Kurang optimal nya pembinaan GP2SP
			Kurangnya komitmen pengelola industri dan lintas sector
			Masih kurangnya sinergi koordinasi para pengambil keputusan pada berbagai tingkat administrasi

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
10	Angka Kejadian Penyakit Tidak Menular cukup tinggi	Obesitas pada usia > 18 tahun meningkat	Kurangnya pembiasaan aktifitas fisik di masyarakat
			Masih kurangnya pengetahuan tentang latihan fisik atau Olahraga yang baik, benar, terukur dan teratur sesuai kaidah kesehatan
		Masih adanya resiko kesakitan (trauma, cedera, gangguan kesehatan), kecacatan, kematian akibat aktifitas fisik/latihan fisik yang salah	Belum fahamnya masyarakat tentang aktifitas fisik, latihan fisik dan olahraga yang dilakukan secara bertahap sesuai dengan kondisi fisik
		Belum optimalnya kualitas sumber daya tenaga kesehatan Olahraga	Belum semua tenaga kesehatan Olahraga mengikuti pelatihan/orientasi kesehatan olahraga
			Kurangnya koordinasi antara lintas program, lintas sektor, dunia usaha dan kelompok masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan kesehatan olahraga
11	Dukungan Pemerintahan Desa dalam Pembangunan Kesehatan masih rendah	Alokasi dana Desa untuk UKBM masih rendah	Kurangnya Kepedulian Stake Holder Tingkat Desa terhadap Pembangunan Kesehatan
12	Penyelenggaraan Promkes di Puskesmas masih rendah	SDM Promkes masih pegang rangkap jabatan dan Non PNS	Kurangnya SDM di Puskesmas
13	Rumah Tangga ber-PHBS masih rendah	Kurangnya peran serta masyarakat dalam ber-PHBS ditatanan RT	Man-Pengetahuan masyarakat tentang PHBS masih rendah
			Method- Kerjasama lintas sektor kurang
			Money-Dana untuk pengkajian intervensi PHBS sedikit
			Machine-Kesadaran masyarakat kurang
			Material-Media PHBS kurang-inovasi dalam pemberdayaan masyarakat kurang

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
14	Rendahnya angka tidak merokok didalam rumah masyarakat yang rendah	Rendahnya tingkat pengetahuan akan bahaya merokok pada masyarakat	Man-kurang kesadaran untuk berhenti merokok
			Method- Kurang kerjasama lintas sektor dan kaderisasi puskesmas
			Money-kurangnya dana untuk penyuluhan
			Machine-belum ada penegakan PERDA KTR
			Material-Belum ada Tipiring KTR di lapangan
15	Belum semua penderita HIV mendapatkan pengobatan	Rendahnya akses ARV	Belum semua fasyankes mempunyai layanan ARV
16	Masih tingginya kasus penularan Hepatitis B dari ibu Ke anak	Masih rendahnya cakupan pemeriksaan triple eliminasi pada ibu hamil	Masih rendahnya kesadaran masyarakat terutama ibu hamil untuk melakukan test HBsAg
17	Masih tingginya kasus DBD	Masih banyaknya vektor sebagai sumber tempat perindukan nyamuk	1. Masih rendahnya Perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat
			2. Belum optimalnya Peran lintas sektor dalam penanggulangan DBD
			3. Belum adanya regulasi dari pemerintah daerah untuk penanggulangan DBD
18	Belum eliminasi filariasis	Masih adanya kasus filariasis	Penderita malu untuk berobat
19	Angka kejadian penyakit PTM (Usia Produktif, DM, Hipertensi) masih tinggi	Penderita PTM (Usia Produktif, DM, Hipertensi) belum mendapat pelayanan kesehatan secara maksimal	Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang Penyakit Tidak Menular (usia Produktif, DM, Hipertensi)
			SDM / tenaga kesehatan yang masih terbatas
			Kurangnya sarana dan prasarana untuk deteksi dini factor resiko Penyakit Tidak Menular
			Keterbatasan anggaran kegiatan Penyakit Tidak Menular (Usia Produktif , DM , Hipertensi)

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
20	Angka kejadian penderita ODGJ dan Napza masih tinggi	Penderita ODGJ dan Napza belum mendapat pelayanan kesehatan yang maksimal	Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang Penderita ODGJ dan Napza
			SDM / tenaga kesehatan yang masih terbatas
			Kurangnya Kerjasama lintas sektor
21	Masih tingginya angka Penyakit Kanker dan kelainan darah di masyarakat	Penderita Kanker dan kelainan darah belum mendapat pelayanan secara maksimal	Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang Penyakit kanker dan kelainan darah
			SDM / tenaga kesehatan yang masih terbatas
			Kurangnya sarana dan prasarana untuk deteksi dini faktor resiko Penyakit Kanker dan kelainan darah
22	Masih tingginya angka kasus penyakit katarak di masyarakat	Deteksi dini Penderita Katarak belum optimal	Keterbatasan anggaran kegiatan Penyakit Katarak
			Kurangnya sarana dan prasarana untuk deteksi dini faktor resiko Penyakit Katarak
23	Belum optimalnya pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS)	Masih adanya Orangtua yang menolak anaknya di Imunisasi di Sekolah	Masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya imunisasi
			Masih adanya isu halal haram terkait imunisasi
			Masih adanya kekhawatiran orangtua terhadap KIPI (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi)
		Masih adanya Sekolah yang menolak Muridnya di Imunisasi	Masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya imunisasi
			Masih adanya isu halal haram terkait imunisasi
			Masih adanya kekhawatiran orangtua terhadap KIPI (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi)

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			Masih kurangnya dukungan lintas sektor terkait untuk pelaksanaan BIAS
24	Belum semua Desa masuk dalam kategori UCI	Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya imunisasi bagi bayi dan baduta	Masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya imunisasi
			Masih adanya kekhawatiran orangtua terhadap KIPI (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi)
			Masih adanya isu halal haram terkait imunisasi
		Belum optimalnya kerjasama lintas sektor dan lintas program	Koordinasi lintas program diantara petugas puskesmas masih kurang
			Tidak tersosialisasinya kegiatan program Imunisasi kepada lintas program dan lintas sector
		Masih ada kendala dalam pengadaan logistik program imunisasi	Pengadaan logistik vaksin masih di kelola oleh pusat
			Distribusi kebutuhan logistik tidak sesuai
			Keterlambatan distribusi vaksin dari Pusat, Propinsi, Kabupaten dan Puskesmas
25	Cakupan Imunisasi Lanjutan baduta masih rendah	Masih rendahnya pengetahuan masyarakat	Penyuluhan yang masih rendah
			Media promosi dan KIE belum optimal
		Tidak ada regulasi yang mewajibkan imunisasi untuk lengkap	Kurangnya kerjasama dengan LS, dan advokasi pemangku jabatan
			Pelacakan anak yang DO belum optimal
		Kompetensi SDM vaksinator yang belum optimal	Menurunnya motivasi SDM
			Pelatihan SDM yang belum dilakukan secara serentak

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
26	Kualitas pencatatan dan pelaporan yang masih belum optimal	Masih adanya kesenjangan antara hasil imunisasi di lapangan dengan yang dilaporkan	Keterlambatan dalam merekap/melaporkan hasil pelayanan imunisasi pada saat hari H pada buku register imunisasi
			Belum adanya sistem yang secara online dapat merekam data hasil imunisasi dalam setiap saat dengan baik.
27	Kualitas Rantai dingin sampai kesasaran belum optimal	SDM yang belum optimal dalam memelihara rantai dingin sesuai dengan SOP	Masih rendahnya petugas dalam menerapkan SOP rantai dingin
			Logistik rantai dingin yang belum sesuai SOP untuk terpenuhi
28	Masih adanya Kejadian Luar Biasa Penyakit/ Keracunan	Angka kesakitan kasus akibat KLB masih tinggi	Populasi yang padat sehingga mempercepat proses transmisi penularan
			Populasi rentan KLB yang terkonsentrasi pada area tertentu
			Masih rendahnya kesadaran masyarakat dan pengelola makanan untuk menjaga kesehatan pangan
29	Insiden kasus PD3I yang masih tinggi	Risiko penularan kasus PD3I yang masih tinggi	Masih adanya kelompok rentan yang belum mendapatkan imunisasi
			Tidak terbentuknya antibodi karena mengalami stunting
			Perilaku masyarakat yang masih rendah untuk melakukan pencegahan penularan penyakit PD3I
30	Tingginya proporsi jemaah haji risiko tinggi	Jemaah haji belum secara rutin melakukan pemeriksaan kesehatan	kesadaran jemaah haji yang masih rendah untuk secara dini melakukan pemeriksaan kesehatan
			Masa waktu tunggu keberangkatan jemaah haji yang terlalu lama
			Kurangnya deteksi dini terhadap penyakit yang ada pada jemaah haji

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
31	Universal Coverage belum tercapai (85,21 % dari target 95%)	Masih kurangnya kerjasama Lintas Sektor	Masih banyak NIK yang belum tervalidasi
			Regristasi vital penduduk
			Pendataan masyarakat miskin melalui BDT belum berjalan optimal
		Masih kurangnya pemberdayaan masyarakat	Banyak yang belum mendaftarkan ke BPJS Kesehatan secara mandiri
			Stigma negatif terhadap pelayanan BPJS Kesehatan
32	Belum optimalnya pelayanan kesehatan rujukan	Kurangnya sarana dan prasarana penanggulangan kasus rujukan	Kurangnya jumlah tenaga kesehatan
			Kurangnya alat kesehatan
			Kompetensi petugas yang masih rendah
		Belum jelasnya peraturan rujukan berjenjang	Informasi tentang rujukan berjenjang yang belum merata ke fasilitas kesehatan
			Pengetahuan masyarakat yg masih kurang tentang rujukan berjenjang
33	Belum optimalnya tenaga kesehatan Puskesmas dalam melakukan pelayanan kesehatan sesuai standar	Masih banyaknya dokter umum di puskesmas yang tidak melakukan pelayanan kesehatan sesuai SOP	Masih rendahnya kepatuhan dokter umum dalam melaksanakan SOP pelayanan Kesehatan
			Perlunya pelatihan ICD-10 untuk menegakkan diagnose
			Pembakuan SOP Pelayanan Kesehatan
34	Pelaporan program puskesmas belum lengkap	Sistem pelaporan program di puskesmas belum sesuai dengan format	PKM sering berganti petugas pemegang program
			Tidak adanya serah terima tugas dari pemegang program yang lama ke yang baru

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
35	Pelayanan laboratorium tidak bisa di layani secara maksimal	Kurangnya peralatan laboratorium yang memadai untuk menunjang pelayanan	Puskemas tidak bisa melakukan pengadaan alat laboratorium yang sesuai dengan standart
		Kurang SDM analis kesehatan di puskesmas	Masih banyak petugas laboratorium bukan dari analis kesehatan
			Kurangnya Pelatihan untuk petugas laboratorium yang bukan dari analis kesehatan
36	Pelayanan Gigi Mulut di puskesmas tidak maksimal	Kurang SDM dokter gigi dan perawat gigi di puskesmas	Formasi untuk dokter gigi di puskesmas masih kurang
			Perawat gigi di puskesmas tidak diperbolehkan melakukan penulisan resep obat
		Cakupan UKGMD rendah	masih banyak Petugas gigi yang tidak melakukan kunjungan lapangan
37	Program pelayanan darah belum optimal	Program pelayanan darah di puskesmas belum bisa dilaksanakan secara maksimal	Belum adanya Laporan yang baku program pelayanan darah
			Kurangnya Koordinasi antara dinas kesehatan (yankesprimer) dengan puskesmas dan UTD,RS
		SDM yang terlatih di pelayanan darah di puskesmas masih kurang	Pelatihan petugas pelayanan darah masih kurang
38	Pendataan Keluarga Sehat belum optimal	Aplikasi KS yang sulit di akses	Server Apilaksi KS banyak mengalami hambatan
			Masih banyak petugas KS yang tidak bisa menjalankan aplikasi KS yang Baru
		Kurangnya SDM puskesmas untuk melakukan pendataan dan entry data KS ke Aplikasi	SDM puskesmas yang mempunyai tupoksi ganda
			Masih ada SDM Puskesmas yang belum memahami tentang KS
39	Kurang maksimalnya	SDM yang terbatas	SDM puskesmas yang mempunyai tupoksi ganda

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	pelayanan matra di lapangan		
		SDM yang terlatih di Matra dan Bencana di puskesmas masih kurang	Belum semua petugas mendapat pelatihan matra bencana mengenai BHD (bantuan hidup dasar) dan kegawat daruratan
		Sarana Prasarana yang belum maksimal	Belum ada anggaran untuk melengkapi sarana prasarana matra
40	Pelayanana Rawat inap dan kegawat daruratan di puskesmas belum maksimal	Sarana Prasarana untuk pelayanan rawat inap dan kegawatdarutan di puskesmas belum tersedia	Fasilitas pendukung di puskesmas belum tersedia
		SDM yang terbatas	SDM puskesmas untuk pelayanan rawat inap dan kegawat daruratan belum terpenuhi
41	Kualitas Pelayanan Kesehatan Di Fasilitas Kesehatan tingkat pertama belum sesuai standar	Setiap puskesmas harus dilakukan Re Akreditasi Puskesmas	Jumlah SDM di Puskesmas belum terpenuhi sesuai Permenkes 75 Tahun 2014
			Adanya perubahan Standar Instrumen Akreditasi Puskesmas
			Jenis SDM di puskesmas belum sesuai Standar ketenagaan puskesmas sesuai yang tertera dalam Permenkes 75 Tahun 2014
			Kompetensi tenaga kesehatan belum sesuai dengan jabatan masing - masing tenaga kesehatan
			Sarana dan Prasarana Puskesmas belum sesuai dengan Standar Puskesmas
			Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan puskesmas belum optimal
			Puskesmas belum memahami mutu dan keselamatan pasien
			Jumlah Tim Pendamping Akreditasi puskesmas masih kurang
			Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi secara terpadu dari Dinas Kesehatan belum optimal

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Penilaian Kinerja Puskesmas belum dilaksanakan secara optimal	Instrumen PKP terbaru belum dipahami puskesmas
			Tidak semua puskesmas menganalisa hasil PKP
			Adanya Penilaian Puskesmas dan klinik Prestasi dari Provinsi
		Belum ada klinik yang terakreditasi	Jumlah SDM Klinik belum sesuai standar
			Sarana dan Prasarana kliniks belum sesuai dengan Standar
			Jumlah Tim Pendamping Akreditasi klinik masih kurang
		SOTK Dinkes tentang legislasi SDM dan Faskes belum jelas	DPMPTSP membutuhkan Tim Teknis dari Dinas Kesehatan
			Diperlukan monitoring dan pembinaan Faskes oleh Dinas Kesehatan
42	Pelayanan Kesehatan Tradisional di Puskesmas belum optimal	Kurangnya SDM terlatih Pelayanan Kesehatan Tradisional	biaya penyelenggaraan pelatihan cukup besar
			Tenaga kesehatan terlatih dipuskesmas tidak mengimplementasikan hasil pelatihan
		Kelompok asuhan mandiri TOGA belum Optimal	Belum ada SK Puskesmas dalam pembentukan Kelompok Asuhan Mandiri TOGA
			Pembinaan Kelompok Asuhan Mandiri TOGA belum maksimal
		Jejaring Fasilitas pelayanan Kesehatan tradisional belum memahami proses perijinan terpadu di Kabupaten Karawang	pelaksanaan pelayanan kesehatan tradisional dilakukan secara turun menurun
43	Belum Optimalnya Bina	Pemuktahiran Data jejaring di tingkat puskesmas belum optimal	Sering terjadi pergantian petugas bina jaringan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	Jaringan di Puskesmas		
			Petugas bina jaringan puskesmas tidak memahami format pelaporan bina jaringan
			Masih ditemukan Fasyankes yang belum berijin atau belum memperpanjang perijinan
44	RSUD Karawang sebagai RS Rujukan Regional belum sesuai standar	Sarana dan prasarana belum memadai	Advokasi kepada pemangku kebijakan belum optimal
		Belum memiliki layanan unggulan yang kompetitif	Dukungan terhadap regionalisasi belum optimal
		Tenaga dokter sub spesialis masih kurang dari standar minimal	Belum ada yang berminat mendaftar
			Jumlah spesialis umum lebih dari cukup
			Tidak ada dukungan pembiayaan atau beasiswa
45	Pelayanan pasien rawat inap belum maksimal	Pasien tertahan di IGD	Ruang perawatan kritis belum mencukupi
			Musim-musim tertentu memiliki karakter penyakit yang berbeda sehingga pemanfaatan ruangan menjadi berubah
			Tren perubahan kelas di masyarakat yang berubah seiring perubahan kebijakan
46	Pelayanan geriatri	Pelayanan belum terintegrasi	Belum memiliki konsultan geriatri
			Belum memiliki ruang perawatan yang representative
			BPJS belum mengakomodasi pelayanan geriatri
47	Pelayanan khemoterapi RSUD Karawang belum menjangkau masyarakat Kabupaten	Pelayanan khemoterapi masih selektif di RSUD Karawang	Belum kerjasama dengan BPJS, belum ada penjamin, pelayanan kemo berbiaya mahal

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	karawang dan sekitarnya		
48	Pelayanan cathlab belum optimal	pelayanan cathlab masih selektif di RSUD Karawang	Belum kerjasama dengan BPJS, belum ada penjamin, pelayanan cath lab berbiaya mahal
49	Kebutuhan labu darah tinggi	Meningkatnya pasien yang membutuhkan pelayanan transfusi darah	Meningkatnya jumlah kunjungan/rujukan pasien Thalasemia, pelayanan Hemodialisa, kasus Obgyn dengan program rujukan KIA, RS jejaring cenderung untuk merujuk pasien yang memerlukan transfuse
50	Waktu tunggu Rawat Jalan belum sesuai standar	Pelayanan pendaftaran dan rekam medis lambat	Retensi rekam medis mengalami kendala untuk pemusnahan sehingga ruangan penuh dan menghambat mobilisasi.
			Pemanfaatan pendaftaran online belum optimal
			Belum ada inovasi percepatan pendaftaran seperti penggunaan APM (Anjungan Pendaftaran Mandiri)
51	Ratio tenaga kesehatan belum sesuai	perbandingan perawat dengan tempat tidur 1:1,	Turn over perawat tinggi, perekrutan tenaga kesehatan terbatas
52	Pelayanan Hemodialisa belum sesuai	Mesin Hemodialisa dan ruang pelayanan masih kurang, belum ada pelayanan HD untuk pasien yang infeksi	Optimalisasi ruang pelayanan belum optimal, kerjasama hemodialisa belum optimal
53	Kehilangan pendapatan	Penjamin pasien tidak jelas / tidak ada yang menjamin	Pasien tahanan, pasien gelandangan, kasus-kasus yg tidak ditanggung BPJS dan dinas kesehatan seperti diagnosa mabuk, korban kejahatan, KDRT, pemakaman jenazah tidak di kenal
54	Penurunan pendapatan	Rujukan berjenjang menurunkan produksi pelayanan	Perubahan kebijakan
55	GDR masih diatas standar	Penanganan belum optimal	Sistem rujukan pasien RS mitra ke RSUD belum sesuai standar SOP
			Keterlambatan perujukan

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Tabel 2.32
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2023

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting		
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(10)	(11)	(12)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan	Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan	100	Perse ntase	317.840.132.870	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan	Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan	100	Perse ntase	317.840.132.870	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Kesehatan	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan	100	Perse ntase	479.141.200	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Kesehatan	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan	100	Perse ntase	479.141.200	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renstra, Renja, RKA, DPA)	4	Doku men	99.703.200	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renstra, Renja, RKA, DPA)	4	Doku men	99.703.200	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting		
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(10)	(11)	(12)
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (LAKIP, LPPD, LKPJ, SPM, IKU, IKK, IKI, TAPKIN)	8	Dokumen	379.438.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (LAKIP, LPPD, LKPJ, SPM, IKU, IKK, IKI, TAPKIN)	8	Dokumen	379.438.000	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinas Kesehatan	Persentase pelayanan administrasi keuangan yang terlaksana	100	Persentase	233.867.087.080	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinas Kesehatan	Persentase pelayanan administrasi keuangan yang terlaksana	100	Persentase	233.867.087.080	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (DINKES)	Dinas Kesehatan	Persentase Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100	Persentase	233.845.517.080	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (DINKES)	Dinas Kesehatan	Persentase Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100	Persentase	233.845.517.080	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran/	4	Dokumen	21.570.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran/	4	Dokumen	21.570.000	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting		
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		(12)	
		Tahunan SKPD						Tahunan SKPD				
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dinas Kesehatan	Persentase Puskesmas Menyampaikan Laporan Pengelolaan aset Tepat Waktu	100	Perse ntase	8.050.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dinas Kesehatan	Persentase Puskesmas Menyampaikan Laporan Pengelolaan aset Tepat Waktu	100	Perse ntase	8.050.000	
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dinas Kesehatan	Jumlah laporan pengelolaan aset	1	Lapo ran	8.050.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dinas Kesehatan	Jumlah laporan pengelolaan aset	1	Lapo ran	8.050.000	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dinas Kesehatan	Persentase Pegawai di Lingkungan Dinas Kesehatan dengan Nilai Kinerja Minimal Baik	100	Perse ntase	93.250.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dinas Kesehatan	Persentase Pegawai di Lingkungan Dinas Kesehatan dengan Nilai Kinerja Minimal Baik	100	Perse ntase	93.250.000	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Dinas Kesehatan	Jumlah Pakaian Dinas dan	152	Stel	68.250.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	Dinas Kesehatan	Jumlah Pakaian Dinas dan	152	Stel	68.250.000	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting		
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)
		Perlengkapannya				Kelengkapannya		Perlengkapannya				
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Dinas Kesehatan	Jumlah peraturan perundangan yg disosialisasikan	10	Paket	25.000.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Dinas Kesehatan	Jumlah peraturan perundangan yg disosialisasikan	10	Paket	25.000.000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas Kesehatan	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terlaksana	100	Perentase	1.846.890.490	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas Kesehatan	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terlaksana	100	Perentase	1.846.890.490	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Kesehatan	Jumlah Item Pengadaan Komponen Instalasi dan Alat-alat Listrik	1	Paket	12.261.390	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Kesehatan	Jumlah Item Pengadaan Komponen Instalasi dan Alat-alat Listrik	1	Paket	12.261.390	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Kesehatan	Jumlah Item Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	Paket	635.705.500	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Kesehatan	Jumlah Item Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	Paket	635.705.500	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dinas Kesehatan	Jumlah Item Pengadaan Peralatan	1	Paket	94.334.800	Penyediaan Peralatan	Dinas Kesehatan	Jumlah Item Pengadaan	1	Paket	94.334.800	

Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting		
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)
		Rumah Tangga				Rumah Tangga		Peralatan Rumah Tangga				
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas Kesehatan	Jumlah Item Pengadaan Barang Logistik kantor	1	Paket	288.544.500	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas Kesehatan	Jumlah Item Pengadaan Barang Logistik kantor	1	Paket	288.544.500	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinas Kesehatan	Jumlah Item Barang Cetak	7	Jenis	152.636.300	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinas Kesehatan	Jumlah Item Barang Cetak	7	Jenis	152.636.300	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dinas Kesehatan	Jumlah Item Bahan bacaan yang Disediakan	1	Paket	32.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dinas Kesehatan	Jumlah Item Bahan bacaan yang Disediakan	1	Paket	32.000.000	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dinas Kesehatan	Jumlah Penyediaan Porsi Makan dan Snack	3	Jenis	263.608.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dinas Kesehatan	Jumlah Penyediaan Porsi Makan dan Snack	3	Jenis	263.608.000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Kesehatan	Jumlah Orang yg Melakukan Perjalanan Dinas	2	Jenis	367.800.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Kesehatan	Jumlah Orang yg Melakukan Perjalanan Dinas	2	Jenis	367.800.000	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting		
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dinas Kesehatan	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan	100	Perse ntase	2.425.500.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dinas Kesehatan	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan	100	Perse ntase	2.425.500.000	
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas/Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas Kesehatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan yang diadakan	4	Unit	581.600.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas/Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas Kesehatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan yang diadakan	4	Unit	581.600.000	
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Kesehatan	Luas gedung kantor yang dibangun	1	Gedung	1.843.900.000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Kesehatan	Luas gedung kantor yang dibangun	1	Gedung	1.843.900.000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Kesehatan	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Tersedia	100	Perse ntase	3.142.079.500	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Kesehatan	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Tersedia	100	Perse ntase	3.142.079.500	

Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting		
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Kesehatan	Jumlah Materai dan Perangko	177 2	Buah	21.475.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Kesehatan	Jumlah Materai dan Perangko	1772	Buah	21.475.000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Kesehatan	Jumlah Nomor Rekening Penyediaan Tenaga Perbaikan Listrik, Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet	5	Rekening	1.557.412.500	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Kesehatan	Jumlah Nomor Rekening Penyediaan Tenaga Perbaikan Listrik, Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet	5	Rekening	1.557.412.500	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Kesehatan	Jumlah Tenaga Kontrak Kerja yang Menerima Gaji	46	Orang	1.563.192.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Kesehatan	Jumlah Tenaga Kontrak Kerja yang Menerima Gaji	46	Orang	1.563.192.000	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Kesehatan	Persentase Barang Milik Daerah yang dilakukan Pemeliharaan	100	Persentase	784.610.600	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Kesehatan	Persentase Barang Milik Daerah yang dilakukan Pemeliharaan	100	Persentase	784.610.600	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting		
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	dinas Kesehatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan yang dilakukan pemeliharaan	49 mobil dan 46 motor	kendaraan	486.732.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	dinas Kesehatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan yang dilakukan pemeliharaan	49 mobil dan 46 motor	kendaraan	486.732.000	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	dinas Kesehatan	Jumlah Jenis peralatan dan Mesin Lainnya yang dilakukan Pemeliharaan	5	jenis	57.878.600	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	dinas Kesehatan	Jumlah Jenis peralatan dan Mesin Lainnya yang dilakukan Pemeliharaan	5	jenis	57.878.600	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	dinas Kesehatan	Jumlah Gedung Kantor yang dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	12	gedung	240.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	dinas Kesehatan	Jumlah Gedung Kantor yang dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	12	gedung	240.000.000	
Peningkatan Pelayanan BLUD	UPTD Puskesmas	Persentase Tingkat Kemandirian BLUD UPTD	100	Persentase	75.193.524.000	Peningkatan Pelayanan BLUD	UPTD Puskesmas	Persentase Tingkat Kemandirian BLUD UPTD	100	Persentase	75.193.524.000	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting		
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)
		pada Dinas Kesehatan						pada Dinas Kesehatan				
Peningkatan BLUD Puskesmas Pada Puskesmas Adiarsa	UPTD Puskesmas	Persentase Tingkat Kemandirian Keuangan BLUD Puskesmas	100	%	1.541.961.000	Peningkatan BLUD Puskesmas Pada Puskesmas Adiarsa	UPTD Puskesmas	Persentase Tingkat Kemandirian Keuangan BLUD Puskesmas	100	%	1.541.961.000	
Peningkatan BLUD Puskesmas Pada Puskesmas Anggadita	UPTD Puskesmas	Persentase Tingkat Kemandirian Keuangan BLUD Puskesmas	100	%	450.353.000	Peningkatan BLUD Puskesmas Pada Puskesmas Anggadita	UPTD Puskesmas	Persentase Tingkat Kemandirian Keuangan BLUD Puskesmas	100	%	450.353.000	
Peningkatan BLUD Puskesmas Pada Puskesmas Balongsari	UPTD Puskesmas	Persentase Tingkat Kemandirian Keuangan BLUD Puskesmas	100	%	928.816.000	Peningkatan BLUD Puskesmas Pada Puskesmas Balongsari	UPTD Puskesmas	Persentase Tingkat Kemandirian Keuangan BLUD Puskesmas	100	%	928.816.000	
Peningkatan BLUD Puskesmas Pada Puskesmas Batujaya	UPTD Puskesmas	Persentase Tingkat Kemandirian Keuangan BLUD Puskesmas	100	%	3.143.469.000	Peningkatan BLUD Puskesmas Pada Puskesmas Batujaya	UPTD Puskesmas	Persentase Tingkat Kemandirian Keuangan BLUD Puskesmas	100	%	3.143.469.000	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting		
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(10)	(11)
Peningkatan BLUD Puskesmas Pada Puskesmas Bayurlor	UPTD Puskesmas	Persentase Tingkat Kemandirian Keuangan BLUD Puskesmas	100	%	855.722.000	Peningkatan BLUD Puskesmas Pada Puskesmas Bayurlor	UPTD Puskesmas	Persentase Tingkat Kemandirian Keuangan BLUD Puskesmas	100	%	855.722.000	
Peningkatan BLUD Puskesmas Pada Puskesmas Ciampel	UPTD Puskesmas	Persentase Tingkat Kemandirian Keuangan BLUD Puskesmas	100	%	1.331.040.000	Peningkatan BLUD Puskesmas Pada Puskesmas Ciampel	UPTD Puskesmas	Persentase Tingkat Kemandirian Keuangan BLUD Puskesmas	100	%	1.331.040.000	
Peningkatan BLUD Puskesmas Pada Puskesmas Cibuaya	UPTD Puskesmas	Persentase Tingkat Kemandirian Keuangan BLUD Puskesmas	100	%	2.473.121.000	Peningkatan BLUD Puskesmas Pada Puskesmas Cibuaya	UPTD Puskesmas	Persentase Tingkat Kemandirian Keuangan BLUD Puskesmas	100	%	2.473.121.000	
Peningkatan BLUD Puskesmas Pada Puskesmas Cicinde	UPTD Puskesmas	Persentase Tingkat Kemandirian Keuangan BLUD Puskesmas	100	%	1.321.208.000	Peningkatan BLUD Puskesmas Pada Puskesmas Cicinde	UPTD Puskesmas	Persentase Tingkat Kemandirian Keuangan BLUD Puskesmas	100	%	1.321.208.000	
Peningkatan BLUD Puskesmas Pada Puskesmas Cikampek	UPTD Puskesmas	Persentase Tingkat Kemandirian Keuangan BLUD Puskesmas	100	%	2.470.416.000	Peningkatan BLUD Puskesmas Pada Puskesmas Cikampek	UPTD Puskesmas	Persentase Tingkat Kemandirian Keuangan BLUD Puskesmas	100	%	2.470.416.000	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting		
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)
Peningkatan BLUD Puskesmas Pada Puskesmas Cikampek Utara	UPTD Puskesmas	Persentase Tingkat Kemandirian Keuangan BLUD Puskesmas	100	%	414.449.000	Peningkatan BLUD Puskesmas Pada Puskesmas Cikampek Utara	UPTD Puskesmas	Persentase Tingkat Kemandirian Keuangan BLUD Puskesmas	100	%	414.449.000	
Peningkatan BLUD Puskesmas Pada Puskesmas Cilamaya	UPTD Puskesmas	Persentase Tingkat Kemandirian Keuangan BLUD Puskesmas	100	%	2.221.163.000	Peningkatan BLUD Puskesmas Pada Puskesmas Cilamaya	UPTD Puskesmas	Persentase Tingkat Kemandirian Keuangan BLUD Puskesmas	100	%	2.221.163.000	
Peningkatan BLUD Puskesmas Pada Puskesmas Curug	UPTD Puskesmas	Persentase Tingkat Kemandirian Keuangan BLUD Puskesmas	100	%	683.702.000	Peningkatan BLUD Puskesmas Pada Puskesmas Curug	UPTD Puskesmas	Persentase Tingkat Kemandirian Keuangan BLUD Puskesmas	100	%	683.702.000	
Peningkatan BLUD Puskesmas Pada Puskesmas Gempol	UPTD Puskesmas	Persentase Tingkat Kemandirian Keuangan BLUD Puskesmas	100	%	1.233.791.000	Peningkatan BLUD Puskesmas Pada Puskesmas Gempol	UPTD Puskesmas	Persentase Tingkat Kemandirian Keuangan BLUD Puskesmas	100	%	1.233.791.000	
Peningkatan BLUD Puskesmas Pada Puskesmas Jatisari	UPTD Puskesmas	Persentase Tingkat Kemandirian Keuangan BLUD Puskesmas	100	%	2.678.584.000	Peningkatan BLUD Puskesmas Pada Puskesmas Jatisari	UPTD Puskesmas	Persentase Tingkat Kemandirian Keuangan BLUD Puskesmas	100	%	2.678.584.000	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting		
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)
Peningkatan BLUD Puskesmas Pada Puskesmas Jayakarta	UPTD Puskesmas	Persentase Tingkat Kemandirian Keuangan BLUD Puskesmas	100	%	1.256.622.000	Peningkatan BLUD Puskesmas Pada Puskesmas Jayakarta	UPTD Puskesmas	Persentase Tingkat Kemandirian Keuangan BLUD Puskesmas	100	%	1.256.622.000	
Peningkatan BLUD Puskesmas Pada Puskesmas Jomin	UPTD Puskesmas	Persentase Tingkat Kemandirian Keuangan BLUD Puskesmas	100	%	741.796.000	Peningkatan BLUD Puskesmas Pada Puskesmas Jomin	UPTD Puskesmas	Persentase Tingkat Kemandirian Keuangan BLUD Puskesmas	100	%	741.796.000	
Peningkatan BLUD Puskesmas Pada Puskesmas Kalangsari	UPTD Puskesmas	Persentase Tingkat Kemandirian Keuangan BLUD Puskesmas	100	%	1.358.364.000	Peningkatan BLUD Puskesmas Pada Puskesmas Kalangsari	UPTD Puskesmas	Persentase Tingkat Kemandirian Keuangan BLUD Puskesmas	100	%	1.358.364.000	
Peningkatan BLUD Puskesmas Pada Puskesmas Karawang	UPTD Puskesmas	Persentase Tingkat Kemandirian Keuangan BLUD Puskesmas	100	%	1.252.936.000	Peningkatan BLUD Puskesmas Pada Puskesmas Karawang	UPTD Puskesmas	Persentase Tingkat Kemandirian Keuangan BLUD Puskesmas	100	%	1.252.936.000	
Peningkatan BLUD Puskesmas Pada Puskesmas Karawang Kulon	UPTD Puskesmas	Persentase Tingkat Kemandirian Keuangan BLUD Puskesmas	100	%	537.300.000	Peningkatan BLUD Puskesmas Pada Puskesmas Karawang Kulon	UPTD Puskesmas	Persentase Tingkat Kemandirian Keuangan BLUD Puskesmas	100	%	537.300.000	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting		
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)
Peningkatan BLUD Puskesmas Pada Puskesmas Kertamukti	UPTD Puskesmas	Persentase Tingkat Kemandirian Keuangan BLUD Puskesmas	100	%	1.921.052.000	Peningkatan BLUD Puskesmas Pada Puskesmas Kertamukti	UPTD Puskesmas	Persentase Tingkat Kemandirian Keuangan BLUD Puskesmas	100	%	1.921.052.000	
Peningkatan BLUD Puskesmas Pada Puskesmas Klari	UPTD Puskesmas	Persentase Tingkat Kemandirian Keuangan BLUD Puskesmas	100	%	1.748.634.000	Peningkatan BLUD Puskesmas Pada Puskesmas Klari	UPTD Puskesmas	Persentase Tingkat Kemandirian Keuangan BLUD Puskesmas	100	%	1.748.634.000	
Peningkatan BLUD Puskesmas Pada Puskesmas Kotabaru	UPTD Puskesmas	Persentase Tingkat Kemandirian Keuangan BLUD Puskesmas	100	%	1.286.668.000	Peningkatan BLUD Puskesmas Pada Puskesmas Kotabaru	UPTD Puskesmas	Persentase Tingkat Kemandirian Keuangan BLUD Puskesmas	100	%	1.286.668.000	
Peningkatan BLUD Puskesmas Pada Puskesmas Kutamukti	UPTD Puskesmas	Persentase Tingkat Kemandirian Keuangan BLUD Puskesmas	100	%	1.278.408.000	Peningkatan BLUD Puskesmas Pada Puskesmas Kutamukti	UPTD Puskesmas	Persentase Tingkat Kemandirian Keuangan BLUD Puskesmas	100	%	1.278.408.000	
Peningkatan BLUD Puskesmas Pada Puskesmas Kutawaluya	UPTD Puskesmas	Persentase Tingkat Kemandirian Keuangan BLUD Puskesmas	100	%	1.587.277.000	Peningkatan BLUD Puskesmas Pada Puskesmas Kutawaluya	UPTD Puskesmas	Persentase Tingkat Kemandirian Keuangan BLUD Puskesmas	100	%	1.587.277.000	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting		
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)
Peningkatan BLUD Puskesmasl Pada Puskesmas Lemah Duhur	UPTD Puskesmas	Persentase Tingkat Kemandirian Keuangan BLUD Puskesmas	100	%	1.033.673.000	Peningkatan BLUD Puskesmasl Pada Puskesmas Lemah Duhur	UPTD Puskesmas	Persentase Tingkat Kemandirian Keuangan BLUD Puskesmas	100	%	1.033.673.000	
Peningkatan BLUD Puskesmas Pada Puskesmas Lemahabang	UPTD Puskesmas	Persentase Tingkat Kemandirian Keuangan BLUD Puskesmas	100	%	2.500.311.000	Peningkatan BLUD Puskesmas Pada Puskesmas Lemahabang	UPTD Puskesmas	Persentase Tingkat Kemandirian Keuangan BLUD Puskesmas	100	%	2.500.311.000	
Peningkatan BLUD Puskesmas Pada Puskesmas Loji	UPTD Puskesmas	Persentase Tingkat Kemandirian Keuangan BLUD Puskesmas	100	%	1.871.287.000	Peningkatan BLUD Puskesmas Pada Puskesmas Loji	UPTD Puskesmas	Persentase Tingkat Kemandirian Keuangan BLUD Puskesmas	100	%	1.871.287.000	
Peningkatan BLUD Puskesmas Pada Puskesmas Majalaya	UPTD Puskesmas	Persentase Tingkat Kemandirian Keuangan BLUD Puskesmas	100	%	1.271.362.000	Peningkatan BLUD Puskesmas Pada Puskesmas Majalaya	UPTD Puskesmas	Persentase Tingkat Kemandirian Keuangan BLUD Puskesmas	100	%	1.271.362.000	
Peningkatan BLUD Puskesmas Pada Puskesmas Medang Asem	UPTD Puskesmas	Persentase Tingkat Kemandirian Keuangan BLUD Puskesmas	100	%	1.443.200.000	Peningkatan BLUD Puskesmas Pada Puskesmas Medang Asem	UPTD Puskesmas	Persentase Tingkat Kemandirian Keuangan BLUD Puskesmas	100	%	1.443.200.000	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting		
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)
Peningkatan BLUD Puskesmas Pada Puskesmas Nagasari	UPTD Puskesmas	Persentase Tingkat Kemandirian Keuangan BLUD Puskesmas	100	%	700.884.000	Peningkatan BLUD Puskesmas Pada Puskesmas Nagasari	UPTD Puskesmas	Persentase Tingkat Kemandirian Keuangan BLUD Puskesmas	100	%	700.884.000	
Peningkatan BLUD Puskesmas Pada Puskesmas Pacing	UPTD Puskesmas	Persentase Tingkat Kemandirian Keuangan BLUD Puskesmas	100	%	524.792.000	Peningkatan BLUD Puskesmas Pada Puskesmas Pacing	UPTD Puskesmas	Persentase Tingkat Kemandirian Keuangan BLUD Puskesmas	100	%	524.792.000	
Peningkatan BLUD Puskesmas Pada Puskesmas Pakisjaya	UPTD Puskesmas	Persentase Tingkat Kemandirian Keuangan BLUD Puskesmas	100	%	1.528.415.000	Peningkatan BLUD Puskesmas Pada Puskesmas Pakisjaya	UPTD Puskesmas	Persentase Tingkat Kemandirian Keuangan BLUD Puskesmas	100	%	1.528.415.000	
Peningkatan BLUD Puskesmas Pada Puskesmas Pangkalan	UPTD Puskesmas	Persentase Tingkat Kemandirian Keuangan BLUD Puskesmas	100	%	834.438.000	Peningkatan BLUD Puskesmas Pada Puskesmas Pangkalan	UPTD Puskesmas	Persentase Tingkat Kemandirian Keuangan BLUD Puskesmas	100	%	834.438.000	
Peningkatan BLUD Puskesmas Pada Puskesmas Pasirukem	UPTD Puskesmas	Persentase Tingkat Kemandirian Keuangan BLUD Puskesmas	100	%	2.147.523.000	Peningkatan BLUD Puskesmas Pada Puskesmas Pasirukem	UPTD Puskesmas	Persentase Tingkat Kemandirian Keuangan BLUD Puskesmas	100	%	2.147.523.000	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting		
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)
Peningkatan BLUD Puskesmas Pada Puskesmas Pedes	UPTD Puskesmas	Persentase Tingkat Kemandirian Keuangan BLUD Puskesmas	100	%	2.493.979.000	Peningkatan BLUD Puskesmas Pada Puskesmas Pedes	UPTD Puskesmas	Persentase Tingkat Kemandirian Keuangan BLUD Puskesmas	100	%	2.493.979.000	
Peningkatan BLUD Puskesmas Pada Puskesmas Plawad	UPTD Puskesmas	Persentase Tingkat Kemandirian Keuangan BLUD Puskesmas	100	%	868.392.000	Peningkatan BLUD Puskesmas Pada Puskesmas Plawad	UPTD Puskesmas	Persentase Tingkat Kemandirian Keuangan BLUD Puskesmas	100	%	868.392.000	
Peningkatan BLUD Puskesmas Pada Puskesmas Purwasari	UPTD Puskesmas	Persentase Tingkat Kemandirian Keuangan BLUD Puskesmas	100	%	1.382.416.000	Peningkatan BLUD Puskesmas Pada Puskesmas Purwasari	UPTD Puskesmas	Persentase Tingkat Kemandirian Keuangan BLUD Puskesmas	100	%	1.382.416.000	
Peningkatan BLUD Puskesmas Pada Puskesmas Rawamerta	UPTD Puskesmas	Persentase Tingkat Kemandirian Keuangan BLUD Puskesmas	100	%	1.329.426.000	Peningkatan BLUD Puskesmas Pada Puskesmas Rawamerta	UPTD Puskesmas	Persentase Tingkat Kemandirian Keuangan BLUD Puskesmas	100	%	1.329.426.000	
Peningkatan BLUD Puskesmas Pada Puskesmas Rengasdengklok	UPTD Puskesmas	Persentase Tingkat Kemandirian Keuangan BLUD Puskesmas	100	%	3.510.360.000	Peningkatan BLUD Puskesmas Pada Puskesmas Rengasdengklok	UPTD Puskesmas	Persentase Tingkat Kemandirian Keuangan BLUD Puskesmas	100	%	3.510.360.000	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting		
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)
Peningkatan BLUD Puskesmas Pada Puskesmas Sukatani	UPTD Puskesmas	Persentase Tingkat Kemandirian Keuangan BLUD Puskesmas	100	%	1.174.817.000	Peningkatan BLUD Puskesmas Pada Puskesmas Sukatani	UPTD Puskesmas	Persentase Tingkat Kemandirian Keuangan BLUD Puskesmas	100	%	1.174.817.000	
Peningkatan BLUD Puskesmas Pada Puskesmas Sungaibuntu	UPTD Puskesmas	Persentase Tingkat Kemandirian Keuangan BLUD Puskesmas	100	%	923.590.000	Peningkatan BLUD Puskesmas Pada Puskesmas Sungaibuntu	UPTD Puskesmas	Persentase Tingkat Kemandirian Keuangan BLUD Puskesmas	100	%	923.590.000	
Peningkatan BLUD Puskesmas Pada Puskesmas Telagasari	UPTD Puskesmas	Persentase Tingkat Kemandirian Keuangan BLUD Puskesmas	100	%	2.333.248.000	Peningkatan BLUD Puskesmas Pada Puskesmas Telagasari	UPTD Puskesmas	Persentase Tingkat Kemandirian Keuangan BLUD Puskesmas	100	%	2.333.248.000	
Peningkatan BLUD Puskesmas Pada Puskesmas Tanjungpura	UPTD Puskesmas	Persentase Tingkat Kemandirian Keuangan BLUD Puskesmas	100	%	952.398.000	Peningkatan BLUD Puskesmas Pada Puskesmas Tanjungpura	UPTD Puskesmas	Persentase Tingkat Kemandirian Keuangan BLUD Puskesmas	100	%	952.398.000	
Peningkatan BLUD Puskesmas Pada Puskesmas Telukjambe	UPTD Puskesmas	Persentase Tingkat Kemandirian Keuangan BLUD Puskesmas	100	%	1.348.059.000	Peningkatan BLUD Puskesmas Pada Puskesmas Telukjambe	UPTD Puskesmas	Persentase Tingkat Kemandirian Keuangan BLUD Puskesmas	100	%	1.348.059.000	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting		
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)
Peningkatan BLUD Puskesmas Pada Puskesmas Tempuran	UPTD Puskesmas	Persentase Tingkat Kemandirian Keuangan BLUD Puskesmas	100	%	1.615.016.000	Peningkatan BLUD Puskesmas Pada Puskesmas Tempuran	UPTD Puskesmas	Persentase Tingkat Kemandirian Keuangan BLUD Puskesmas	100	%	1.615.016.000	
Peningkatan BLUD Puskesmas Pada Puskesmas Tirtajaya	UPTD Puskesmas	Persentase Tingkat Kemandirian Keuangan BLUD Puskesmas	100	%	2.871.081.000	Peningkatan BLUD Puskesmas Pada Puskesmas Tirtajaya	UPTD Puskesmas	Persentase Tingkat Kemandirian Keuangan BLUD Puskesmas	100	%	2.871.081.000	
Peningkatan BLUD Puskesmas Pada Puskesmas Tirtamulya	UPTD Puskesmas	Persentase Tingkat Kemandirian Keuangan BLUD Puskesmas	100	%	1.884.037.000	Peningkatan BLUD Puskesmas Pada Puskesmas Tirtamulya	UPTD Puskesmas	Persentase Tingkat Kemandirian Keuangan BLUD Puskesmas	100	%	1.884.037.000	
Peningkatan BLUD Puskesmas Pada Puskesmas Tunggakjati	UPTD Puskesmas	Persentase Tingkat Kemandirian Keuangan BLUD Puskesmas	100	%	1.271.395.000	Peningkatan BLUD Puskesmas Pada Puskesmas Tunggakjati	UPTD Puskesmas	Persentase Tingkat Kemandirian Keuangan BLUD Puskesmas	100	%	1.271.395.000	
Peningkatan BLUD Puskesmas Pada Puskesmas Wadas	UPTD Puskesmas	Persentase Tingkat Kemandirian Keuangan BLUD Puskesmas	100	%	949.354.000	Peningkatan BLUD Puskesmas Pada Puskesmas Wadas	UPTD Puskesmas	Persentase Tingkat Kemandirian Keuangan BLUD Puskesmas	100	%	949.354.000	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting		
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)
Peningkatan BLUD Puskesmas Pada Puskesmas Wanakerta	UPTD Puskesmas	Persentase Tingkat Kemandirian Keuangan BLUD Puskesmas	100	%	1.713.219.000	Peningkatan BLUD Puskesmas Pada Puskesmas Wanakerta	UPTD Puskesmas	Persentase Tingkat Kemandirian Keuangan BLUD Puskesmas	100	%	1.713.219.000	
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan	Persentase RS Rujukan dan Faskes Dasar yang terakreditasi	100	%	307.453.608.850	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan	Persentase RS Rujukan dan Faskes Dasar yang terakreditasi	100	%	307.453.608.850	
		Persentase Rata-rata Capaian SPM	100	%				Persentase Rata-rata Capaian SPM	100	%		
		Persentase Balita Gizi Kurang	16	%				Persentase Balita Gizi Kurang	16	%		
		Persentase Desa/Kelurahan STBM	90,61	%				Persentase Desa/Kelurahan STBM	90,61	%		
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan Dasar dan Rujukan yang difasilitasi	54	Faskes	199.508.416.950	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah	Dinas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan Dasar dan Rujukan yang difasilitasi	54	Faskes	199.508.416.950	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting		
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(10)	(11)	(12)
						Kabupaten/Kota						
Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Kec. Rengasdengklok	Jumlah Pembangunan RSUD yang dilaksanakan	1	Gedung	157.782.831.950	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Kec. Rengasdengklok	Jumlah Pembangunan RSUD yang dilaksanakan	1	Gedung	157.782.831.950	
Pembangunan Puskesmas	UPTD Puskesmas	Jumlah Pembangunan Puskesmas dengan Tempat Perawatan	6	Puskemas	29.489.120.000	Pembangunan Puskesmas	UPTD Puskesmas	Jumlah Pembangunan Puskesmas dengan Tempat Perawatan	6	Puskemas	29.489.120.000	
Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan	Jumlah rumah tunggu pasien rujukan	2	Unit	4.500.000.000	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan	Jumlah rumah tunggu pasien rujukan	2	Unit	4.500.000.000	
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan	Jumlah Paket pengadaan Alat Kesehatan	1	paket	357.000.000	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan	Jumlah Paket pengadaan Alat Kesehatan	1	paket	357.000.000	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting		
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)
Pengadaan Obat, Vaksin	Dinas Kesehatan	Persentase Ketersediaan Obat Essensial di Puskesmas	100	%	4.148.729.300	Pengadaan Obat, Vaksin	Dinas Kesehatan	Persentase Ketersediaan Obat Essensial di Puskesmas	100	%	4.148.729.300	
Pengadaan Bahan Habis Pakai	Dinas Kesehatan	Jumlah Paket pengadaan bahan habis pakai	1	paket	3.230.735.700	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Dinas Kesehatan	Jumlah Paket pengadaan bahan habis pakai	1	paket	3.230.735.700	
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Karawang	Persentase rata-rata capaian Standar Pelayanan Minimal	100	Perse ntase	103.835.110.500	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Karawang	Persentase rata-rata capaian Standar Pelayanan Minimal	100	Perse ntase	103.835.110.500	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Kab. Karawang	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil	100	%	6.332.757.800	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Kab. Karawang	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil	100	%	6.332.757.800	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Kab. Karawang	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan pesalinan	100	%	81.719.700	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Kab. Karawang	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan pesalinan	100	%	81.719.700	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting		
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Kab. Karawang	Presentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100	%	27.729.200	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Kab. Karawang	Presentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100	%	27.729.200	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Kab. Karawang	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar	100	%	85.319.800	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Kab. Karawang	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar	100	%	85.319.800	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Kab. Karawang	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	%	14.660.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Kab. Karawang	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	%	14.660.000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Kab. Karawang	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100	%	59.660.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Kab. Karawang	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100	%	59.660.000	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting		
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(10)	(11)	(12)
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Kab. Karawang	Persentase warga negara usia 60 tahun Keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100	%	39.140.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Kab. Karawang	Persentase warga negara usia 60 tahun Keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100	%	39.140.000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Kab. Karawang	Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100	%	32.050.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Kab. Karawang	Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100	%	32.050.000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Kab. Karawang	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	%	32.210.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Kab. Karawang	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	%	32.210.000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Kab. Karawang	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100	%	131.915.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Kab. Karawang	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100	%	131.915.000	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting		
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		(12)	
		jiwa sesuai standar										
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Kab. Karawang	Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100	%	267.774.200	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Kab. Karawang	Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100	%	267.774.200	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Kab. Karawang	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100	%	822.300.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Kab. Karawang	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100	%	822.300.000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau	Kab. Karawang	Persentase Masyarakat yang dilayani di lokasi Bencana	100	%	59.580.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat	Kab. Karawang	Persentase Masyarakat yang dilayani di lokasi Bencana	100	%	59.580.000	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting		
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(10)	(11)	(12)
Berpotensi Bencana						Bencana dan/atau Berpotensi Bencana						
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kab. Karawang	Prevalensi Stunting(pendek dan sangat pendek) pada balita	12,5	%	434.486.600	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kab. Karawang	Prevalensi Stunting(pendek dan sangat pendek) pada balita	12,5	%	434.486.600	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kab. Karawang	Persentase Puskesmas Menyelenggarakan Kesehatan Kerja Dasar	100	%	70.393.200	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kab. Karawang	Persentase Puskesmas Menyelenggarakan Kesehatan Kerja Dasar	100	%	70.393.200	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kab. Karawang	Persentase penduduk yang memiliki akses berkelanjutan terhadap sumber air minum berkualitas (layak)	85	%	1.136.820.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kab. Karawang	Persentase penduduk yang memiliki akses berkelanjutan terhadap sumber air minum berkualitas (layak)	85	%	1.136.820.000	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting		
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Kab. Karawang	Persentase puskesmas menyelenggarakan kesehatan tradisional	50	%	21.160.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Kab. Karawang	Persentase puskesmas menyelenggarakan kesehatan tradisional	50	%	21.160.000	
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kab. Karawang	Persentase kasus KLB penyakit/keracunan pangan terlacak/investigasi	100	%	310.630.000	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kab. Karawang	Persentase kasus KLB penyakit/keracunan pangan terlacak/investigasi	100	%	310.630.000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Kab. Karawang	Persentase pasien gangguan jiwa dan NAPZA yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	70	%	28.300.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Kab. Karawang	Persentase pasien gangguan jiwa dan NAPZA yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	70	%	28.300.000	
Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Kab. Karawang	Jumlah pelayanan kesehatan khusus yang dilaksanakan	3	jenis	515.663.800	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Kab. Karawang	Jumlah pelayanan kesehatan khusus yang dilaksanakan	3	jenis	515.663.800	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting		
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(10)	(11)	(12)
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kab. Karawang	Persentase Penderita Penyakit Menular dan Tidak Menular Mendapat Perawatan Sesuai Standar	100	%	553.830.000	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kab. Karawang	Persentase Penderita Penyakit Menular dan Tidak Menular Mendapat Perawatan Sesuai Standar	100	%	553.830.000	
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Kab. Karawang	Persentase Penduduk yang mendapatkan jaminan kesehatan menuju Universal Health Coverage (UHC)	100	%	85.904.060.000	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Kab. Karawang	Persentase Penduduk yang mendapatkan jaminan kesehatan menuju Universal Health Coverage (UHC)	100	%	85.904.060.000	
Operasional Pelayanan Puskesmas Adiarsa	UPTD Puskesmas					Operasional Pelayanan Puskesmas Adiarsa	UPTD Puskesmas					
Operasional Pelayanan Puskesmas Anggadita	UPTD Puskesmas					Operasional Pelayanan Puskesmas Anggadita	UPTD Puskesmas					

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Operasional Pelayanan Puskesmas Balongsari	UPTD Puskesmas				Operasional Pelayanan Puskesmas Balongsari	UPTD Puskesmas				
Operasional Pelayanan Puskesmas Batujaya	UPTD Puskesmas				Operasional Pelayanan Puskesmas Batujaya	UPTD Puskesmas				
Operasional Pelayanan Puskesmas Bayurlor	UPTD Puskesmas				Operasional Pelayanan Puskesmas Bayurlor	UPTD Puskesmas				
Operasional Pelayanan Puskesmas Ciampel	UPTD Puskesmas				Operasional Pelayanan Puskesmas Ciampel	UPTD Puskesmas				
Operasional Pelayanan Puskesmas Cibuaya	UPTD Puskesmas				Operasional Pelayanan Puskesmas Cibuaya	UPTD Puskesmas				
Operasional Pelayanan Puskesmas Cicinde	UPTD Puskesmas				Operasional Pelayanan Puskesmas Cicinde	UPTD Puskesmas				
Operasional Pelayanan Puskesmas Cikampek	UPTD Puskesmas				Operasional Pelayanan Puskesmas Cikampek	UPTD Puskesmas				
Operasional Pelayanan Puskesmas Cikampek Utara	UPTD Puskesmas				Operasional Pelayanan Puskesmas	UPTD Puskesmas				

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
					Cikampek Utara					
Operasional Pelayanan Puskesmas Cilamaya	UPTD Puskesmas				Operasional Pelayanan Puskesmas Cilamaya	UPTD Puskesmas				
Operasional Pelayanan Puskesmas Curug	UPTD Puskesmas				Operasional Pelayanan Puskesmas Curug	UPTD Puskesmas				
Operasional Pelayanan Puskesmas Gempol	UPTD Puskesmas				Operasional Pelayanan Puskesmas Gempol	UPTD Puskesmas				
Operasional Pelayanan Puskesmas Jatisari	UPTD Puskesmas				Operasional Pelayanan Puskesmas Jatisari	UPTD Puskesmas				
Operasional Pelayanan Puskesmas Jayakarta	UPTD Puskesmas				Operasional Pelayanan Puskesmas Jayakarta	UPTD Puskesmas				
Operasional Pelayanan Puskesmas Jomin	UPTD Puskesmas				Operasional Pelayanan Puskesmas Jomin	UPTD Puskesmas				
Operasional Pelayanan Puskesmas Kalangsari	UPTD Puskesmas				Operasional Pelayanan Puskesmas Kalangsari	UPTD Puskesmas				

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Operasional Pelayanan Puskesmas Karawang	UPTD Puskesmas				Operasional Pelayanan Puskesmas Karawang	UPTD Puskesmas				
Operasional Pelayanan Puskesmas Karawang Kulon	UPTD Puskesmas				Operasional Pelayanan Puskesmas Karawang Kulon	UPTD Puskesmas				
Operasional Pelayanan Puskesmas Kertamukti	UPTD Puskesmas				Operasional Pelayanan Puskesmas Kertamukti	UPTD Puskesmas				
Operasional Pelayanan Puskesmas Klari	UPTD Puskesmas				Operasional Pelayanan Puskesmas Klari	UPTD Puskesmas				
Operasional Pelayanan Puskesmas Kotabaru	UPTD Puskesmas				Operasional Pelayanan Puskesmas Kotabaru	UPTD Puskesmas				
Operasional Pelayanan Puskesmas Kutamukti	UPTD Puskesmas				Operasional Pelayanan Puskesmas Kutamukti	UPTD Puskesmas				
Operasional Pelayanan Puskesmas Kutawaluya	UPTD Puskesmas				Operasional Pelayanan Puskesmas Kutawaluya	UPTD Puskesmas				
Operasional Pelayanan	UPTD Puskesmas				Operasional Pelayanan	UPTD Puskesmas				

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Puskesmas Lemah Duhur					Puskesmas Lemah Duhur					
Operasional Pelayanan Puskesmas Lemahabang	UPTD Puskesmas				Operasional Pelayanan Puskesmas Lemahabang	UPTD Puskesmas				
Operasional Pelayanan Puskesmas Loji	UPTD Puskesmas				Operasional Pelayanan Puskesmas Loji	UPTD Puskesmas				
Operasional Pelayanan Puskesmas Majalaya	UPTD Puskesmas				Operasional Pelayanan Puskesmas Majalaya	UPTD Puskesmas				
Operasional Pelayanan Puskesmas Medangasem	UPTD Puskesmas				Operasional Pelayanan Puskesmas Medangasem	UPTD Puskesmas				
Operasional Pelayanan Puskesmas Nagasari	UPTD Puskesmas				Operasional Pelayanan Puskesmas Nagasari	UPTD Puskesmas				
Operasional Pelayanan Puskesmas Pacing	UPTD Puskesmas				Operasional Pelayanan Puskesmas Pacing	UPTD Puskesmas				
Operasional Pelayanan Puskesmas Pakisjaya	UPTD Puskesmas				Operasional Pelayanan Puskesmas Pakisjaya	UPTD Puskesmas				

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
Operasional Pelayanan Puskesmas Pangkalan	UPTD Puskesmas				Operasional Pelayanan Puskesmas Pangkalan	UPTD Puskesmas				
Operasional Pelayanan Puskesmas Pasirukem	UPTD Puskesmas				Operasional Pelayanan Puskesmas Pasirukem	UPTD Puskesmas				
Operasional Pelayanan Puskesmas Pedes	UPTD Puskesmas				Operasional Pelayanan Puskesmas Pedes	UPTD Puskesmas				
Operasional Pelayanan Puskesmas Plawad	UPTD Puskesmas				Operasional Pelayanan Puskesmas Plawad	UPTD Puskesmas				
Operasional Pelayanan Puskesmas Purwasari	UPTD Puskesmas				Operasional Pelayanan Puskesmas Purwasari	UPTD Puskesmas				
Operasional Pelayanan Puskesmas Rawamerta	UPTD Puskesmas				Operasional Pelayanan Puskesmas Rawamerta	UPTD Puskesmas				
Operasional Pelayanan Puskesmas Rengasdengklok	UPTD Puskesmas				Operasional Pelayanan Puskesmas Rengasdengklok	UPTD Puskesmas				
Operasional Pelayanan	UPTD Puskesmas				Operasional Pelayanan	UPTD Puskesmas				

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Puskesmas Sukatani					Puskesmas Sukatani					
Operasional Pelayanan Puskesmas Sungai Buntu	UPTD Puskesmas				Operasional Pelayanan Puskesmas Sungai Buntu	UPTD Puskesmas				
Operasional Pelayanan Puskesmas Tanjung Pura	UPTD Puskesmas				Operasional Pelayanan Puskesmas Tanjung Pura	UPTD Puskesmas				
Operasional Pelayanan Puskesmas Telagasari	UPTD Puskesmas				Operasional Pelayanan Puskesmas Telagasari	UPTD Puskesmas				
Operasional Pelayanan Puskesmas TelukJambe	UPTD Puskesmas				Operasional Pelayanan Puskesmas TelukJambe	UPTD Puskesmas				
Operasional Pelayanan Puskesmas Tempuran	UPTD Puskesmas				Operasional Pelayanan Puskesmas Tempuran	UPTD Puskesmas				
Operasional Pelayanan Puskesmas Tirtajaya	UPTD Puskesmas				Operasional Pelayanan Puskesmas Tirtajaya	UPTD Puskesmas				
Operasional Pelayanan Puskesmas Tirtamulya	UPTD Puskesmas				Operasional Pelayanan Puskesmas Tirtamulya	UPTD Puskesmas				

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting		
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)
Operasional Pelayanan Puskesmas Tunggakjati	UPTD Puskesmas					Operasional Pelayanan Puskesmas Tunggakjati	UPTD Puskesmas					
Operasional Pelayanan Puskesmas Wadas	UPTD Puskesmas					Operasional Pelayanan Puskesmas Wadas	UPTD Puskesmas					
Operasional Pelayanan Puskesmas Wanakerta	UPTD Puskesmas					Operasional Pelayanan Puskesmas Wanakerta	UPTD Puskesmas					
Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kab. Karawang	Jumlah faskes yang menyediakan pelayanan telemedicine berkualitas	53	Faskes	29.670.000	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kab. Karawang	Jumlah faskes yang menyediakan pelayanan telemedicine berkualitas	53	Faskes	29.670.000	
Operasional Pelayanan Puskesmas	Kab. Karawang	Persentase Pemanfaatan Dana Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas	100	%	-	Operasional Pelayanan Puskesmas	Kab. Karawang	Persentase Pemanfaatan Dana Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas	100	%	-	
Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	UPTD Puskesmas	Persentase pelayanan kesehatan laboratorium kesehatan daerah	100	%	3.051.002.200	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	UPTD Puskesmas	Persentase pelayanan kesehatan laboratorium kesehatan daerah	100	%	3.051.002.200	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting		
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)
Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Kab. Karawang	Jumlah Puskesmas Terakreditasi Utama	7	Pusk esma s	1.577.651.600	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Kab. Karawang	Jumlah Puskesmas Terakreditasi Utama	7	Pusk esma s	1.577.651.600	
Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Kab. Karawang	Persentase Kejadian kasus ikutan pasca imunisasi yang tertangani	100	%	496.031.400	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Kab. Karawang	Persentase Kejadian kasus ikutan pasca imunisasi yang tertangani	100	%	496.031.400	
Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Kab. Karawang	Persentase kasus gawat darurat yang tertangani	100	%	1.718.596.000	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Kab. Karawang	Persentase kasus gawat darurat yang tertangani	100	%	1.718.596.000	
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Kab. Karawang	Persentase Puskesmas menggunakan Sistem Informasi Kesehatan	100	%	962.657.600	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Kab. Karawang	Persentase Puskesmas menggunakan Sistem Informasi Kesehatan	100	%	962.657.600	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting	
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian			Kebutuhan Dana (Rp.000)
(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)
Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Kab. Karawang	Jumlah Puskesmas menggunakan SIKDA Generik	50	Pusk esma s	962.657.600	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Kab. Karawang	Jumlah Puskesmas menggunakan SIKDA Generik	50	Pusk esma s	962.657.600	
Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Kab. Karawang	Jumlah Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	1	Paket	-	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Kab. Karawang	Jumlah Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	1	Paket	-	
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Karawang	Persentase Fasilitas Kesehatan melaksanakan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100	%	3.147.423.800	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Karawang	Persentase Fasilitas Kesehatan melaksanakan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100	%	3.147.423.800	
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan	Kab. Karawang	Persentase RS dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memiliki surat ijin	100	%	202.044.000	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit	Kab. Karawang	Persentase RS dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memiliki surat ijin operasional (SIO)	100	%	202.044.000	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting		
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)
Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya		operasional (SIO)				Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya						
Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Kab. Karawang	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Puskesmas	91,28	%	1.966.159.800	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Kab. Karawang	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Puskesmas	91,28	%	1.966.159.800	
Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Kab. Karawang	Jumlah Puskesmas dan RS melaksanakan pelayanan rujukan sesuai standar	100	%	979.220.000	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Kab. Karawang	Jumlah Puskesmas dan RS melaksanakan pelayanan rujukan sesuai standar	100	%	979.220.000	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Kab. Karawang	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Memiliki Sumber Daya Manusia	100	%	5.610.285.000	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Kab. Karawang	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Memiliki Sumber Daya Manusia Kesehatan	100	%	5.610.285.000	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting		
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(10)	(11)	(12)
		Kesehatan Sesuai Standar						Sesuai Standar				
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Kab. Karawang	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Melaksanakan Perencanaan dan Pengelolaan Mutu Tenaga Kesehatan	100	%	5.031.000.000	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Kab. Karawang	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Melaksanakan Perencanaan dan Pengelolaan Mutu Tenaga Kesehatan	100	%	5.031.000.000	
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Karawang	Persentase Fasilitas Kesehatan dengan tenaga kesehatan sesuai standar	100	%	5.031.000.000	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Karawang	Persentase Fasilitas Kesehatan dengan tenaga kesehatan sesuai standar	100	%	5.031.000.000	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting		
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(10)	(11)	(12)
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Karawang	Persentase SDM Kesehatan yang mendapat Pendidikan dan Pelatihan sesuai Kompetensi	100	%	579.285.000	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Karawang	Persentase SDM Kesehatan yang mendapat Pendidikan dan Pelatihan sesuai Kompetensi	100	%	579.285.000	
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Karawang	Jumlah SDM yang ditingkatkan kualifikasinya melalui pendidikan dan pelatihan	50	orang	579.285.000	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Karawang	Jumlah SDM yang ditingkatkan kualifikasinya melalui pendidikan dan pelatihan	50	orang	579.285.000	
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Kab. Karawang	Persentase Sarana Penyedia Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, Makanan dan	100	%	122.190.300	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Kab. Karawang	Persentase Sarana Penyedia Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, Makanan dan Minuman yang	100	%	122.190.300	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting		
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)
		Minuman yang memenuhi standar						memenuhi standar				
Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Kab. Karawang	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	100	%	122.190.300	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Kab. Karawang	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	100	%	122.190.300	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting		
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Kab. Karawang	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	1	dokumen	122.190.300	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Kab. Karawang	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	1	dokumen	122.190.300	
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Kab. Karawang	Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat	100	%	11.953.406.600	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Kab. Karawang	Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat	100	%	11.953.406.600	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting		
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(10)	(11)	(12)
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Karawang	Persentase Pelaksanaan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor	100	%	553.406.600	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Karawang	Persentase Pelaksanaan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor	100	%	553.406.600	
Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Kab. Karawang	Jumlah Desa siaga aktif berstrata PURI (Purnama Mandiri)	48	Desa	553.406.600	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Kab. Karawang	Jumlah Desa siaga aktif berstrata PURI (Purnama Mandiri)	48	Desa	553.406.600	
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Karawang	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			11.400.000.000	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah	Kab. Karawang	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			11.400.000.000	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting		
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)
						Kabupaten/Kota						
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kab. Karawang	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1	Dokumen	11.400.000.000	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kab. Karawang	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1	Dokumen	11.400.000.000	

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Tabel 2.33
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan

NO	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1.02.02.2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan	Persentase RS Rujukan dan Faskes Dasar yang terakreditasi	235.428.427.350	
Persentase Rata-rata Capaian SPM					
Persentase Balita Gizi Kurang					
Persentase Desa/Kelurahan STBM					
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan Dasar dan Rujukan yang difasilitasi	176.333.991.950	
1.02.02.2.01.01	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Kec. Rengasdengklok	Jumlah Pembangunan RSUD yang dilaksanakan	157.782.831.950	
1.02.02.2.01.02	Pembangunan Puskesmas	UPTD Puskesmas	Jumlah Pembangunan Puskesmas dengan Tempat Perawatan	18.551.160.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan	Persentase rata-rata capaian Standar Pelayanan Minimal	58.827.549.400	

NO	Program/Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2		3	4	5	6
1.02.02.2.02.26		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Kab. Karawang	Persentase Penduduk yang mendapatkan jaminan kesehatan menuju Universal Health Coverage (UHC)	58.827.549.400	
1.02.02.2.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan	Persentase Fasilitas Kesehatan melaksanakan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	266.886.000	
1.02.02.2.04.04		Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Kab. Karawang	Jumlah Puskesmas dan RS melaksanakan pelayanan rujukan sesuai standar	266.886.000	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1 TELAHAAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur sesuai dengan RPJPN 2005-2025, Presiden terpilih sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2020-2024 telah menetapkan Visi Presiden 2020-2024: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong”.

Untuk melaksanakan visi Presiden 2020-2024 tersebut, Kementerian Kesehatan menjabarkan visi Presiden di bidang kesehatan yaitu menciptakan manusia yang sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan. Guna mendukung peningkatan kualitas manusia Indonesia, termasuk penguatan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing (khususnya di bidang farmasi dan alat kesehatan), Kementerian Kesehatan telah menjabarkan Misi Presiden Tahun 2020-2024, sebagai berikut:

1. Menurunkan angka kematian ibu dan bayi

Angka kematian ibu (maternal mortality rate) dan angka kematian bayi (infant mortality rate) merupakan indikator sensitif untuk mengukur keberhasilan pencapaian pembangunan kesehatan, dan juga sekaligus mengukur pencapaian indeks modal manusia. Pemerintah telah menetapkan penurunan angka kematian ibu sebagai major project, yang harus digarap dengan langkah-langkah strategis, efektif dan efisien.

2. Menurunkan angka stunting pada balita

Proporsi balita stunting sangat penting sebagai parameter pembangunan modal manusia. Seperti halnya penurunan angka kematian ibu, pemerintah juga telah menetapkan percepatan penurunan stunting sebagai major project yang harus digarap dengan langkah-langkah strategis, efektif dan efisien.

3. Memperbaiki pengelolaan Jaminan Kesehatan Nasional

Sebagaimana diketahui bersama, program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah mampu memperbaiki akses pelayanan kesehatan baik ke FKTP maupun FKRTL dan juga telah memperbaiki keadilan (ekualitas) pelayanan kesehatan antar kelompok masyarakat. Namun demikian, pembiayaan JKN selama lima tahun terakhir telah mengalami ketidakseimbangan antara pengeluaran dan pemasukan. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi JKN, Kementerian Kesehatan memiliki peran sentral dalam kendali mutu dan kendali biaya (cost containment).

4. Meningkatkan kemandirian dan penggunaan produk farmasi dan alat kesehatan dalam negeri.

Sesuai dengan peta jalan kemandirian farmasi dan alat kesehatan, pemerintah telah bertekad untuk meningkatkan industri bahan baku obat dan juga peningkatan produksi alat kesehatan dalam negeri. Agar produksi dalam negeri ini dapat diserap oleh pasar, pemerintah harus melakukan langkah-langkah strategis untuk mendorong penggunaan obat dan alat kesehatan produksi dalam negeri.

Guna mewujudkan Misi Presiden dalam Bidang Kesehatan Tahun 2020-2024, Kementerian Kesehatan menetapkan 5 (lima) Tujuan Strategis, yakni:

1. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pendekatan siklus hidup
2. Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan
3. Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit dan pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat
4. Peningkatan sumber daya kesehatan
5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif

Dalam rangka mencapai 5 (lima) Tujuan Strategis Kementerian Kesehatan tersebut di atas, ditetapkan 8 (delapan) Sasaran Strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya kesehatan ibu, anak dan gizi masyarakat

2. Meningkatnya ketersediaan dan mutu fasyankes dasar dan rujukan
3. Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit dan pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat.
4. Meningkatnya akses, kemandirian dan mutu kefarmasian dan alat kesehatan.
5. Meningkatnya pemenuhan SDM Kesehatan dan kompetensi sesuai standar.
6. Terjaminnya pembiayaan kesehatan.
7. Meningkatnya sinergisme pusat dan daerah serta meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih
8. Meningkatnya efektivitas pengelolaan litbangkes dan sistem informasi kesehatan untuk pengambilan keputusan.

Tabel 3.1
Permasalahan Pelayanan Dinas Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No.	Sasaran Jangka Menengah	Permasalahan Pelayanan Dinas Kesehatan	Analisis Faktor	
			Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kesehatan ibu, anak dan gizi masyarakat	Belum optimalnya upaya kesehatan yang dilakukan baik Upaya kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat : Masih adanya kasus kematian ibu dan kematian bayi	Masih kurangnya sarpras pertolongan persalinan di daerah, masih kurangnya nakes terlatih pertolongan persalinan, kurangnya kesadaran masyarakat penitngnya antenatal care	Adanya Perda Penyelenggaraan pelayanan kesehatan, Adanya komitmen pemerintah dalam perencanaan dan penganggaran untuk kesehatan ibu dan anal

No.	Sasaran Jangka Menengah	Permasalahan Pelayanan Dinas Kesehatan	Analisis Faktor	
			Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1	2	3	4	5
2	Meningkatnya ketersediaan dan mutu fasyankes dasar dan rujukan	<p>Belum optimalnya upaya kesehatan yang dilakukan baik Upaya kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat :</p> <p>Belum optimalnya pelayanan kesehatan dasar dan rujukan</p>	<p>Belum adanya grand desain/ rencana induk peningkatan /pengembangan sarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan di Jawa Barat.</p>	Adanya Perda Penyelenggaraan pelayanan kesehatan, Adanya komitmen pemerintah dalam perencanaan dan penganggaran
3	Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit serta pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat	<p>Belum optimalnya upaya kesehatan yang dilakukan baik Upaya kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan</p> <p>Masih tingginya angka kesakitan penyakit menular maupun penyakit tidak menular.</p>	<p>Masih rendahnya Upaya kesehatan promotif dan preventif</p> <p>Terjadinya pergeseran penyakit menular menjadi penyakit tidak menular (Tripel Burden diseases).</p>	Adanya Perda Penyelenggaraan pelayanan kesehatan, Adanya komitmen pemerintah dalam perencanaan dan penganggaran

No.	Sasaran Jangka Menengah	Permasalahan Pelayanan Dinas Kesehatan	Analisis Faktor	
			Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1	2	3	4	5
4	Meningkatnya akses, kemandirian dan mutu kefarmasian dan alat kesehatan	Ketersediaan farmasi tidak sesuai dengan kebutuhan	Upaya kesehatan promotif dan preventif Masih belum menunjukkan Peningkatan terhadap penurunan angka kesakitan	Adanya Perda Penyelenggaraan pelayanan kesehatan,
			Macam layanan dan tenaga kesehatan di FKTP (puskesmas dan klinik swasta) belum cukup efektif dalam memberikan pelayanan promotif dan preventif yang berdampak terhadap menurunnya prevalensi Penyakit Tidak Menular (PTM).	Adanya komitmen pemerintah dalam perencanaan dan penganggaran
5	Meningkatnya pemenuhan SDM Kesehatan dan kompetensi sesuai standar	Masih kurangnya kualitas, kuantitas, dan penyebaran SDM Kesehatan	Perencanaan dan kebijakan pengangkatan PNS tenaga kesehatan masih tersentralisasi di Pusat	Adanya Perda Penyelenggaraan pelayanan kesehatan, Adanya komitmen pemerintah dalam
6	Terjaminnya pembiayaan kesehatan	Belum optimalnya pemanfaatan sumber-sumber	Belum terjalin kuat hubungan/kerjasama antara pemda dengan	Adanya Perda Penyelenggaraan pelayanan Kesehatan,

No.	Sasaran Jangka Menengah	Permasalahan Pelayanan Dinas Kesehatan	Analisis Faktor	
			Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1	2	3	4	5
		pembiayaan kesehatan	filantropi kesehatan dan CSR	Adanya komitmen pemerintah dalam perencanaan dan penganggaran, banyaknya perusahaan yang mau berkontribusi dalam program CSR
		Belum tercapainya target Jaminan Kesehatan menuju Universal Health Coverage (UHC).	Belum banyak masyarakat yang paham pentingnya jaminan kesehatan	Adanya kebijakan Pemda yang menjamin masyarakat miskin mendapatkan jaminan kesehatan
7	Meningkatnya efektivitas pengelolaan litbangkes dan sistem informasi kesehatan untuk pengambilan keputusan	Belum terintegrasinya data sistem informasi kesehatan di tingkat kabupaten	Belum adanya regulasi manajemen system informasi kesehatan di tingkat kabupaten	Adanya Perda Penyelenggaraan pelayanan kesehatan, Adanya komitmen pemerintah dalam perencanaan dan penganggaran

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

3.2.1 Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan kegiatan dalam melaksanakan misi. Tujuan dicanangkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan dan sasaran Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang mengacu pada tujuan dan sasaran Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang.

TUJUAN		SASARAN	
1	Tercapainya Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya
2	Tercapainya Peningkatan Status Gizi Masyarakat dan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak dan Lansia	1	Meningkatnya Perbaikan Gizi Masyarakat
		2	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak dan Lansia
3	Terwujudnya Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat	1	Meningkatnya Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
4	Terwujudnya Jaminan Kesehatan Masyarakat	1	Meningkatnya Jaminan Kesehatan Masyarakat
5	Tercapainya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular	1	Meningkatnya Surveilans, Epidemiologi, Imunisasi dan Kesehatan Matra
		2	Menurunnya Angka Kesakitan dan Kematian Penyakit Menular dan Tidak Menular
6	Terwujudnya Lingkungan Sehat	1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Sehat pada Pemukiman, Tempat-tempat Umum, Institusi dan Industri
7	Tercapainya Peningkatan Standarisasi Pelayanan Kesehatan	1	Meningkatnya Standarisasi Pelayanan Kesehatan
		2	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
8	Tercapainya Pemerataan Obat dan Perbekalan Kesehatan serta Pengawasan Obat dan Sediaan Farmasi	1	Meningkatnya Pemerataan Obat dan Perbekalan Kesehatan serta Pengawasan Obat dan Sediaan Farmasi

TUJUAN		SASARAN	
9	Tercapainya Peningkatan Sarana, Prasarana dan Manajemen Kesehatan	1	Meningkatnya Manajemen Kesehatan
		2	Meningkatnya Pengadaan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya
10	Tercapainya Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	Meningkatnya Pelayanan Administrasi

3.1 PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS

Tabel 3.2
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	1.02.02.2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kab. Karawang	Persentase RS Rujukan dan Faskes Dasar yang terakreditasi	100	%	307.453.608.850	APBD 2	100	%	263.768.732.678
		Persentase Rata-rata Capaian SPM		100	%	100			%		
		Persentase Balita Gizi Kurang		16	%	16			%		
		Persentase Desa/Kelurahan STBM		90,61	%	90,61			%		
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan	Jumlah Fasilitas Kesehatan Dasar dan Rujukan yang difasilitasi	Kab. Karawang	54	Faskes	199.508.416.950	APBD 2	54	Faskes	143.110.239.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	<i>Daerah Kabupaten/Kota</i>										
1.02.02.2.01.01	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Pembangunan RSUD yang dilaksanakan	Kab. Karawang	1	Gedung	157.782.831.950	APBD 2	Pembangunan RSUD Rengas Dengklok Tahun ke-2	1	Gedung	154.871.200.000
1.02.02.2.01.02	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pembangunan Puskesmas dengan Tempat Perawatan	Kab. Karawang	6	Puskesmas	29.489.120.000	APBD 2	Pembangunan 6 Puskesmas rawat inap dan Pembelian tanah 6 lokasi	6	Puskesmas	55.510.239.000
1.02.02.2.01.12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah rumah tunggu pasien rujukan	Kab. Karawang	2	Unit	4.500.000.000	APBD 2	Sewa RTPR Dharma is dan RSCM	2	unit	1.000.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Paket pengadaan Alat Kesehatan	Kab. Karawang	1	paket	357.000.000	APBD 2	Pengadaan Alkes rawat inap Puskesmas	1	paket	60.000.000.000
1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	Persentase Ketersediaan Obat Essensial di Puskesmas	Kab. Karawang	100	%	4.148.729.300	APBD 2		100	%	15.000.000.000
1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Paket pengadaan bahan habis pakai	Kab. Karawang	1	paket	3.230.735.700	APBD 2		1	paket	9.600.000.000
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rata-rata capaian Standar Pelayanan Minimal	Kab. Karawang	100	Persentase	103.835.110.500	APBD 2		100	Perse ntase	118.216.418.278
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil	Kab. Karawang	100	%	6.332.757.800	APBD 2	SPM	100	%	7.766.583.000
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan pesalinan	Kab. Karawang	100	%	81.719.700	APBD 2	SPM	100	%	188.669.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Presentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Kab. Karawang	100	%	27.729.200	APBD 2	SPM	100	%	53.421.000
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar	Kab. Karawang	100	%	85.319.800	APBD 2	SPM	100	%	83.758.000
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kab. Karawang	100	%	14.660.000	APBD 2	SPM	100	%	160.906.000
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Kab. Karawang	100	%	59.660.000	APBD 2	SPM	100	%	393.006.000
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Persentase warga negara usia 60 tahun Keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Kab. Karawang	100	%	39.140.000	APBD 2	SPM	100	%	106.095.174

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	Kab. Karawang	100	%	32.050.000	APBD 2	SPM	100	%	62.695.000
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kab. Karawang	100	%	32.210.000	APBD 2	SPM	100	%	65.037.000
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Kab. Karawang	100	%	131.915.000	APBD 2	SPM	100	%	235.647.000
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Kab. Karawang	100	%	267.774.200	APBD 2	SPM	100	%	346.326.000
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Kab. Karawang	100	%	822.300.000	APBD 2	SPM dan HIBAH KPAIDs	100	%	284.051.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.02.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Persentase Masyarakat yang dilayani di lokasi Bencana	Kab. Karawang	100	%	59.580.000	APBD 2	100	%	821.437.000
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Prevalensi Stunting(pendek dan sangat pendek) pada balita	Kab. Karawang	12,5	%	434.486.600	APBD 2	12,5	%	1.163.608.600
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Persentase Puskesmas Menyelenggarakan Kesehatan Kerja Dasar	Kab. Karawang	100	%	70.393.200	APBD 2	100	%	142.169.000
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Persentase penduduk yang memiliki akses berkelanjutan terhadap sumber air minum berkualitas (layak)	Kab. Karawang	85	%	1.136.820.000	APBD 2	90	%	1.400.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.02.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Persentase puskesmas menyelenggarakan kesehatan tradisional	Kab. Karawang	50	%	21.160.000	APBD 2	60	%	100.091.000
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Persentase kasus KLB penyakit/keracunan pangan terlacak/investigasi	Kab. Karawang	100	%	310.630.000	APBD 2	100	%	374.739.600
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Persentase pasien gangguan jiwa dan NAPZA yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kab. Karawang	70	%	28.300.000	APBD 2	75	%	
1.02.02.2.02.23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah pelayanan kesehatan khusus yang dilaksanakan	Kab. Karawang	3	jenis	515.663.800	APBD 2	3	jenis	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
							1 POLRES				
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase Penderita Penyakit Menular dan Tidak Menular Mendapat Perawatan Sesuai Standar	Kab. Karawang	100	%	553.830.000	APBD 2	Penambahan fogging focus sebanyak 150 titik	100	%	156.876.000
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Persentase Penduduk yang mendapatkan jaminan kesehatan menuju Universal Health Coverage (UHC)	Kab. Karawang	100	%	85.904.060.000	APBD 2	Kenaikan : PBPU BP Rp.1M, Jamkesda Rp.7M, PBI APBD 2 Rp.5M, PBI APBD 1 Rp.20M	100	%	85.994.095.000
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas Adiarsa		Kab. Karawang				APBD 2				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas Anggadita		Kab. Karawang			APBD 2				
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas Balongsari		Kab. Karawang			APBD 2				
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas Batujaya		Kab. Karawang			APBD 2				
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas Bayurlor		Kab. Karawang			APBD 2				
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas Ciampel		Kab. Karawang			APBD 2				
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas Cibuaya		Kab. Karawang			APBD 2				
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas Cicinde		Kab. Karawang			APBD 2				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas Cikampek		Kab. Karawang			APBD 2				
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas Cikampek Utara		Kab. Karawang			APBD 2				
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas Cilamaya		Kab. Karawang			APBD 2				
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas Curug		Kab. Karawang			APBD 2				
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas Gempol		Kab. Karawang			APBD 2				
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas Jatisari		Kab. Karawang			APBD 2				
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas Jayakarta		Kab. Karawang			APBD 2				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas Jomin		Kab. Karawang			APBD 2				
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas Kalangsari		Kab. Karawang			APBD 2				
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas Karawang		Kab. Karawang			APBD 2				
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas Karawang Kulon		Kab. Karawang			APBD 2				
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas Kertamukti		Kab. Karawang			APBD 2				
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas Klari		Kab. Karawang			APBD 2				
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas Kotabaru		Kab. Karawang			APBD 2				
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan		Kab. Karawang			APBD 2				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Puskesmas Kutamukti									
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas Kutawaluya		Kab. Karawang				APBD 2			
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas Lemah Duhur		Kab. Karawang				APBD 2			
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas Lemahabang		Kab. Karawang				APBD 2			
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas Loji		Kab. Karawang				APBD 2			
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas Majalaya		Kab. Karawang				APBD 2			
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas Medangasem		Kab. Karawang				APBD 2			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas Nagasari		Kab. Karawang			APBD 2				
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas Pacing		Kab. Karawang			APBD 2				
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas Pakisjaya		Kab. Karawang			APBD 2				
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas Pangkalan		Kab. Karawang			APBD 2				
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas Pasirukem		Kab. Karawang			APBD 2				
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas Pedes		Kab. Karawang			APBD 2				
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas Plawad		Kab. Karawang			APBD 2				
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan		Kab. Karawang			APBD 2				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Puskesmas Purwasari									
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas Rawamerta		Kab. Karawang				APBD 2			
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas Rengasdengklok		Kab. Karawang				APBD 2			
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas Sukatani		Kab. Karawang				APBD 2			
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas Sungai Buntu		Kab. Karawang				APBD 2			
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas Tanjung Pura		Kab. Karawang				APBD 2			
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas Telagasari		Kab. Karawang				APBD 2			
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan		Kab. Karawang				APBD 2			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Puskesmas TelukJambe										
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas Tempuran		Kab. Karawang				APBD 2				
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas Tirtajaya		Kab. Karawang				APBD 2				
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas Tirtamulya		Kab. Karawang				APBD 2				
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas Tunggakjati		Kab. Karawang				APBD 2				
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas Wadas		Kab. Karawang				APBD 2				
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas Wanakerta		Kab. Karawang				APBD 2				
1.02.02.2.02.30	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas	Jumlah faskes yang menyediakan pelayanan	Kab. Karawang	53	Faskes	29.670.000	APBD 2		53	Faskes es	94.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Pelayanan Kesehatan	telemedicine berkualitas									
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase Pemanfaatan Dana Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas	Kab. Karawang	100	%	-	APBD 2	100	%		
1.02.02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Persentase pelayanan kesehatan laboratorium kesehatan daerah	Kab. Karawang	100	%	3.051.002.200	APBD 2	100	%	13.056.511.904	
1.02.02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas Terakreditasi Utama	Kab. Karawang	7	Puskesmas	1.577.651.600	APBD 2	7	Pusk esma s	3.350.643.000	
1.02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Persentase Kejadian kasus ikutan pasca imunisasi yang tertangani	Kab. Karawang	100	%	496.031.400	APBD 2	100	%	462.440.000	
1.02.02.2.02.38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan	Persentase kasus gawat darurat yang tertangani	Kab. Karawang	100	%	1.718.596.000	APBD 2	HIBAH PMI Rp770.8 50.000	100	%	1.353.613.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)										
1.02.02.2.03	<i>Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi</i>	<i>Persentase Puskesmas menggunakan Sistem Informasi Kesehatan</i>	Kab. Karawang	100	%	962.657.600	APBD 2	100	%	879.236.400	
1.02.02.2.03.01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Puskesmas menggunakan SIKDA Generik	Kab. Karawang	50	Puskesmas	962.657.600	APBD 2	50	Puskesmas	879.236.400	
1.02.02.2.03.03	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Kab. Karawang	1	Paket	-	APBD 2	1	Paket	-	
1.02.02.2.04	<i>Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Persentase Fasilitas Kesehatan melaksanakan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</i>	Kab. Karawang	100	%	3.147.423.800	APBD 2	100	%	1.562.839.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.02.02.2.04.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Persentase RS dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memiliki surat ijin operasional (SIO)	Kab. Karawang	100	%	202.044.000	APBD 2	100	%	202.044.000
1.02.02.2.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Puskesmas	Kab. Karawang	91,28	%	1.966.159.800	APBD 2	91,28	%	740.795.000
1.02.02.2.04.04	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Puskesmas dan RS melaksanakan pelayanan rujukan sesuai standar	Kab. Karawang	100	%	979.220.000	APBD 2	100	%	620.000.000
2	1.02.03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Kab. Karawang	100	%	5.610.285.000	APBD 2	100	%	99.956.960.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.02.03.2.02	<i>Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota</i>	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Melaksanakan Perencanaan dan Pengelolaan Mutu Tenaga Kesehatan	Kab. Karawang	100 %	5.031.000.000	APBD 2		100 %	5.000.000.000	
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Persentase Fasilitas Kesehatan dengan tenaga kesehatan sesuai standar	Kab. Karawang	100 %	5.031.000.000	APBD 2	Insentif Covid.19 if..	100 %	5.000.000.000	
1.02.03.2.03	<i>Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	Persentase SDM Kesehatan yang mendapat Pendidikan dan Pelatihan sesuai Kompetensi	Kab. Karawang	100 %	579.285.000	APBD 2		100 %	94.956.960.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.02.03.2.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang ditingkatkan kualifikasinya melalui pendidikan dan pelatihan	Kab. Karawang	50	orang	579.285.000	APBD 2	50	orang	94.956.960.000
3	1.02.04	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Dan Minuman	Kab. Karawang	100	%	122.190.300	APBD 2	100	%	220.760.000
1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Kab. Karawang	100	%	122.190.300	APBD 2	100	%	220.760.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.02.04.2.01.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Kab. Karawang	1	dokumen	122.190.300	APBD 2	1	dokumen	220.760.000
4	1.02.05	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Kab. Karawang	100	%	11.953.406.600	APBD 2	100	%	13.000.000.000
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor	Kab. Karawang	100	%	553.406.600	APBD 2	100	%	13.000.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Desa siaga aktif berstrata PURI (Purnama Mandiri)	Kab. Karawang	48	Desa	553.406.600	APBD 2		48	Desa	13.000.000.000
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kab. Karawang			11.400.000.000	APBD 2				
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kab. Karawang	1	Dokumen	11.400.000.000	APBD 2	Transpo rt/ insentif kader posyand u (11.875 x 12 bl x Rp.80.0 00)	1	Doku men	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana kerja dan pendanaan Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang berisi Program Pembangunan Daerah (Program Strategis Daerah) dan Program Perangkat Daerah untuk mewujudkan target tujuan dan sasaran Renstra Dinas Kesehatan dan RPJMD Kabupaten Karawang.

Jumlah seluruh program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang di Tahun 2023 sebanyak 5 Program, 18 Kegiatan dan 111 Sub Kegiatan.

Total kebutuhan dana untuk pelaksanaan semua program dan kegiatan ini adalah sebesar Rp. 642.979.623.620 Nilai total untuk tiap sumber pendanaan adalah seperti yang ditunjukkan dapat dilihat pada table 4.1 di bawah ini.

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Tahun 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	1.02.01.2	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</i>	Kab. Karawang	100	Persentase	317.818.657.870	APBD 2	100	Persentase	368.997.286.924	
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Karawang	100	Persentase	479.141.200	APBD 2	100	Persentase	850.000.000	
	1.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Karawang	4	Dokumen	99.703.200	APBD 2	4	Dokumen	450.000.000	
	1.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Karawang	8	Dokumen	379.438.000	APBD 2	8	Dokumen	400.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
		LKPJ, SPM, IKU, IKK, IKI, TAPKIN)									
1.02.01.2.02	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase pelayanan administrasi keuangan yang terlaksana</i>	Kab. Karawang	100	Persentase	233.867.087.080	APBD 2		100	Persentase	284.034.065.424
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (DINKES)	Persentase Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Karawang	100	Persentase	233.845.517.080	APBD 2	Insentif Covid.19 Rp.8.598.000.000	100	Persentase	283.821.118.424
1.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran/ Tahunan SKPD	Kab. Karawang	4	Dokumen	21.570.000	APBD 2		4	Dokumen	212.947.000
1.02.01.2.03	<i>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Puskesmas Menyampaikan Laporan Pengelolaan aset Tepat Waktu</i>	Kab. Karawang	100	Persentase	8.050.000	APBD 2		100	Persentase	69.241.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1.02.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan pengelolaan aset	Kab. Karawang	1	Laporan	8.050.000	APBD 2		1	Laporan	69.241.000
1.02.01.2.05	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Pegawai di Lingkungan Dinas Kesehatan dengan Nilai Kinerja Minimal Baik</i>	Kab. Karawang	100	Persentase	93.250.000	APBD 2		100	Persentase	236.508.000
1.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas dan Perlengkapannya	Kab. Karawang	152	Stel	68.250.000	APBD 2	PDH	152	Stel	211.508.000
1.02.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peraturan perundangan yg disosialisasikan	Kab. Karawang	10	Paket	25.000.000	APBD 2	Pembuatan Perbup BLUD	10	Paket	25.000.000
1.02.01.2.06	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terlaksana</i>	Kab. Karawang	100	Persentase	1.846.890.490	APBD 2		100	Persentase	4.552.619.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Item Pengadaan Komponen Instalasi dan Alat-alat Listrik	Kab. Karawang	1	Paket	12.261.390	APBD 2		1	Paket	30.116.000
1.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Item Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Karawang	1	Paket	635.705.500	APBD 2		1	Paket	2.701.089.000
1.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Item Pengadaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Karawang	1	Paket	94.334.800	APBD 2		1	Paket	130.136.000
1.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Item Pengadaan Barang Logistik kantor	Kab. Karawang	1	Paket	288.544.500	APBD 2		1	Paket	447.158.000
1.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Item Barang Cetak	Kab. Karawang	7	Jenis	152.636.300	APBD 2		7	Jenis	265.608.000
1.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Item Bahan bacaan yang Disediakan	Kab. Karawang	1	Paket	32.000.000	APBD 2		1	Paket	25.000.000
1.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Penyediaan Porsi Makan dan Snack	Kab. Karawang	3	Jenis	263.608.000	APBD 2		3	Jenis	366.650.000
1.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Orang yg Melakukan Perjalanan Dinas	Kab. Karawang	2	Jenis	367.800.000	APBD 2		2	Jenis	586.862.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	
1.02.01.2.07	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan</i>	Kab. Karawang	100	Persentase	2.425.500.000	APBD 2		100	Persentase	-
1.02.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas/Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan yang diadakan	Kab. Karawang	4	Unit	581.600.000	APBD 2	Kendaraan Dinas Pejabat Es III	0	0	-
1.02.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Luas gedung kantor yang dibangun	Kab. Karawang	1	Gedung	1.843.900.000	APBD 2	Pembangunan Gedung Dinkes Blok 4			-
1.02.01.2.08	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Tersedia</i>	Kab. Karawang	100	Persentase	3.120.604.500	APBD 2		100	Persentase	3.020.833.500
1.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai dan Peranko	Kab. Karawang	1772	Buah	21.475.000	APBD 2		1800	Buah	51.122.500
1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Nomor Rekening Penyediaan Tenaga Perbaikan Listrik, Penyediaan Listrik, Air	Kab. Karawang	5	Rekening	1.557.412.500	APBD 2	Antisipasi kenaikan tarif PLN,	5	Rekening	1.379.539.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
		Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet					PAM, TELP				
1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Kontrak Kerja yang Menerima Gaji	Kab. Karawang	46	Orang	1.563.192.000	APBD 2	Petugas Keamanan dan Kebersihan RTPR (6 or x 12 bl)	46	Orang	1.590.172.000
1.02.01.2.09	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase Barang Milik Daerah yang dilakukan Pemeliharaan</i>	Kab. Karawang	100	Persentase	784.610.600	APBD 2		100	Persentase	940.496.000
1.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan yang dilakukan pemeliharaan	Kab. Karawang	49 mobil dan 46 motor	kendaraan	486.732.000	APBD 2		49 mobil dan 46 motor	kendaraan	634.726.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Jenis peralatan dan Mesin Lainnya yang dilakukan Pemeliharaan	Kab. Karawang	5	jenis	57.878.600	APBD 2	5	jenis	65.770.000	
1.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	Kab. Karawang	12	gedung	240.000.000	APBD 2	12	gedung	240.000.000	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Tingkat Kemandirian BLUD UPTD pada Dinas Kesehatan	Kab. Karawang	100	Persentase	75.193.524.000	APBD 2	100	Persentase	75.293.524.000	
1.02.01.2.10.01	Peningkatan BLUD Puskesmas Pada Puskesmas Adiarsa	Persentase Tingkat Kemandirian Keuangan BLUD Puskesmas	Kab. Karawang	100	%	1.541.961.000	APBD 2	100	%	1.543.961.000	
1.02.01.2.10.01	Peningkatan BLUD Puskesmas Pada Puskesmas Anggadita	Persentase Tingkat Kemandirian Keuangan BLUD Puskesmas	Kab. Karawang	100	%	450.353.000	APBD 2	100	%	452.353.000	
1.02.01.2.10.01	Peningkatan BLUD Puskesmas Pada Puskesmas Balongsari	Persentase Tingkat Kemandirian Keuangan BLUD Puskesmas	Kab. Karawang	100	%	928.816.000	APBD 2	100	%	930.816.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	
1.02.01.2.10.01	Peningkatan BLUD Puskesmas Pada Puskesmas Batujaya	Persentase Tingkat Kemandirian Keuangan BLUD Puskesmas	Kab. Karawang	100	%	3.143.469.000	APBD 2		100	%	3.145.469.000
1.02.01.2.10.01	Peningkatan BLUD Puskesmas Pada Puskesmas Bayurlor	Persentase Tingkat Kemandirian Keuangan BLUD Puskesmas	Kab. Karawang	100	%	855.722.000	APBD 2		100	%	857.722.000
1.02.01.2.10.01	Peningkatan BLUD Puskesmas Pada Puskesmas Ciampel	Persentase Tingkat Kemandirian Keuangan BLUD Puskesmas	Kab. Karawang	100	%	1.331.040.000	APBD 2		100	%	1.333.040.000
1.02.01.2.10.01	Peningkatan BLUD Puskesmas Pada Puskesmas Cibuaya	Persentase Tingkat Kemandirian Keuangan BLUD Puskesmas	Kab. Karawang	100	%	2.473.121.000	APBD 2		100	%	2.475.121.000
1.02.01.2.10.01	Peningkatan BLUD Puskesmas Pada Puskesmas Cicinde	Persentase Tingkat Kemandirian Keuangan BLUD Puskesmas	Kab. Karawang	100	%	1.321.208.000	APBD 2		100	%	1.323.208.000
1.02.01.2.10.01	Peningkatan BLUD Puskesmas Pada Puskesmas Cikampek	Persentase Tingkat Kemandirian Keuangan BLUD Puskesmas	Kab. Karawang	100	%	2.470.416.000	APBD 2		100	%	2.472.416.000
1.02.01.2.10.01	Peningkatan BLUD Puskesmas Pada Puskesmas Cikampek Utara	Persentase Tingkat Kemandirian Keuangan BLUD Puskesmas	Kab. Karawang	100	%	414.449.000	APBD 2		100	%	416.449.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	
1.02.01.2.10.01	Peningkatan BLUD Puskesmas Pada Puskesmas Cilamaya	Persentase Tingkat Kemandirian Keuangan BLUD Puskesmas	Kab. Karawang	100	%	2.221.163.000	APBD 2		100	%	2.223.163.000
1.02.01.2.10.01	Peningkatan BLUD Puskesmas Pada Puskesmas Curug	Persentase Tingkat Kemandirian Keuangan BLUD Puskesmas	Kab. Karawang	100	%	683.702.000	APBD 2		100	%	685.702.000
1.02.01.2.10.01	Peningkatan BLUD Puskesmas Pada Puskesmas Gempol	Persentase Tingkat Kemandirian Keuangan BLUD Puskesmas	Kab. Karawang	100	%	1.233.791.000	APBD 2		100	%	1.235.791.000
1.02.01.2.10.01	Peningkatan BLUD Puskesmas Pada Puskesmas Jatisari	Persentase Tingkat Kemandirian Keuangan BLUD Puskesmas	Kab. Karawang	100	%	2.678.584.000	APBD 2		100	%	2.680.584.000
1.02.01.2.10.01	Peningkatan BLUD Puskesmas Pada Puskesmas Jayakarta	Persentase Tingkat Kemandirian Keuangan BLUD Puskesmas	Kab. Karawang	100	%	1.256.622.000	APBD 2		100	%	1.258.622.000
1.02.01.2.10.01	Peningkatan BLUD Puskesmas Pada Puskesmas Jomin	Persentase Tingkat Kemandirian Keuangan BLUD Puskesmas	Kab. Karawang	100	%	741.796.000	APBD 2		100	%	743.796.000
1.02.01.2.10.01	Peningkatan BLUD Puskesmas Pada Puskesmas Kalangsari	Persentase Tingkat Kemandirian Keuangan BLUD Puskesmas	Kab. Karawang	100	%	1.358.364.000	APBD 2		100	%	1.360.364.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	
1.02.01.2.10.01	Peningkatan BLUD Puskesmas Pada Puskesmas Karawang	Persentase Tingkat Kemandirian Keuangan BLUD Puskesmas	Kab. Karawang	100	%	1.252.936.000	APBD 2	100	%	1.254.936.000	
1.02.01.2.10.01	Peningkatan BLUD Puskesmas Pada Puskesmas Karawang Kulon	Persentase Tingkat Kemandirian Keuangan BLUD Puskesmas	Kab. Karawang	100	%	537.300.000	APBD 2	100	%	539.300.000	
1.02.01.2.10.01	Peningkatan BLUD Puskesmas Pada Puskesmas Kertamukti	Persentase Tingkat Kemandirian Keuangan BLUD Puskesmas	Kab. Karawang	100	%	1.921.052.000	APBD 2	100	%	1.923.052.000	
1.02.01.2.10.01	Peningkatan BLUD Puskesmas Pada Puskesmas Klari	Persentase Tingkat Kemandirian Keuangan BLUD Puskesmas	Kab. Karawang	100	%	1.748.634.000	APBD 2	100	%	1.750.634.000	
1.02.01.2.10.01	Peningkatan BLUD Puskesmas Pada Puskesmas Kotabaru	Persentase Tingkat Kemandirian Keuangan BLUD Puskesmas	Kab. Karawang	100	%	1.286.668.000	APBD 2	100	%	1.288.668.000	
1.02.01.2.10.01	Peningkatan BLUD Puskesmas Pada Puskesmas Kutamukti	Persentase Tingkat Kemandirian Keuangan BLUD Puskesmas	Kab. Karawang	100	%	1.278.408.000	APBD 2	100	%	1.280.408.000	
1.02.01.2.10.01	Peningkatan BLUD Puskesmas Pada Puskesmas Kutawaluya	Persentase Tingkat Kemandirian Keuangan BLUD Puskesmas	Kab. Karawang	100	%	1.587.277.000	APBD 2	100	%	1.589.277.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1.02.01.2.10.01	Peningkatan BLUD Puskesmasl Pada Puskesmas Lemah Duhur	Persentase Tingkat Kemandirian Keuangan BLUD Puskesmas	Kab. Karawang	100	%	1.033.673.000	APBD 2		100	%	1.035.673.000
1.02.01.2.10.01	Peningkatan BLUD Puskesmas Pada Puskesmas Lemahabang	Persentase Tingkat Kemandirian Keuangan BLUD Puskesmas	Kab. Karawang	100	%	2.500.311.000	APBD 2		100	%	2.502.311.000
1.02.01.2.10.01	Peningkatan BLUD Puskesmas Pada Puskesmas Loji	Persentase Tingkat Kemandirian Keuangan BLUD Puskesmas	Kab. Karawang	100	%	1.871.287.000	APBD 2		100	%	1.873.287.000
1.02.01.2.10.01	Peningkatan BLUD Puskesmas Pada Puskesmas Majalaya	Persentase Tingkat Kemandirian Keuangan BLUD Puskesmas	Kab. Karawang	100	%	1.271.362.000	APBD 2		100	%	1.273.362.000
1.02.01.2.10.01	Peningkatan BLUD Puskesmas Pada Puskesmas Medang Asem	Persentase Tingkat Kemandirian Keuangan BLUD Puskesmas	Kab. Karawang	100	%	1.443.200.000	APBD 2		100	%	1.445.200.000
1.02.01.2.10.01	Peningkatan BLUD Puskesmas Pada Puskesmas Nagasari	Persentase Tingkat Kemandirian Keuangan BLUD Puskesmas	Kab. Karawang	100	%	700.884.000	APBD 2		100	%	702.884.000
1.02.01.2.10.01	Peningkatan BLUD Puskesmas Pada Puskesmas Pacing	Persentase Tingkat Kemandirian Keuangan BLUD Puskesmas	Kab. Karawang	100	%	524.792.000	APBD 2		100	%	526.792.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	
1.02.01.2.10.01	Peningkatan BLUD Puskesmas Pada Puskesmas Pakisjaya	Persentase Tingkat Kemandirian Keuangan BLUD Puskesmas	Kab. Karawang	100	%	1.528.415.000	APBD 2		100	%	1.530.415.000
1.02.01.2.10.01	Peningkatan BLUD Puskesmas Pada Puskesmas Pangkalan	Persentase Tingkat Kemandirian Keuangan BLUD Puskesmas	Kab. Karawang	100	%	834.438.000	APBD 2		100	%	836.438.000
1.02.01.2.10.01	Peningkatan BLUD Puskesmas Pada Puskesmas Pasirukem	Persentase Tingkat Kemandirian Keuangan BLUD Puskesmas	Kab. Karawang	100	%	2.147.523.000	APBD 2		100	%	2.149.523.000
1.02.01.2.10.01	Peningkatan BLUD Puskesmas Pada Puskesmas Pedes	Persentase Tingkat Kemandirian Keuangan BLUD Puskesmas	Kab. Karawang	100	%	2.493.979.000	APBD 2		100	%	2.495.979.000
1.02.01.2.10.01	Peningkatan BLUD Puskesmas Pada Puskesmas Plawad	Persentase Tingkat Kemandirian Keuangan BLUD Puskesmas	Kab. Karawang	100	%	868.392.000	APBD 2		100	%	870.392.000
1.02.01.2.10.01	Peningkatan BLUD Puskesmas Pada Puskesmas Purwasari	Persentase Tingkat Kemandirian Keuangan BLUD Puskesmas	Kab. Karawang	100	%	1.382.416.000	APBD 2		100	%	1.384.416.000
1.02.01.2.10.01	Peningkatan BLUD Puskesmas Pada Puskesmas Rawamerta	Persentase Tingkat Kemandirian Keuangan BLUD Puskesmas	Kab. Karawang	100	%	1.329.426.000	APBD 2		100	%	1.331.426.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	
1.02.01.2.10.01	Peningkatan BLUD Puskesmas Pada Puskesmas Rengasdengklok	Persentase Tingkat Kemandirian Keuangan BLUD Puskesmas	Kab. Karawang	100	%	3.510.360.000	APBD 2		100	%	3.512.360.000
1.02.01.2.10.01	Peningkatan BLUD Puskesmas Pada Puskesmas Sukatani	Persentase Tingkat Kemandirian Keuangan BLUD Puskesmas	Kab. Karawang	100	%	1.174.817.000	APBD 2		100	%	1.176.817.000
1.02.01.2.10.01	Peningkatan BLUD Puskesmas Pada Puskesmas Sungaibuntu	Persentase Tingkat Kemandirian Keuangan BLUD Puskesmas	Kab. Karawang	100	%	923.590.000	APBD 2		100	%	925.590.000
1.02.01.2.10.01	Peningkatan BLUD Puskesmas Pada Puskesmas Telagasari	Persentase Tingkat Kemandirian Keuangan BLUD Puskesmas	Kab. Karawang	100	%	952.398.000	APBD 2		100	%	2.335.248.000
1.02.01.2.10.01	Peningkatan BLUD Puskesmas Pada Puskesmas Tanjungpura	Persentase Tingkat Kemandirian Keuangan BLUD Puskesmas	Kab. Karawang	100	%	2.333.248.000	APBD 2		100	%	954.398.000
1.02.01.2.10.01	Peningkatan BLUD Puskesmas Pada Puskesmas Telukjambe	Persentase Tingkat Kemandirian Keuangan BLUD Puskesmas	Kab. Karawang	100	%	1.348.059.000	APBD 2		100	%	1.350.059.000
1.02.01.2.10.01	Peningkatan BLUD Puskesmas Pada Puskesmas Tempuran	Persentase Tingkat Kemandirian Keuangan BLUD Puskesmas	Kab. Karawang	100	%	1.615.016.000	APBD 2		100	%	1.617.016.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	
1.02.01.2.10.01	Peningkatan BLUD Puskesmas Pada Puskesmas Tirtajaya	Persentase Tingkat Kemandirian Keuangan BLUD Puskesmas	Kab. Karawang	100	%	2.871.081.000	APBD 2	100	%	2.873.081.000	
1.02.01.2.10.01	Peningkatan BLUD Puskesmas Pada Puskesmas Tirtamulya	Persentase Tingkat Kemandirian Keuangan BLUD Puskesmas	Kab. Karawang	100	%	1.884.037.000	APBD 2	100	%	1.886.037.000	
1.02.01.2.10.01	Peningkatan BLUD Puskesmas Pada Puskesmas Tunggakjati	Persentase Tingkat Kemandirian Keuangan BLUD Puskesmas	Kab. Karawang	100	%	1.271.395.000	APBD 2	100	%	1.273.395.000	
1.02.01.2.10.01	Peningkatan BLUD Puskesmas Pada Puskesmas Wadas	Persentase Tingkat Kemandirian Keuangan BLUD Puskesmas	Kab. Karawang	100	%	949.354.000	APBD 2	100	%	951.354.000	
1.02.01.2.10.01	Peningkatan BLUD Puskesmas Pada Puskesmas Wanakerta	Persentase Tingkat Kemandirian Keuangan BLUD Puskesmas	Kab. Karawang	100	%	1.713.219.000	APBD 2	100	%	1.715.219.000	
2	1.02.02.2	Persentase RS Rujukan dan Faskes Dasar yang terakreditasi	Kab. Karawang	100	%	307.453.608.850	APBD 2	100	%	263.768.732.678	
		Persentase Rata-rata Capaian SPM		100	%						
		Persentase Balita Gizi Kurang		16	%						

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
		Persentase Desa/Kelurahan STBM		90,61	%			90,61	%		
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan Dasar dan Rujukan yang difasilitasi	Kab. Karawang	54	Faskes	199.508.416.950	APBD 2		54	Faskes	143.110.239.000
1.02.02.2.01.01	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Pembangunan RSUD yang dilaksanakan	Kab. Karawang	1	Gedung	157.782.831.950	APBD 2	Pembangunan RSUD Rengas Dengklok Tahun ke-2	1	Gedung	154.871.200.000
1.02.02.2.01.02	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pembangunan Puskesmas dengan Tempat Perawatan	Kab. Karawang	6	Puskesmas	29.489.120.000	APBD 2	Pembangunan 6 Puskesmas rawat inap dan Pembelian tanah 6 lokasi	6	Puskesmas	55.510.239.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	
1.02.02.2.01.12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah rumah tunggu pasien rujukan	Kab. Karawang	2	Unit	4.500.000.000	APBD 2	Sewa RTPR Dharma is dan RSCM	2	unit	1.000.000.000
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Paket pengadaan Alat Kesehatan	Kab. Karawang	1	paket	357.000.000	APBD 2	Pengadaan Alkes rawat inap Puskesmas	1	paket	60.000.000.000
1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	Persentase Ketersediaan Obat Essensial di Puskesmas	Kab. Karawang	100	%	4.148.729.300	APBD 2		100	%	15.000.000.000
1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Paket pengadaan bahan habis pakai	Kab. Karawang	1	paket	3.230.735.700	APBD 2		1	paket	9.600.000.000
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rata-rata capaian Standar Pelayanan Minimal	Kab. Karawang	100	Persentase	103.835.110.500	APBD 2		100	Persentase	118.216.418.278
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil	Kab. Karawang	100	%	6.332.757.800	APBD 2	SPM	100	%	7.766.583.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Kab. Karawang	100	%	81.719.700	APBD 2	SPM	100	%	188.669.000
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Kab. Karawang	100	%	27.729.200	APBD 2	SPM	100	%	53.421.000
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar	Kab. Karawang	100	%	85.319.800	APBD 2	SPM	100	%	83.758.000
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kab. Karawang	100	%	14.660.000	APBD 2	SPM	100	%	160.906.000
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Kab. Karawang	100	%	59.660.000	APBD 2	SPM	100	%	393.006.000
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Persentase warga negara usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Kab. Karawang	100	%	39.140.000	APBD 2	SPM	100	%	106.095.174

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8		9		10	
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	Kab. Karawang	100	%	32.050.000	APBD 2	SPM	100	%	62.695.000	
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kab. Karawang	100	%	32.210.000	APBD 2	SPM	100	%	65.037.000	
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Kab. Karawang	100	%	131.915.000	APBD 2	SPM	100	%	235.647.000	
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Kab. Karawang	100	%	267.774.200	APBD 2	SPM	100	%	346.326.000	
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Kab. Karawang	100	%	822.300.000	APBD 2	SPM dan HIBAH KPAIDs	100	%	284.051.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	
1.02.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Persentase Masyarakat yang dilayani di lokasi Bencana	Kab. Karawang	100	%	59.580.000	APBD 2		100	%	821.437.000
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Prevalensi Stunting(pendek dan sangat pendek) pada balita	Kab. Karawang	12,5	%	434.486.600	APBD 2		12,5	%	1.163.608.600
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Persentase Puskesmas Menyelenggarakan Kesehatan Kerja Dasar	Kab. Karawang	100	%	70.393.200	APBD 2		100	%	142.169.000
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Persentase penduduk yang memiliki akses berkelanjutan terhadap sumber air minum berkualitas (layak)	Kab. Karawang	85	%	1.136.820.000	APBD 2		90	%	1.400.000.000
1.02.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Persentase puskesmas menyelenggarakan kesehatan tradisional	Kab. Karawang	50	%	21.160.000	APBD 2		60	%	100.091.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Persentase kasus KLB penyakit/keracunan pangan terlacak/investigasi	Kab. Karawang	100	%	310.630.000	APBD 2		100	%	374.739.600
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Persentase pasien gangguan jiwa dan NAPZA yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kab. Karawang	70	%	28.300.000	APBD 2	Workshop dokter dan perawat Puskesmas	75	%	
1.02.02.2.02.23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah pelayanan kesehatan khusus yang dilaksanakan	Kab. Karawang	3	jenis	515.663.800	APBD 2	Penambahan jumlah hari dan pos pelayanan mengikuti instruksi POLRES	3	jenis	-
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase Penderita Penyakit Menular dan Tidak Menular Mendapat Perawatan Sesuai Standar	Kab. Karawang	100	%	553.830.000	APBD 2	Penambahan fogging focus sebanya	100	%	156.876.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
								k 150 titik			
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Persentase Penduduk yang mendapatkan jaminan kesehatan menuju Universal Health Coverage (UHC)	Kab. Karawang	100	%	85.904.060.000	APBD 2	Kenaikan : PBPU BP Rp.1M, Jamkesda Rp.7M, PBI APBD 2 Rp.5M, PBI APBD 1 Rp.20M	100	%	85.994.095.000
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas Adiarsa		Kab. Karawang				APBD 2				
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas Anggadita		Kab. Karawang				APBD 2				
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas Balongsari		Kab. Karawang				APBD 2				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas Batujaya		Kab. Karawang				APBD 2			
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas Bayurlor		Kab. Karawang				APBD 2			
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas Ciampel		Kab. Karawang				APBD 2			
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas Cibuaya		Kab. Karawang				APBD 2			
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas Cicinde		Kab. Karawang				APBD 2			
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas Cikampek		Kab. Karawang				APBD 2			
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas Cikampek Utara		Kab. Karawang				APBD 2			
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas Cilamaya		Kab. Karawang				APBD 2			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas Curug		Kab. Karawang				APBD 2			
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas Gempol		Kab. Karawang				APBD 2			
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas Jatisari		Kab. Karawang				APBD 2			
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas Jayakarta		Kab. Karawang				APBD 2			
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas Jomin		Kab. Karawang				APBD 2			
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas Kalangsari		Kab. Karawang				APBD 2			
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas Karawang		Kab. Karawang				APBD 2			
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas Karawang Kulon		Kab. Karawang				APBD 2			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas Kertamukti		Kab. Karawang				APBD 2			
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas Klari		Kab. Karawang				APBD 2			
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas Kotabaru		Kab. Karawang				APBD 2			
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas Kutamukti		Kab. Karawang				APBD 2			
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas Kutawaluya		Kab. Karawang				APBD 2			
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas Lemah Duhur		Kab. Karawang				APBD 2			
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas Lemahabang		Kab. Karawang				APBD 2			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas Loji		Kab. Karawang			APBD 2				
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas Majalaya		Kab. Karawang			APBD 2				
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas Medangasem		Kab. Karawang			APBD 2				
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas Nagasari		Kab. Karawang			APBD 2				
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas Pacing		Kab. Karawang			APBD 2				
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas Pakisjaya		Kab. Karawang			APBD 2				
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas Pangkalan		Kab. Karawang			APBD 2				
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas Pasirukem		Kab. Karawang			APBD 2				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas Pedes		Kab. Karawang				APBD 2			
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas Plawad		Kab. Karawang				APBD 2			
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas Purwasari		Kab. Karawang				APBD 2			
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas Rawamerta		Kab. Karawang				APBD 2			
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas Rengasdengklok		Kab. Karawang				APBD 2			
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas Sukatani		Kab. Karawang				APBD 2			
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas Sungai Buntu		Kab. Karawang				APBD 2			
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan		Kab. Karawang				APBD 2			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Puskesmas Tanjung Pura									
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas Telagasari		Kab. Karawang				APBD 2			
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas TelukJambe		Kab. Karawang				APBD 2			
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas Tempuran		Kab. Karawang				APBD 2			
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas Tirtajaya		Kab. Karawang				APBD 2			
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas Tirtamulya		Kab. Karawang				APBD 2			
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas Tunggakjati		Kab. Karawang				APBD 2			
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas Wadas		Kab. Karawang				APBD 2			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas Wanakerta		Kab. Karawang				APBD 2				
1.02.02.2.02.30	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah faskes yang menyediakan pelayanan telemedicine berkualitas	Kab. Karawang	53	Faskes	29.670.000	APBD 2		53	Faskes	94.000.000
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase Pemanfaatan Dana Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas	Kab. Karawang	100	%	-	APBD 2		100	%	
1.02.02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Persentase pelayanan kesehatan laboratorium kesehatan daerah	Kab. Karawang	100	%	3.051.002.200	APBD 2		100	%	13.056.511.904
1.02.02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas Terakreditasi Utama	Kab. Karawang	7	Puskesmas	1.577.651.600	APBD 2		7	Puskesmas	3.350.643.000
1.02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Persentase Kejadian kasus ikutan pasca imunisasi yang tertangani	Kab. Karawang	100	%	496.031.400	APBD 2		100	%	462.440.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1.02.02.2.02.38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Persentase kasus gawat darurat yang tertangani	Kab. Karawang	100	%	1.718.596.000	APBD 2	HIBAH PMI Rp770.850.000	100	%	1.353.613.000
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Persentase Puskesmas menggunakan Sistem Informasi Kesehatan	Kab. Karawang	100	%	962.657.600	APBD 2		100	%	879.236.400
1.02.02.2.03.01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Puskesmas menggunakan SIKDA Generik	Kab. Karawang	50	Puskesmas	962.657.600	APBD 2		50	Puskesmas	879.236.400
1.02.02.2.03.03	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Kab. Karawang	1	Paket	-	APBD 2		1	Paket	-
1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitas Kesehatan melaksanakan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Karawang	100	%	3.147.423.800	APBD 2		100	%	1.562.839.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1.02.02.2.04.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Persentase RS dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memiliki surat ijin operasional (SIO)	Kab. Karawang	100	%	202.044.000	APBD 2	100	%	202.044.000	
1.02.02.2.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Puskesmas	Kab. Karawang	91,28	%	1.966.159.800	APBD 2	91,28	%	740.795.000	
1.02.02.2.04.04	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Puskesmas dan RS melaksanakan pelayanan rujukan sesuai standar	Kab. Karawang	100	%	979.220.000	APBD 2	100	%	620.000.000	
3	1.02.03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Kab. Karawang	100	%	5.610.285.000	APBD 2	100	%	99.956.960.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1.02.03.2.02	<i>Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota</i>	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Melaksanakan Perencanaan dan Pengelolaan Mutu Tenaga Kesehatan	Kab. Karawang	100	%	5.031.000.000	APBD 2		100	%	5.000.000.000
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Persentase Fasilitas Kesehatan dengan tenaga kesehatan sesuai standar	Kab. Karawang	100	%	5.031.000.000	APBD 2	Insentif Covid.19 if..	100	%	5.000.000.000
1.02.03.2.03	<i>Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	Persentase SDM Kesehatan yang mendapat Pendidikan dan Pelatihan sesuai Kompetensi	Kab. Karawang	100	%	579.285.000	APBD 2		100	%	94.956.960.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1.02.03.2.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang ditingkatkan kualifikasinya melalui pendidikan dan pelatihan	Kab. Karawang	50	orang	579.285.000	APBD 2	50	orang	94.956.960.000	
4	1.02.04	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Kab. Karawang	100	%	122.190.300	APBD 2	100	%	220.760.000	
1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Kab. Karawang	100	%	122.190.300	APBD 2	100	%	220.760.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1.02.04.2.01.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Kab. Karawang	1	dokumen	122.190.300	APBD 2	1	dokumen	220.760.000	
5	1.02.05	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Kab. Karawang	100	%	11.953.406.600	APBD 2	100	%	13.000.000.000	
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor	Kab. Karawang	100	%	553.406.600	APBD 2	100	%	13.000.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Desa siaga aktif berstrata PURI (Purnama Mandiri)	Kab. Karawang	48	Desa	553.406.600	APBD 2		48	Desa	13.000.000.000
<i>1.02.05.2.03</i>	<i>Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)</i>	Kab. Karawang			<i>11.400.000.000</i>	APBD 2				
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kab. Karawang	1	Dokumen	11.400.000.000	APBD 2	Transport/ insentif kader posyandu (11.875 x 12 bl x Rp.80.000)	1	Dokumen	

BAB V

PENUTUP

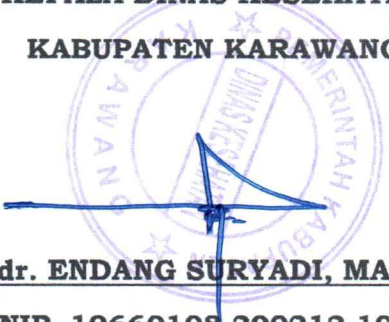
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang Tahun 2023 merupakan penjabaran dari sasaran dan program Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Tahun 2021 – 2026.

Dengan adanya Renja Dinas Kesehatan diharapkan akan memberikan perspektif mengenai apa yang ingin dihasilkan ke depan, dan sebagai acuan dalam melaksanakan setiap kegiatan dan tugas-tugas Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang dan pedoman seluruh personil Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang untuk meningkatkan kinerjanya sesuai dengan visi dan misi yang telah menjadi komitmen bersama.

Keberhasilan pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang Tahun 2023, sangat tergantung kepada komitmen bersama seluruh komunitas kesehatan dalam mewujudkan pembangunan kesehatan yang berkualitas demi tercapainya masyarakat Karawang yang Sehat dan Mandiri.

Karawang, 1 Agustus 2022

**KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KARAWANG**



dr. ENDANG SURYADI, MARS
NIP. 19660108 200212 1002